

**LAPORAN
PENENTUAN PERINGKAT KESEJAHTERAAN
(P2K08)
DI 12 KABUPATEN/KOTA
TAHUN 2008**

**Effectively Targeting Anti Poverty Programs:
PMT Method**



Badan Pusat Statistik

Jl. Dr. Soetomo 6-8 Jakarta 10710, Telp/Fax : (021) 3810291

KATA PENGANTAR

Dalam upaya mengurangi penduduk miskin di Indonesia, pemerintah Indonesia sejak lama telah mencanangkan dan mengimplementasikan berbagai kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan. Untuk mendukung strategi penanggulangan kemiskinan, Badan Pusat Statistik (BPS) dipercaya pemerintah untuk menyajikan data dan informasi kemiskinan, baik yang bersifat mikro maupun yang bersifat makro.

Dalam mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs*). Untuk data dan informasi kemiskinan makro, sumbernya adalah data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilaksanakan BPS setiap tahun. Untuk data kemiskinan mikro, pada tahun 2005 BPS telah melakukan Pendataan Sosial Ekonomi (PSE05) yang bertujuan untuk mendapatkan database rumah tangga miskin yang layak mendapat Bantuan Langsung Tunai (BLT) pada tahun 2005-2006. Disamping untuk program BLT, data PSE05 juga dipakai dalam targeting rumah tangga pada beberapa program nasional, seperti Asuransi Kesehatan Penduduk Miskin (Askeskin) dan program beras murah bagi rumah tangga miskin (Raskin). Setelah kegiatan PSE05, pada tahun 2007 BPS juga menyelenggarakan pengumpulan data kemiskinan mikro untuk mendapatkan database rumah tangga calon penerima program Bantuan Langsung Tunai Bersyarat (Program Keluarga Harapan) tahun 2007 dan 2008 melalui Survei Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan 2007 (SPDKP07).

Untuk mendapatkan data kemiskinan mikro, metode penentuan rumah tangga miskin yang digunakan dalam PSE05 dan SPDKP07 masih perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, pada tahun 2008, Bank Dunia bekerja sama dengan *Jameel Poverty Action Lab* (MIT University) dan BPS melaksanakan *Effectively Targeting Anti Poverty Program: PMT Method* yang dituangkan dalam kegiatan Penentuan Peringkat Kesejahteraan di 12 kabupaten/kota yang merupakan kegiatan lanjutan dari Studi Efektivitas Targeting Program Anti Kemiskinan di 4 kabupaten. Program ini membandingkan keefektifan 3 metode yang digunakan untuk pengidentifikasian rumah tangga sasaran. Selain itu, program ini juga membandingkan keefektifan pelaksanaan survei antara yang dilaksanakan oleh BPS atau komunitas.

Buku ini merupakan laporan hasil studi tersebut yang hasilnya diharapkan dapat memberi masukan pada pemerintah dalam mengambil keputusan untuk mengidentifikasi rumah tangga miskin sebagai target sasaran program penanggulangan kemiskinan.

Jakarta, Maret 2009
Direktur Pengembangan Metodologi
Sensus dan Survei

Dr. Hamonangan Ritonga, M.Sc.
NIP. 340007731

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Daftar Tabel.....	iv
Daftar Gambar	v
PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang	1
2. Tujuan.....	2
3. Perbandingan Antar Metode	3
4. Ruang Lingkup.....	3
5. Jadwal Pelaksanaan	5
6. Jenis Daftar yang Digunakan.....	5
MEKANISME PENGUMPULAN DATA	6
1. Metode PMT	6
2. Metode Komunitas	7
3. Metode Hibrida	7
PROXY MEANS TEST (PMT)	9
1. Kegunaan PMT	9
2. Pengestimasian Pengeluaran Rumah Tangga	9
PELAKSANAAN LAPANGAN.....	15
1. Persiapan.....	15
1.1 Organisasi Lapangan	15
1.2 Petugas Lapangan dan Koordinasi	16
1.3 Alokasi Dokumen.....	16
1.4 Pelatihan Petugas	16
1.5 Sosialisasi	17
2. Pelaksanaan Lapangan.....	17
2.1 Pencacahan.....	17
2.2 Pengawasan.....	18
2.3 Pelaksanaan Lapangan.....	18
2.3.1 KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN.....	18
2.3.2 KOTA PEMATANG SIANTAR	19
2.3.3 KABUPATEN PURBALINGGA.....	19
2.3.4 KABUPATEN WONOGIRI.....	20
2.3.5 KABUPATEN BONE	22
2.4 Permasalahan, Kesulitan Hambatan, Kendala, Solusi, dan Saran	22
2.4.1 KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN.....	22
2.4.2 KABUPATEN SERDANG BEDAGAI	24
2.4.3 KOTA PEMATANG SIANTAR	25
2.4.4 KABUPATEN PURBALINGGA.....	28
2.4.5 KABUPATEN WONOGIRI.....	29
2.4.6 KABUPATEN DEMAK	31
2.4.7 KABUPATEN KENDAL.....	32
2.4.8 KOTA SEMARANG.....	34

2.4.9 KABUPATEN BONE	35
2.4.10 KABUPATEN ENREKANG	37
2.4.11 KABUPATEN TANA TORAJA	38
2.4.12 KOTA MAKASSAR.....	38
2.5 Pemasangan Daftar Rumah Tangga Sasaran dan Distribusi Dana	40
3. Pengolahan.....	40
3.1 Pelaksanaan Ban Berjalan.....	40
3.2 Pencapaian	40
3.3 Masalah Terkait dengan Pengolahan dan Penyelesaiannya.....	41
4. Administrasi.....	41
4.1 Mekanisme Pengelolaan Anggaran.....	41
4.2 Masalah dan Penyelesaian	42
HASIL STUDI.....	42
1. Metode PMT	42
2. Metode Hibrida (Hybrid Method)	47
PENUTUP	51
1. Kesimpulan	51
2. Saran.....	52
LAMPIRAN	54
Lampiran 1. Daftar Sampel Kecamatan dan Desa Terpilih Penentuan Peringkat Kesejahteraan (P2K08) dan Metode yang Digunakan	55
Lampiran 2. Data Isian Kuesioner P2K08 untuk Kasus Contoh di Kabupaten Bone.....	75

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Metode yang Digunakan dalam P2K08.....	3
Tabel 2. Kabupaten/Kota Terpilih Program P2K 2008.....	4
Tabel 3. Jumlah Kecamatan, Desa Perkotaan dan Desa Perdesaan Terpilih	4
Tabel 4. Koefisien PMT: Humbang Hasundutan – Purbalingga	10
Tabel 5. Koefisien PMT: Wonogiri - Semarang.....	12
Tabel 6. Koefisien PMT: Bone – Makassar	13
Tabel 7. Pelaksanaan Pelatihan Petugas P2K08.....	17
Tabel 8. Jumlah Rumahtangga Hasil Updating (P2K08-UD) Menurut Hasil Kunjungan dan Sumber Informasi.....	42
Tabel 9. Jumlah Rumahtangga Hasil Updating (P2K08-UD) dan Yang Layak didata dengan P2K08-ID Menurut Kabupaten/Kota.....	43
Tabel 10. Jumlah Rumahtangga yang didata dengan P2K08-ID Menurut Kabupaten/Kota dan Hasil Kunjungan dan Wawancara.....	44
Tabel 11. Jumlah RTS hasil PMT Menurut Kabupaten/Kota Berdasarkan Quota SLS.	46
Tabel 12. Jumlah RTS yang Memiliki Asset Penting Menurut Kabupaten/Kota	47
Tabel 13. Jumlah Rumahtangga hasil Form 7B Menurut Kabupaten/Kota	48
Tabel 14. Jumlah Rumahtangga yang didata dengan P2K08-ID Menurut Kabupaten/Kota dan Hasil Kunjungan dan Wawancara.....	48
Tabel 15. Jumlah Rumahtangga (Hybrid) untuk PMT Menurut Kab/Kota	49
Tabel 16. Jumlah RTS (Hybrid) hasil PMT Menurut Kabupaten/Kota Berdasarkan Quota SLS.	50
Tabel 17. Jumlah RTS (Hybrid) yang Memiliki Asset Penting Menurut Kabupaten/Kota	50
Tabel 18. Kelemahan Serta Keunggulan Dari Metode yang Digunakan.....	53

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Diagram Alur Kegiatan P2K08 Menurut Metode	8
Gambar 2. Langkah-langkah perumusan PMT.....	9
Gambar 3. Hierarki Petugas Lapangan	16
Gambar 4. Scatter Diagram antara Ranking PMT dengan Peringkat Komunitas	51

PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Kemiskinan merupakan permasalahan mendasar yang banyak yang dihadapi negara-negara berkembang seperti Indonesia. Kemiskinan selalu menjadi agenda utama pembangunan di Indonesia mulai dari pemerintahan Presiden Soekarno sampai dengan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Beberapa kebijakan dan program pengentasan kemiskinan sudah dicanangkan dan diimplementasikan. Masalah kemiskinan mendapat perhatian lebih dari pemerintah terutama setelah terjadi krisis ekonomi pada pertengahan tahun 1997. Bahkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2004-2009 telah ditargetkan penurunan kemiskinan di Indonesia selama lima tahun dari 16,7 persen pada tahun 2004 menjadi 8,2 persen pada tahun 2009.

Untuk mendukung strategi penanggulangan kemiskinan, Badan Pusat Statistik (BPS) dipercaya pemerintah untuk menyajikan data dan informasi kemiskinan. Dalam mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Sumber data yang dipakai adalah data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilaksanakan BPS setiap tahun. Metode pengukuran tingkat kemiskinan didasarkan pada Garis Kemiskinan (GK), sehingga mereka yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah GK dikategorikan sebagai penduduk miskin. Sayangnya karena keterbatasan jumlah sampel, maka BPS hanya dapat menghasilkan indikator kemiskinan tingkat nasional, provinsi dan kabupaten yang umumnya disebut indikator kemiskinan makro. Indikator-indikator yang dihasilkan ini hanya baik untuk targeting wilayah namun tidak dapat digunakan untuk targeting individu (rumah tangga).

Pada tahun 2005, BPS melakukan Pendataan Sosial Ekonomi (PSE05) yang bertujuan untuk mendapatkan data kemiskinan mikro berupa direktori rumah tangga miskin yang patut mendapat Bantuan Langsung Tunai (BLT) pada tahun 2005-2006. Diketahui ternyata data hasil PSE05 dianggap lebih baik dibandingkan dengan database yang tersedia di pemerintahan daerah. Meskipun demikian, diakui bahwa data hasil PSE05 belum sempurna. Penelitian dari 56 universitas menemukan data hasil PSE05 masih mengandung 8 persen *inclusion error* dan 22,36 persen *exclusion error* (Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat 2005). Disamping untuk program BLT, data PSE05 juga dipakai dalam targeting rumah tangga pada beberapa program nasional, seperti Asuransi Kesehatan Penduduk Miskin (Askeskin) dan program beras murah bagi rumah tangga miskin (Raskin). Program-program ini ternyata berhasil menurunkan tingkat kemiskinan, terbukti rumah tangga miskin sebanyak 17,8 persen pada tahun 2006 turun menjadi 15,4 persen pada tahun 2008. Namun perlu

disadari bahwa pendataan PSE05 merupakan kegiatan yang sangat besar bagi BPS, sehingga banyak kegiatan BPS yang lain yang tertunda pada waktu itu.

Setelah kegiatan PSE05, pada tahun 2007 BPS juga menyelenggarakan pengumpulan data rumah tangga untuk program Bantuan Langsung Tunai Bersyarat (Program Keluarga Harapan/PKH) tahun 2007. Pengumpulan data untuk mendukung program ini disebut Survei Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan 2007 (SPDKP07). Hasil dari SPDKP07 dianggap jauh lebih baik dibandingkan data hasil PSE05 karena hanya lebih sedikit *inclusion* dan *exclusion error*-nya. Hal ini dikarenakan SPDKP07 dilaksanakan hanya di 953 kabupaten/kota terpilih dan anggarannya pun jauh lebih besar.

Pemerintah Indonesia mengandalkan hasil dari kegiatan-kegiatan di atas untuk memberikan bantuan sosial kepada rumah tangga miskin. Pemerintah memberikan prioritas pada kaum miskin dalam memberikan transfer sosial sebagai akibat kenaikan harga BBM dan mengingat anggaran yang terbatas. Setelah melaksanakan program bantuan sosial untuk program anti kemiskinan seperti BLT, PKH, Akseskin, Raskin, dll, pemerintah berharap tingkat kemiskinan berkurang. Oleh karena itu, *targeting* program bantuan sosial kepada kaum miskin menjadi prioritas pemerintah. Namun, berdasarkan pengalaman sebelumnya, pengumpulan data seperti PSE05 dan SPDKP07 membutuhkan sumber daya manusia dan anggaran yang besar. Dalam rangka memberikan hasil *targeting* terbaik sesuai anggaran, perlu dicari indikator yang lebih baik atau metode yang efektif untuk meningkatkan identifikasi rumah tangga miskin yang layak untuk berbagai program bantuan yang akan dilaksanakan di masa mendatang. Program ini akan melakukan hal tersebut di 12 kabupaten/kota di Indonesia.

2. TUJUAN

Secara umum tujuan dari Penentuan Peringkat Kesejahteraan ini adalah untuk mengetahui metode mana yang lebih efektif dan akurat dalam mendata dan menentukan rumah tangga sasaran sehingga dapat memberikan masukan pada pemerintah tentang cara terbaik dalam menentukan rumah tangga sasaran untuk program sosial di masa mendatang. Dengan kata lain, hasil program ini akan memberikan masukan kepada pemerintah Indonesia metode mana yang terbaik, paling efisien dan efektif dari segi biaya.

Sedangkan tujuan khusus dari program ini adalah:

1. Untuk membandingkan keefektifan dan keakuratan metode pendataan rumah tangga sasaran dengan metode PMT, metode komunitas, dan metode hibrida. Metode hibrida ini merupakan kombinasi antara metode PMT dan komunitas.
2. Untuk membandingkan keefektifan dan keakuratan dari setiap metode sesuai kondisi lokal dengan institusi pemerintahan yang berbeda, norma budaya, tingkat kualitas infrastruktur/urbanisasi, dll yang berbeda.

Program ini akan menggali lebih dalam keluhan atau protes sosial dengan proses penciptaan daftar rumah tangga sasaran sehingga penyesuaian (*adjustment*) dapat dilakukan untuk desain penelitian akhir.

3. *PERBANDINGAN ANTAR METODE*

Sebagaimana telah disebutkan pada tujuan bahwa ada 3 metode yang digunakan dalam penentuan peringkat kesejahteraan ini. Secara garis besarnya, ketiga metode ini dituangkan dalam tabel 1 berikut:

Tabel 1. Metode yang Digunakan dalam P2K08

Metode	Kerangka Pikir
PMT	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Dilakukan <i>updating</i> rumah tangga menggunakan Daftar P2K08-UD ✓ Menggunakan banyak indikator (Daftar P2K08-ID) ✓ Rumus penimbang PMT untuk menentukan rumah tangga yang layak ✓ Daftar rumah tangga sasaran ditentukan berdasarkan <i>quota</i>
Komunitas	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Pertemuan fasilitator dengan seluruh rumahtangga atau tokoh masyarakat/agama setempat. ✓ Menggunakan indikator kesejahteraan versi komunitas ✓ Komunitas <i>me-ranking</i> seluruh rumah tangga: dari yang paling kurang sejahtera sampai yang paling sejahtera ✓ Daftar rumah tangga sasaran ditentukan berdasarkan <i>quota</i>
Hibrida	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Kombinasi Metode PMT dan komunitas ✓ Menggunakan indikator kesejahteraan versi komunitas ✓ Melakukan musyawarah ✓ Komunitas <i>me-ranking</i> seluruh rumah tangga: dari yang paling kurang sejahtera sampai yang paling sejahtera ✓ BPS memverifikasi $1.5 \times \text{quota}$ calon rumah tangga sasaran dengan Daftar Indikator (P2K08-ID) ✓ Rumus PMT diterapkan pada untuk rumah tangga-rumahtangga yang dicacah dengan Daftar P2K08-ID. ✓ Daftar rumah tangga sasaran ditentukan berdasarkan <i>quota</i>

4. *RUANG LINGKUP*

Program ini akan dilaksanakan di 3 provinsi, yaitu Sumatera Utara, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan. Kabupaten/kota di provinsi ini dibagi menjadi 2 kelompok (50% *urban* dan

50% *rural*). Kabupaten/kota sampel dipilih secara acak pada setiap kelompok, dan terpilihlah 12 kabupaten/kota, yaitu:

Tabel 2. Kabupaten/Kota Terpilih Program P2K 2008

Propinsi	Kode Kabupaten /Kota	Nama Kabupaten/Kota
Sumatera Utara	1215	Humbang Hasundutan
	1218	Serdang Bedagai
	1273	Pematang Siantar
Jawa Tengah	3303	Purbalingga
	3312	Wonogiri
	3321	Demak
	3324	Kendal
	3374	Semarang
Sulawesi Selatan	7311	Bone
	7316	Enrekang
	7318	Tana Toraja
	7371	Makasar

Desa-desanya di 12 kabupaten/kota ini kemudian dipilih secara acak. Hasilnya, terpilih 640 desa di 68 kecamatan terpilih di program ini. Total jumlah kecamatan dan desa di setiap kabupaten/kota terpilih dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Jumlah Kecamatan, Desa Perkotaan dan Desa Perdesaan Terpilih

Propinsi	Kode Kab/ Kota	Nama Kabupaten/Kota	Juml Kec	Jumlah Desa		Total
				Perkotaan	Perdesaan	
Sumatera Utara	1215	Humbang Hasundutan	2	0	37	37
	1218	Serdang Bedagai	13	17	65	82
	1273	Pematang Siantar	7	43	0	43
Jawa Tengah	3303	Purbalingga	8	46	17	63
	3312	Wonogiri	3	8	32	40
	3321	Demak	3	19	28	47
	3324	Kendal	7	47	45	92
	3374	Semarang	6	48	0	48
Sulawesi Selatan	7311	Bone	8	18	63	81
	7316	Enrekang	2	4	22	26
	7318	Tana Toraja	4	23	17	40
	7371	Makasar	5	42	0	42
Total			68	314	326	640

Dari setiap desa, satu SLS terkecil (dusun/lingkungan/RT) dipilih secara acak untuk menguji satu metode saja. Sehingga, secara total ada 640 SLS terpilih. Dari 640 SLS, 209 SLS dikenai perlakuan Metode PMT, 214 SLS dikenai perlakuan Metode Komunitas, dan sisanya 217 SLS dikenai perlakuan Metode Hibrida.

5. JADWAL PELAKSANAAN

No.	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan
1.	Rapat awal	Minggu I-II November'08
2.	Pembuatan instrumen	Minggu II-IV November'08
3.	Pembuatan Program PMT	Minggu II-IV November'08
4.	Rekrutmen pencacah	Minggu III Nov-Minggu I Desember'08
5.	Pelatihan instruktur nasional	Minggu II Desember'08
6.	Pelatihan pencacah lapangan	Minggu II-III Desember'08
7.	Sosialisasi	Minggu IV Desember'08
8.	Pengumpulan data lapangan	Minggu IV Des'08- Minggu IV Januari'09
9.	Entri data dan Programming PMT	Minggu I Januari-Minggu III Februari'09
10.	Uji publik daftar rumah tangga	Minggu I-IV Februari'09
11.	Distribusi dana	Minggu I-IV Februari'09
12.	Pengiriman data ke BPS Pusat	Minggu IV Februari-Minggu I Maret'09
13.	Kompilasi dan validasi ulang data	Minggu I-II Maret'09
14.	Penyerahan data ke Bank Dunia	Minggu II-III Maret'09
15.	Penulisan laporan	Minggu II-IV Maret'09

6. JENIS DAFTAR YANG DIGUNAKAN

Daftar yang digunakan dalam kegiatan Penentuan Peringkat Kesejahteraan ini adalah :

1. Daftar Updating Rumahtangga (Daftar P2K08-UD)

Daftar ini merupakan daftar *pre-printed* yang berisi daftar nama kepala rumahtangga dalam SLS terpilih berdasarkan *baseline survey* yang dilakukan oleh *survey matter* yang dikontrak khusus oleh Bank Dunia untuk melakukan pendataan SUSETI (Survei Sosial Ekonomi Rumahtangga Indonesia). Rumahtangga hasil pendataan SUSETI inilah yang dicetak dalam Daftar P2K08-UD dengan masing-masing rumahtangga memiliki nomor rumahtangga yang berbeda (bukan nomor urut tetapi unik untuk setiap rumahtangga). Dalam Daftar P2K08-UD ini juga disediakan beberapa baris kosong yang sudah disediakan nomor rumahtangga untuk menampung rumahtangga yang tidak tercatat di *baseline survey*.

2. Daftar Indikator (Daftar P2K08-ID)

Daftar ini digunakan untuk mendapatkan keterangan karakteristik rumah tangga yang mencakup keterangan umum rumah tangga, perumahan, dan kepemilikan asset rumah tangga yang ditujukan untuk mengumpulkan keterangan variabel kesejahteraan suatu rumah tangga dengan metode pendataan PMT dan Hibrida.. Tujuan khusus dari daftar ini adalah untuk menyediakan keterangan-keterangan rumahtangga yang selanjutnya digunakan sebagai input penghitungan PMT (*Proxy Means Test*).

3. Form 7B

Daftar ini berisi rumahtangga yang telah diperingkat dari yang paling tidak sejahtera sampai dengan yang paling sejahtera dalam SLS terpilih untuk metode hibrida. Peringkat rumahtangga ini didasarkan atas musyawarah antara fasilitator dari LSM Mitra Samya dengan masyarakat atau tokoh masyarakat/tokoh agama setempat.

4. Daftar P2K08-RTS

Daftar ini memuat rumah tangga sasaran hasil PMT. Rumahtangga yang terdapat dalam daftar ini selanjutnya akan menerima uang sebanyak Rp. 30.000,- yang didistribusikan oleh LSM Mitra Samya dengan disaksikan oleh KSK.

MEKANISME PENGUMPULAN DATA

1. METODE PMT

1. PCS mendatangi ketua SLS untuk mengkonfirmasi rumah-rumah tangga yang tercantum pada Daftar P2K08-UD.
2. Jika ketua SLS menyatakan masih ada rumah tangga yang belum tercantum pada Daftar P2K08-UD, maka PCS harus mencatat rumah tangga tersebut pada Daftar P2K08-UD.
3. PCS mendatangi semua rumah tangga tersebut untuk melakukan verifikasi rumah tangga yang tercantum pada Daftar P2K08-UD dan melakukan pencacahan rumah tangga dengan menggunakan Daftar P2K08-ID.
4. Apabila ditemukan rumah tangga di lapangan yang belum tercatat di Daftar P2K08-UD, maka PCS wajib mencatat di Daftar P2K08-UD dan mewawancarai rumah tangga tersebut dengan Daftar Indikator (P2K08-ID).
5. Setelah semua rumah tangga di data dengan Daftar P2K08-UD dan P2K08-ID, PCS menyerahkan dokumen ke PMS. Selanjutnya PMS akan memeriksa kelengkapan Daftar P2K08-UD dan Daftar P2K08-ID. Jika PMS menemukan isian yang belum lengkap atau meragukan, maka PMS wajib meminta PCS untuk melengkapi isian dan

jika perlu PCS melakukan kunjungan ulang (*revisit*) ke rumah tangga yang bersangkutan.

6. Setelah semua dokumen lengkap maka PMS harus menyerahkan dokumen tersebut kepada KSK.
7. Kemudian KSK akan menyerahkan dokumen ke BPS Kabupaten/Kota untuk dilakukan pengolahan dan penentuan rumah tangga sasaran dengan menggunakan program PMT.
8. Program PMT menghasilkan Daftar rumah tangga sasaran (P2K08-RTS) berdasarkan quota.

2. METODE KOMUNITAS

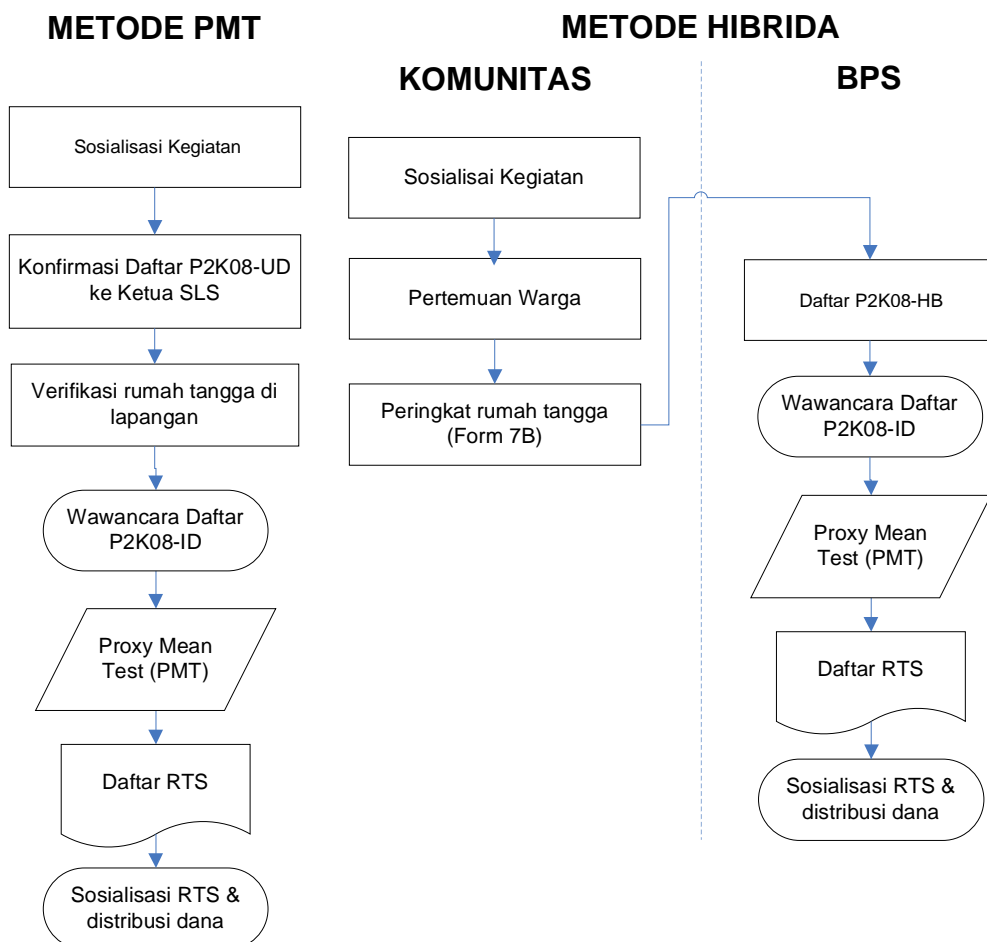
1. Fasilitator didampingi KSK menemui kepala desa dan ketua SLS untuk menjelaskan tujuan kegiatan P2K08 dan menyampaikan jadwal pertemuan warga.
2. Fasilitator memfasilitasi pertemuan warga untuk mengidentifikasi rumah tangga sasaran menurut indikator kesejahteraan sebagai dasar penentuan rumah tangga sasaran di wilayah SLS terpilih.
3. Pada pertemuan, warga akan diminta untuk memeringkat rumah tangga yang ada di SLS terpilih, mulai dari rumah tangga yang paling tidak mampu sampai rumah tangga yang paling mampu.
4. Berdasarkan quota, kemudian ditentukan daftar rumah tangga sasaran.

3. METODE HIBRIDA

1. Metode Hibrida merupakan kombinasi antar metode PMT dengan metode komunitas.
2. Fasilitator didampingi KSK menemui kepala desa dan ketua SLS untuk menjelaskan tujuan kegiatan P2K08 dan menyampaikan jadwal pertemuan warga.
3. Fasilitator memfasilitasi pertemuan warga untuk mengidentifikasi rumah tangga sasaran menurut indikator kesejahteraan sebagai dasar penentuan rumah tangga sasaran di wilayah SLS terpilih.
4. Pada pertemuan, warga akan diminta untuk memeringkat rumah tangga yang ada di SLS terpilih, mulai dari rumah tangga yang paling tidak mampu sampai rumah tangga yang paling mampu. Pertemuan warga ini akan menghasilkan Form 7B (Form Peringkat Rumah Tangga Final).
5. Fasilitator menyerahkan fotokopi Form 7B ke BPS Kabupaten/Kota.

6. Penanggung jawab pengolahan di BPS Kabupaten/Kota (Kasie IPDS) akan menginput nomor urut terakhir yang berisi nama kepala rumah tangga pada Form 7B ke dalam program pengolahan. Program akan menghasilkan angka target rumah tangga yang harus diwawancarai.
7. Berdasarkan target rumah tangga (dari butir 6), penanggung jawab pengolahan memberikan tanda berupa garis tebal di bawah nomor urut rumah tangga yang bersesuaian dengan angka target dan memberikan tanda lingkaran pada nomor urut rumah tangga, mulai dari rumah tangga dengan nomor urut 1 sampai dengan nomor urut angka target. Rumah tangga yang nomor urutnya bertanda lingkaran adalah rumah tangga terpilih untuk pencacahan dengan Daftar P2K08-ID.
8. Fotokopi Form 7B yang telah diberi tanda lingkaran diserahkan kepada KSK untuk diteruskan kepada PMS, selanjutnya PMS menyerahkan form tersebut kepada PCS.
9. PCS mewawancarai rumah tangga terpilih dengan Daftar P2K08-ID.
10. BPS melakukan pengolahan data dengan menggunakan program PMT.
11. Program PMT akan menghasilkan daftar rumah tangga sasaran (P2K08-RTS) berdasarkan *quota*.

Gambar 1. Diagram Alur Kegiatan P2K08 Menurut Metode



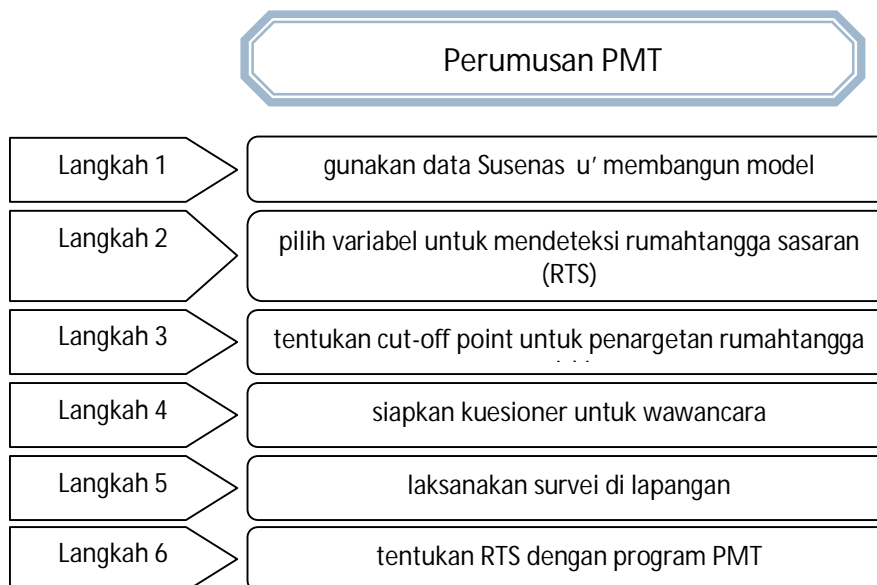
PROXY MEANS TEST (PMT)

PMT ini digunakan sebagai dasar pengklasifikasian suatu rumah tangga apakah layak menjadi rumah tangga sasaran (RTS) apa tidak. Penentuan RTS dengan PMT ini hanya digunakan untuk rumah tangga-rumah tangga di wilayah-wilayah Metode PMT dan di wilayah-wilayah Metode Hibrida (Hybrid).

1. KEGUNAAN PMT

- untuk memprediksi pengeluaran rumah tangga yang merupakan satu-satunya variabel yang sejauh ini digunakan untuk mendefinisikan kemiskinan absolut secara langsung, berdasarkan **variabel non-moneter**,
- untuk membangun mekanisme yang seragam dalam pengukuran statistik, seperti dalam menentukan RTS

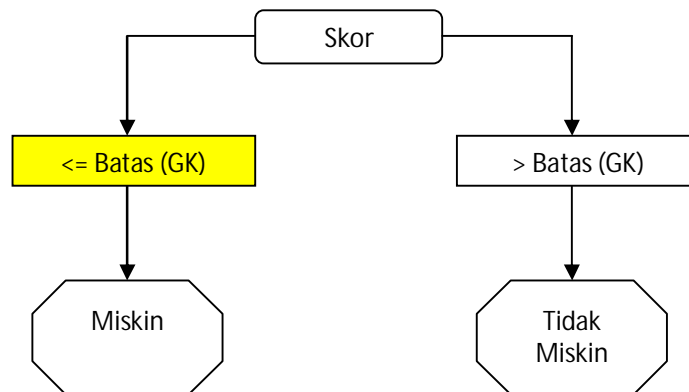
Gambar 2. Langkah-langkah perumusan PMT



2. PENGESTIMASIAN PENGELUARAN RUMAH TANGGA

- Menghitung perkalian dari variabel-variabel input (hasil wawancara di lapangan) dan koefisien-koefisien (Tabel 4 s/d Tabel 6) yang bersesuaian dan konstanta model, yaitu:
 $S_i = K_i \times V_i$
- Total Skor = **Konstanta** + $\sum S_i$, dan dengan meng-*antilog*-kan nilai total skor ini, maka akan didapatkan estimasi pengeluaran rumah tangga perkapita.

- Bandingkan hasil estimasi pengeluaran dengan ambang batas atau *cut-off point* yang telah ditentukan sebelumnya: misalnya GARIS KEMISKINAN
- Pohon keputusan:



- Akan tetapi dalam rangka P2K08 ini, rumahtangga sasaran ditentukan berdasarkan jumlah quota yang telah ditentukan di masing-masing SLS terpilih. Rumahtanga yang telah diperingkat dengan menggunakan PMT, kemudian diambil rumahtangga-rumahtangga dengan estimasi pengeluaran terendah sampai dengan sebanyak quota tersebut. Rumahtanga-rumahtangga inilah yang dikategorikan sebagai rumahtangga sasaran (RTS) P2K08.

Tabel 4. Koefisien PMT: Humbang Hasundutan – Purbalingga

Variabel	Humbang Hasundutan	Serdang Bedagai	Pematang Siantar	Purbaling- ga
Daerah (1=perkotaan; 0=perdesaan)	-0.11746	-0.18098		-0.11441
Luas Lantai Perkapita		0.00119	0.001275	
Jenis Lantai (1=bukan tanah; 0=lainnya)	-0.06819	0.073804	0.121382	0.11118
Jenis Dinding (1=Beton/Semen; 0=lainnya)	0.127618	-0.02802	0.095548	
Toilet (1=Sendiri; 0=lainnya)	0.052147	0.091202	0.19302	0.117949
Sumber Air Minum (1=Bersih; 0=lainnya)	0.024814	0.045244	0.093588	0.065157
Sumber Penerangan (1=PLN; 0=lainnya)	0.036342	0.145627	0.149882	0.120662
Jenis Atap (1=Beton; 0 Lainya)	0.047463	0.054085	0.288887	
Bahan Bakar untuk memasak (1=bukan kayu bakar; 0=lainnya)	0.138369	0.136234	0.246888	0.149168
Status Tempat Tinggal (1=Sendiri; 0=lainnya)	0.060046		0.042684	0.058093
Memiliki Kredit		0.198421		0.104463
Jumlah ART	-0.27605	-0.22954	-0.28717	-0.29812
Jumlah ART Kuadrat	0.016541	0.011561	0.015644	0.016958
Umur KRT	0.015167	0.014669	0.012747	0.016085
Umur KRT Kuadrat	-0.00014	-0.00014	-0.0001	-0.00014
Jenis Kelamin KRT (1=Laki-laki; 0=Perempuan)	0.133826	0.181265	0.150365	0.102701
KRT Menikah	0.177817			
KRT Laki-laki dan Menikah	-0.21053	-0.09933	-0.10497	
Lapangan Usaha KRT: Pertanian	-0.13277	-0.14328	-0.13948	

Variabel	Humbang Hasundutan	Serdang Bedagai	Pematang Siantar	Purbaling- ga
Lapangan Usaha KRT: Industri		-0.09869	-0.13004	0.077265
Lapangan Usaha KRT: Jasa-jasa		-0.09042	-0.0502	0.125372
KRT di Sektor Formal	0.13067	0.075106	0.086834	
KRT di Sektor Informal	0.079536		0.065453	0.032496
Pendidikan Tertinggi KRT: SD	0.053511			0.037791
Pendidikan Tertinggi KRT: SMP	0.089981	0.073463	0.11526	0.136293
Pendidikan Tertinggi KRT: SMA ke atas	0.089245	0.160197	0.137889	0.166412
Jumlah Anak (0-4 tahun)	-0.0497		-0.03049	
Jumlah Anak di SD	-0.01711			
Jumlah Anak di SMP		0.026147		0.050769
Jumlah Anak di SMA		0.08291	0.068649	0.149839
Pendidikan Tertinggi ART: SD	-0.06661	0.08684		0.117344
Pendidikan Tertinggi ART: SMP		0.093261	0.080495	0.153943
Pendidikan Tertinggi ART: SMA keatas	0.042375	0.163048	0.11831	0.336609
Rasio Ketergantungan		-0.04067	-0.02629	-0.02115
Ada SD	0.13282	-0.1877		
Ada SMP	-0.12603			-0.03552
Ada Puskesmas/Pustu	-0.0237	-0.06939	0.059644	0.024446
Ada Polindes	-0.04739		0.228873	
Ada Posyandu	-0.05202	-0.08927	0.177678	
Tersedia Dokter	-0.03754	-0.0677	0.042097	
Tersedia Bidan	0.076455	0.068531	-0.31658	
Jalan Aspal	0.054737	0.042727	-0.05725	0.106868
Ada Pasar Semi Permanen	0.065762		-0.12671	0.022869
Ada Fasilitas Kredit		0.032042	0.033766	-0.04256
Jarak ke Ibukota Kabupaten	0.00065	-0.00098		
Punya Kipas Angin	0.046388	0.046388	0.046388	
Punya Mesin Jahit	0.027248	0.027248	0.027248	
Punya AC	0.248443	0.248443	0.248443	0.493357
Punya Komputer				0
Punya Radio/Tape	0.031808	0.031808	0.031808	0
Punya TV	0.123314	0.123314	0.123314	0.17506
Punya DVD/VCD Player	0.041983	0.041983	0.041983	0.060677
Punya Antena Parabola				
Punya Kompor Gas	0.238489	0.238489	0.238489	0.312253
Punya Kulkas	0.045496	0.045496	0.045496	0.057084
Punya Sepeda	-0.03655	-0.03655	-0.03655	-0.0701
Punya Sepeda Motor	0.0502	0.0502	0.0502	0
Punya Mobil/Minibus/Truk	0.232409	0.232409	0.232409	0.267545
Punya HP	0.105752	0.105752	0.105752	0.110179
Punya Perhiasan	0.065385	0.065385	0.065385	0.035846
Punya Ayam				0.033412
Punya Kambing/Domba				
Punya Kerbau/Sapi				0.096042
Punya Kuda	0.113931	0.113931	0.113931	
Punya Lahan Pertanian	0.0593	0.0593	0.0593	
Punya Rice Cooker	0.072323	0.072323	0.072323	0.11687
Punya Mixer/Blender	0.030959	0.030959	0.030959	
Punya Telephone	0.166982	0.166982	0.166982	0.195889
Punya Pompa Air				

Variabel	Humbang Hasundutan	Serdang Bedagai	Pematang Siantar	Purbaling- ga
Punya Sampan	0.10263	0.10263	0.10263	
Punya Kapal Motor	0.178134	0.178134	0.178134	
Punya Alat Perontok Padi				
Punya Babi	0.093296	0.093296	0.093296	1.012504
Konstanta	12.73335	12.7473	12.28365	12.03404

Tabel 5. Koefisien PMT: Wonogiri - Semarang

Variabel	Wonogiri	Demak	Kendal	Semarang
Daerah (1=perkotaan; 0=perdesaan)	-0.10972	-0.11371		-0.18212
Luas Lantai Perkapita		0.001712	0.001412	0.003225
Jenis Lantai (1=bukan tanah; 0=lainnya)	0.125792	0.103959	0.168728	0.103589
Jenis Dinding (1=Beton/Semen; 0=lainnya)	0.052109	0.024416		0.065528
Toilet (1=Sendiri; 0=lainnya)	0.079951	0.068605	0.076546	0.118003
Sumber Air Minum (1=Bersih; 0=lainnya)	-0.01969	0.03663	0.124243	-0.07144
Sumber Penerangan (1=PLN; 0=lainnya)		0.131192		0.109269
Jenis Atap (1=Beton; 0 Lainya)	-0.22036	-0.14132	-0.11603	0.154335
Bahan Bakar untuk memasak (1=bukan kayu bakar; 0=lainnya)	0.173567	0.11568	0.132369	0.157215
Status Tempat Tinggal (1=Sendiri; 0=lainnya)	0.063716		0.087228	
Memiliki Kredit	0.170971	0.214267		0.134096
Jumlah ART	-0.3167	-0.25826	-0.37088	-0.23007
Jumlah ART Kuadrat	0.019269	0.014139	0.02433	0.0134
Umur KRT	0.170971	0.214267		0.134096
Umur KRT Kuadrat	0.019269	0.014139	0.02433	0.0134
Jenis Kelamin KRT (1=Laki-laki; 0=Perempuan)	0.007457	0.00782		0.007108
KRT Menikah	-8.3E-05	-9.1E-05	2.15E-05	-6E-05
KRT Laki-laki dan Menikah	0.109893	0.220193		0.100369
Lapangan Usaha KRT: Pertanian		-0.0966		
Lapangan Usaha KRT: Industri	-0.08047			
Lapangan Usaha KRT: Jasa-jasa	-0.06186	-0.02705	-0.12779	-0.06155
KRT di Sektor Formal			-0.17094	-0.04253
KRT di Sektor Informal	0.061742	0.081387	-0.07509	
Pendidikan Tertinggi KRT: SD	0.056709	0.035769	0.120925	0.120616
Pendidikan Tertinggi KRT: SMP				
Pendidikan Tertinggi KRT: SMA ke atas		-0.04747	0.108331	0.032567
Jumlah Anak (0-4 tahun)			0.20763	0.088601
Jumlah Anak di SD	0.113378	0.078741	0.292848	0.195615
Jumlah Anak di SMP			-0.06534	-0.04376
Jumlah Anak di SMA				
Pendidikan Tertinggi ART: SD	0.068267	0.057487	0.054244	
Pendidikan Tertinggi ART: SMP	0.13602	0.137576	0.152132	0.102084
Pendidikan Tertinggi ART: SMA keatas	0.045835	0.183333	0.138871	0.0985
Rasio Ketergantungan	0.131254	0.177087	0.205338	0.113703
Ada SD	0.270995	0.301973	0.390684	0.273721
Ada SMP		-0.06544		-0.05135
Ada Puskesmas/Pustu			-0.67503	
Ada Polindes		0.023709	0.042839	

Variabel	Wonogiri	Demak	Kendal	Semarang
Ada Posyandu	-0.02605			0.066821
Tersedia Dokter	-0.03314		-0.16852	
Tersedia Bidan		-0.07017		0.099758
Jalan Aspal			0.129215	0.100581
Ada Pasar Semi Permanen	-0.03082	0.096085	-0.05389	
Ada Fasilitas Kredit			-0.05914	0.060658
Jarak ke Ibukota Kabupaten		-0.02494		-0.10918
Punya Kipas Angin	0.029807		-0.05984	-0.06438
Punya Mesin Jahit	-0.00136	-0.00387		0.001422
Punya AC				
Punya Komputer				
Punya Radio/Tape	0.493357	0.493357	0.493357	0.493357
Punya TV	0	0	0	0
Punya DVD/VCD Player	0	0	0	0
Punya Antena Parabola	0.17506	0.17506	0.17506	0.17506
Punya Kompor Gas	0.060677	0.060677	0.060677	0.060677
Punya Kulkas				
Punya Sepeda	0.312253	0.312253	0.312253	0.312253
Punya Sepeda Motor	0.057084	0.057084	0.057084	0.057084
Punya Mobil/Minibus/Truk	-0.0701	-0.0701	-0.0701	-0.0701
Punya HP	0	0	0	0
Punya Perhiasan	0.267545	0.267545	0.267545	0.267545
Punya Ayam	0.110179	0.110179	0.110179	0.110179
Punya Kambing/Domba				
Punya Kerbau/Sapi	0.096042	0.096042	0.096042	0.096042
Punya Kuda				
Punya Lahan Pertanian				
Punya Rice Cooker	0.11687	0.11687	0.11687	0.11687
Punya Mixer/Blender				
Punya Telephone	0.195889	0.195889	0.195889	0.195889
Punya Pompa Air				
Punya Sampan				
Punya Kapal Motor				
Punya Alat Perontok Padi				
Punya Babi	1.012504	1.012504	1.012504	1.012504
Konstanta	13.02338	12.6402	13.55413	12.39912

Tabel 6. Koefisien PMT: Bone – Makassar

Variabel	Bone	Enrekang	Tana Toraja	Makassar
Daerah (1=perkotaan; 0=perdesaan)	-0.093378		0.064946	-0.096914
Luas Lantai Perkapita	0.000834	0.000864	0.001393	0.002614
Jenis Lantai (1=bukan tanah; 0=lainnya)		-0.090111		
Jenis Dinding (1=Beton/Semen; 0=lainnya)	0.117215	0.044094	0.124606	-0.056502
Toilet (1=Sendiri; 0=lainnya)	0.098189		0.120462	0.156206
Sumber Air Minum (1=Bersih; 0=lainnya)		0.105345		0.122647
Sumber Penerangan (1=PLN; 0=lainnya)	0.189574	0.102366	0.029556	
Jenis Atap (1=Beton; 0 Lainya)	0.165212	0.093328	0.135074	0.117188
Bahan Bakar untuk memasak (1=bukan kayu bakar; 0=lainnya)	0.17465	0.121041		0.141569
Status Tempat Tinggal (1=Sendiri; 0=lainnya)				0.064225

Variabel	Bone	Enrekang	Tana Toraja	Makassar
Memiliki Kredit		0.067816	0.260862	0.33263
Jumlah ART	-0.23872	-0.24013	-0.209364	-0.254623
Jumlah ART Kuadrat	0.013049	0.014558	0.012189	0.011552
Umur KRT	0.009494	0.007445	0.003676	0.00781
Umur KRT Kuadrat	-7.66E-05	-6.15E-05		-7.04E-05
Jenis Kelamin KRT (1=Laki-laki; 0=Perempuan)	0.072346	0.131923	0.088011	0.126006
KRT Menikah				0.108626
KRT Laki-laki dan Menikah		-0.052038	-0.070035	-0.199486
Lapangan Usaha KRT: Pertanian	-0.067491	-0.064089		-0.273279
Lapangan Usaha KRT: Industri		-0.159901	-0.102021	-0.321047
Lapangan Usaha KRT: Jasa-jasa			-0.045168	-0.246155
KRT di Sektor Formal	0.096293	0.119586	0.126247	0.138866
KRT di Sektor Informal	0.091545	0.080398	0.171869	0.070809
Pendidikan Tertinggi KRT: SD	0.049077	0.05341		0.049224
Pendidikan Tertinggi KRT: SMP	0.101655	0.036963	0.053954	0.158319
Pendidikan Tertinggi KRT: SMA ke atas	0.087765	0.047168	0.129195	0.198454
Jumlah Anak (0-4 tahun)	-0.018794	-0.046996		
Jumlah Anak di SD		-0.014465		0.033799
Jumlah Anak di SMP		-0.018345		0.057555
Jumlah Anak di SMA		0.033605	0.047484	0.084503
Pendidikan Tertinggi ART: SD	0.066814		0.059208	0.078746
Pendidikan Tertinggi ART: SMP	0.108074	0.067241	0.08575	0.109454
Pendidikan Tertinggi ART: SMA keatas	0.202746	0.13323	0.180872	0.281595
Rasio Ketergantungan	-0.035648	-0.014858	-0.031783	-0.120403
Ada SD			0.069639	
Ada SMP	0.027865			-0.036118
Ada Puskesmas/Pustu				
Ada Polindes	-0.043699	0.024627		-0.065294
Ada Posyandu	0.163016		-0.169004	
Tersedia Dokter	-0.039628			0.123889
Tersedia Bidan				
Jalan Aspal	-0.058674	0.04781	0.05266	-0.256192
Ada Pasar Semi Permanen	-0.112353		-0.145421	
Ada Fasilitas Kredit	-0.052428	-0.051404	-0.062881	
Jarak ke Ibukota Kabupaten		0.000881	-0.003824	0.006398
Punya Kipas Angin				
Punya Mesin Jahit				
Punya AC	0.314864	0.314864	0.314864	0.314864
Punya Komputer	0.207518	0.207518	0.207518	0.207518
Punya Radio/Tape	0.07518	0.07518	0.07518	0.07518
Punya TV	0.111266	0.111266	0.111266	0.111266
Punya DVD/VCD Player	0	0	0	0
Punya Antena Parabola				
Punya Kompor Gas	0.293126	0.293126	0.293126	0.293126
Punya Kulkas	0.064901	0.064901	0.064901	0.064901
Punya Sepeda	0	0	0	0
Punya Sepeda Motor	0.112338	0.112338	0.112338	0.112338
Punya Mobil/Minibus/Truk	0.220568	0.220568	0.220568	0.220568
Punya HP	0.097536	0.097536	0.097536	0.097536

Variabel	Bone	Enrekang	Tana Toraja	Makassar
Punya Perhiasan	0.260371			
Punya Ayam	0.061416	0.061416	0.061416	0.061416
Punya Kambing/Domba				
Punya Kerbau/Sapi	0	0	0	0
Punya Kuda				
Punya Lahan Pertanian				
Punya Rice Cooker	0	0	0	0
Punya Mixer/Blender				
Punya Telephone	0.116738	0.116738	0.116738	0.116738
Punya Pompa Air				
Punya Sampan				
Punya Kapal Motor				
Punya Alat Perontok Padi				
Punya Babi	0	0	0	0
Konstanta	12.52298	12.80836	12.86506	13.24346

PELAKSANAAN LAPANGAN

1. PERSIAPAN

Persiapan pelaksanaan lapangan, diawali dengan pelatihan calon petugas yang telah dimulai sejak awal bulan Desember 2008, antara lain dengan melakukan:

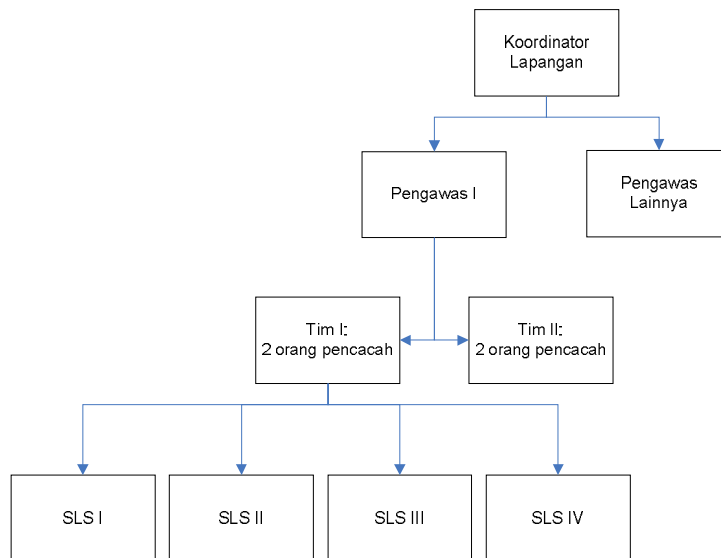
1. Perekrutan petugas melalui Pemerintah Daerah (Camat / Kepala Desa /Lurah).
2. Sosialisasi Penentuan Peringkat Kesejahteraan rumah tangga (P2K08).
3. Penyediaan sarana dan prasarana pelatihan petugas seperti penginapan, kelas dll.
4. Pemberitahuan jadwal pelatihan.

1.1 Organisasi Lapangan

Pelaksanaan pendataan P2K08 di lapangan dilakukan dengan cara tim yang terdiri dari 2 orang pencacah (PCS), 1 orang pengawas (PMS) dan 1 orang KSK di kecamatan.

Koordinator lapangan (KSK) merupakan petugas kunci P2K08 yang bertanggung jawab dalam memberitahukan dan menyiapkan wilayah tugas untuk kegiatan ini. Berikut adalah hierarki petugas lapangan P2K08.

Gambar 3. Hierarki Petugas Lapangan



1.2 Petugas Lapangan dan Koordinasi

Penugasan yang diberikan kepada petugas lapangan terdapat perbedaan, tergantung pada Metode (Metode PMT, Komunitas, Hibrida) yang diterapkan pada masing-masing SLS.

- Pencacah (PCS) adalah mitra statistik yang diutamakan berasal dari kelurahan terpilih P2K08. PCS bertugas melakukan updating dan mewawancarai rumah tangga dan menyerahkan hasilnya kepada Pengawas (PMS).
- Pengawas (PMS) bertugas mendistribusikan kuesioner kepada PCS serta mengawasi dan membantu memecahkan masalah selama pelaksanaan lapangan.
- Koordinator Statistik Kecamatan (KSK) bertanggung jawab terhadap pelaksanaan, baik dalam aspek teknis maupun non teknis.

Koordinasi dilakukan dengan camat dan kades/lurah di kecamatan dan desa-desa terpilih, sehingga pendataan P2K08 dapat berjalan dengan lancar.

1.3 ALOKASI DOKUMEN

Dokumen pencacahan berupa daftar P2K08-UD dan daftar P2K08-ID mencukupi dan didistribusikan kepada petugas untuk pendataan di lapangan. Jika terjadi kekurangan, koordinator lapangan memphoto copy dokumen kosong sebelum melakukan pendataan.

1.4 PELATIHAN PETUGAS

Pelatihan petugas P2K08 dilaksanakan untuk menyamakan pemahaman tentang konsep dan definisi. Pelatihan ini dilaksanakan antara tanggal 18 s/d 23 Desember 2009.

Tempat dan jadwal pelatihan di masing-masing kabupaten/kota terpilih dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 7. Pelaksanaan Pelatihan Petugas P2K08

Propinsi	Nama Kabupaten/Kota	Lokasi	Tanggal
Sumatera Utara	Humbang Hasundutan	Hotel Asima Jln. Siliwangi, Doloksanggul	18–19 Des 08
	Serdang Bedagai	Maliboe Hotel, Tebing Tinggi Deli	19–20 Des 08
	Pematang Siantar	Wisma Humanitas, Jln. Sangnawaluh No. 105	19–20 Des 08
Jawa Tengah	Purbalingga	Hotel Kencana, Jln. Pujowiyoto no. 44	20–21 Des 08
	Wonogiri	Hotel Puri Kamulyan, Jln. Wonogiri Wuryantoro km. 7	19–20 Des 08
	Demak	Hotel Citra Alam Jln. Bhayangkara Baru, Demak	21–22 Des 08
	Kendal	Hotel Pandanaran, Semarang	19–20 Des 08 21–22 Des 08
	Semarang	Hotel Grasia, Semarang	18–19 Des 08
Sulawesi Selatan	Bone	Wisma Biru, Watampone	19–20 Des 08
	Enrekang	Hotel Rasita, Jln. Arif Rahman Hakim no. 8	18–19 Des08
	Tana Toraja	Wisma Irama, Jln. U. Abdul Gani, Rantepao	22–23 Des 08
	Makasar	Hotel Delta Makassae	21–22 Des 08

1.5 SOSIALISASI

Sosialisasi P2K08 dilakukan oleh KSK di masing-masing desa yang terpilih sebagai sampel untuk metode PMT, sedangkan pada metode Komunitas dan metode Hibrid KSK hanya mendampingi fasilitator dari Mitra Samya.

2. PELAKSANAAN LAPANGAN

2.1 PENCACAHAN

Pencacahan pada setiap SLS dilakukan secara tim, dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Metode PMT dilakukan oleh petugas BPS
2. Metode Komunitas dilakukan oleh fasilitator dari Mitra Samya

3. Metode Hibrida dilakukan pemeringkatan kesejahteraan oleh fasilitator dari Mitra Samya dan selanjutnya diverifikasi oleh petugas BPS

2.2 PENGAWASAN

Pengawasan dilakukan oleh Koordinator Kabupaten pada masing-masing tim di wilayahnya untuk mengetahui pelaksanaan lapangan P2K08 sehingga mendapatkan hasil yang lebih baik dan akurat.

2.3 PELAKSANAAN LAPANGAN

Pelaksanaan lapangan dilakukan setelah pelatihan petugas selesai. Berikut adalah laporan pelaksanaan lapangan di beberapa kabupaten/kota terpilih studi:

2.3.1 KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

Pelatihan petugas P2K08 di Kabupaten Humbang Hasundutan dilaksanakan 1 gelombang yang diikuti peserta dari 2 kecamatan yang terdiri dari 11 orang dari Kecamatan Doloksanggul dan 9 orang dari Kecamatan Lintong Nihuta. Pelatihan petugas diikuti oleh 20 peserta yang terdiri dari 14 orang PCS, 4 orang PMS dan 2 orang KSK. Pelaksanaan pelatihan petugas dilaksanakan pada tanggal 18 – 19 Desember 2008 yang dilaksanakan di Hotel Asima Jl. Siliwangi, Doloksanggul. Pelaksanaan pelatihan petugas P2K08 di Kabupaten Humbang Hasundutan berjalan dengan baik dan lancar. Pelaksanaan pelatihan petugas ini dilaksanakan dengan metode diskusi, baik pada saat pelatihan maupun pada saat istirahat.

Pelaksanaan kegiatan P2K08 di Kabupaten Humbang Hasundutan dimulai tepat satu hari setelah pelatihan petugas selesai yaitu antara tgl 20 Desember 2008 s.d. 31 Januari 2009 yang dilaksanakan di 2 Kecamatan yaitu di Kecamatan Doloksanggul dan Kecamatan Lintong Nihuta. Kecamatan Doloksanggul terdiri dari 7 desa PMT, 8 hybrid dan 8 desa komunitas. Sedangkan Kecamatan Lintong Nihuta terdiri dari 4 desa PMT, 5 desa Hybrid dan 5 desa komunitas. Total keseluruhan desa yang terkena sampel di dua kecamatan tersebut berjumlah 37 desa.

Pelaksanaan pendataan P2K08 di lapangan dilakukan dengan cara tim yang terdiri dari 2 orang pencacah (PCS) dan 1 orang pengawas (PMS). P2K08 di BPS Kabupaten Humbang Hasundutan terdiri dari 7 tim, yaitu 4 tim di Kecamatan Doloksanggul dan 3 tim di Kecamatan Lintong Nihuta.

Pelaksanaannya, BPS hanya mengupdate dan mendata metode PMT dan metode hibrid, sedangkan metode komunitas dilaksanakan oleh Mitra Samya. Pada metode komunitas BPS dalam hal ini KSK menemani mitra samya ketika melaksanakan sosialisasi untuk metode hibrid maupun komunitas dan bersama fasilitator dari Mitra Samya mendistribusikan dana ke rumah tangga sasaran.

2.3.2 KOTA PEMATANG SIANTAR

2.3.2.1 Metode PMT

Banyaknya sampel wilayah SLS (RT) yang dicakup dalam metode PMT adalah sebanyak 14 SLS. Dari 14 SLS tersebut, banyaknya rumah tangga yang tercantum pada Daftar P2K08-UD adalah 987 rumah tangga. Kemudian, jumlah rumah tangga yang diperoleh dari hasil kegiatan updating, verifikasi dan pencacahan keseluruhan rumah tangga dengan Daftar P2K08-ID adalah sebanyak 937 rumah tangga. Selisihnya yaitu sebanyak 50 rumah tangga dapat dirinci: pindah 27 rumah tangga, berpergian 9 rumah tangga, double 9 rumah tangga, gabung dengan ART lain 4 rumah tangga dan meninggal tanpa ART lain hanya ada 1 rumah tangga.

2.3.2.2 Metode Hibrida

Banyaknya sampel wilayah SLS (RT) yang dicakup dalam metode Hibrida, sama banyaknya dengan sampel wilayah pada Metode PMT yaitu 14 SLS. Dari 14 SLS tersebut, banyaknya rumah tangga yang tercantum pada Daftar P2K08-HB adalah 297 rumah tangga. Kemudian, dilakukan pencacahan keseluruhan rumah tangga tersebut dengan Daftar P2K08-ID.

Secara keseluruhan di Pematangsiantar jumlah rumahtangga di Daftar P2K08-UD ada sebanyak 1.334 rumahtangga dan di daftar P2K08-ID sebanyak 1.284 rumahtangga.

2.3.2.3 Quota RTS

Dari hasil pendataan baik metode PMT maupun Hibrida, setelah melalui program PMT dihasilkan darta rumah tangga sasaran (P2K08-RTS) untuk Pematangsiantar sebanyak 424 rumahtangga sasaran.

2.3.3 KABUPATEN PURBALINGGA

Penentuan Peringkat Kesejahteraan Rumahtangga Tahun 2008 (P2K08) Kabupaten Purbalingga dilaksanakan di 63 Desa/Kelurahan yang terdiri dari 20 Desa/Kelurahan dengan metode PMT, 21 Desa/Kelurahan dengan metode Hibryd dan 22 Desa/Kelurahan dengan

metode Komunitas. Dengan demikian yang dilakukan Pendataan P2K oleh BPS Kabupaten Purbalingga sebanyak 41 Desa/Kelurahan dengan melibatkan 41 Petugas yang terdiri dari 8 Koordinator Statistik Kecamatan (KSK), 9 Pengawas dan 24 PCL yang terbagi dalam 12 Tim yang 1 Tim terdiri dari 2 petugas PCL.

Sebelum melakukan pendataan BPS Kabupaten Purbalingga memberitahukan Kepada Camat dan Kepala Desa/Kelurahan lewat surat, tentang rencana pelaksanaan lapangan pendataan P2K. Pendataan dapat dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan.

2.3.4 KABUPATEN WONOGIRI

Pelaksanaan pendataan dilakukan secara tim dengan 2 orang pencacah dan satu orang macam. Setiap rumah tangga yang didata akan dimasuki oleh 2 orang pendata bersama-sama. Sebelum responden didatangi petugas tim akan mendatangi Ketua RT setempat terlebih dahulu untuk menyampaikan maksud dan tujuan pendataan serta mohon bantuan untuk memberitahu warganya mengenai kegiatan P2K08 ini. Dalam kegiatan P2K08 Ketua RT memperoleh honor sebesar Rp.100.000,-.

Dalam pendataan pencacah di dampingi Kortim di setiap SLS yang menjadi wilayah tugasnya meskipun tidak untuk setiap rumah tangga yang didata didampingi. Karena Kortim membawahi lebih dari satu tim pendata.

Secara umum masyarakat Kab. Wonogiri bekerja di sektor pertanian namun tidak sedikit yang mencari penghidupan di luar kabupaten (*merantau/mboro:jawa*).

Dari hasil running program PMT untuk seluruh SLS metode PMT diperoleh jumlah RTS paling sedikit di Desa Singodutan Selogiri yakni sebanyak 3 RTS (Rumah Tangga Sasaran) dan yang paling tinggi di desa Sambiroto, Pracimantoro sebanyak 26 RTS.

2.3.4.1 Pelaksanaan Pendataan di Kec. Pracimantoro

Kec. Pracimantoro berada di sebelah selatan kota Wonogiri sekitar 35 km, yang terdiri dari 18 desa/kel. Dengan kondisi wilayah sebagian besar pegunungan kapur dan tidak subur. Di wilayah ini setiap tahun terjadi bencana kekeringan. Banyak warga masyarakat yang tidak memiliki sumur. Sumber mata airnya adalah air hujan, dan untuk itu rumah tangga yang tidak memiliki sumber air cukup akan membuat bak Penampungan Air Hujan (PAH). Dimana air hujan yang tercurah ke atap disalurkan dalam satu jalur (talang) yang mengarah ke PAH tersebut tentu saja tingkat higienitas air dalam PAH menjadi pertanyaan. Namun persediaan air di PAH juga akan habis, di musim kemarau untuk mencukupi kebutuhan air mereka akan

membeli dari satu tangki (5.000 liter) atau lebih dimana harga per tangkinya antara Rp. 90.000-120.000,-.

Jumlah rumahtangga terbanyak (47 rumahtangga) dari daftar P2K08 di Kec. Pracimantoro di wilker 243 Desa Wonodadi dan yang paling sedikit di Desa Gedong wilker 235 sebanyak 22 rumahtangga serta paling kecil untuk seluruh SLS PMT.

2.3.4.2 Pelaksanaan Pendataan di Kec. Selogiri

Kecamatan Selogiri berada di sebelah utara kota Wonogiri yang berbatasan dengan Kab. Sukoharjo. Terdiri dari 11 desa/kel. Dengan kondisi wilayah sebagian pegunungan. Menurut sejarahnya di Selogiri lah cikal bakal berdirinya Kab. Wonogiri, karena dimulainya perjuangan Pangeran Samber Nyowo (Raden Mas Said atau Mankunegara I) melawan Belanda. Di beberapa tempat masih terdapat beberapa situs peninggalan sejarah dan masih dikunjungi oleh masyarakat. Pada umumnya masyarakat Selogiri bekerja di sektor pertanian.

Jumlah rumahtangga terbanyak dari daftar P2K08 di Kec. Selogiri di wilker 250 Desa Pule sebanyak 59 rumahtangga (terbesar untuk SLS metode PMT) dan yang paling sedikit di Desa Pare wilker 246 sebanyak 35 rumahtangga.

2.3.4.3 Pelaksanaan Pendataan di Kec. Jatipurno

Kec. Jatipurno terletak di 32 km sebelah timur kota Wonogiri, terdiri dari 11 desa/kel. wilayahnya sebagian besar pegunungan karena merupakan bagian dari lereng Gunung Lawu sisi selatan.

Mirip dengan wilayah Wonogiri lainnya di Jatipurno sebagian besar masyarakatnya bekerja di sektor pertanian dengan kondisi pengairan yang cukup dan wilayah udara yang sejuk. Namun demikian banyak pula anggota masyarakat yang *mboro*.

Jumlah rumahtangga terbanyak (50 rumahtangga) dari daftar P2K08 di Kec. Jatipurno di wilker 257 Desa Jatipurno dan yang paling sedikit di Desa Slogoretno wilker 260 sebanyak 30 rumahtangga.

2.3.4.4 Metoda Hibrida

Hasil *print-out* P2K08-HB untuk masing-masing SLS berbeda-beda sesuai kuotanya, ada SLS yang seluruh rumah tangganya masuk dalam daftar HB dan dicacah dengan P2K08-ID. Jumlah rumahtangga hibrida paling sedikit di wilker 254 Desa Sendang Ijo sebanyak 6 rumahtangga sedangkan yang paling besar ada di Desa Trukan wilker 232 sebanyak 63 rumahtangga.

Dari hasil running program PMT untuk seluruh SLS dengan metoda hibrida RTS paling sedikit di Desa Sendangijo, Selogiri sebanyak 3 RTS dan yang paling banyak di Desa Trukan, Pracimantoro sebesar 45 RTS.

2.3.5 KABUPATEN BONE

- Secara umum pelaksanaan kegiatan P2K di Kabupaten Bone tidak ada kendala yang berarti
- Petugas P2K Kabupaten Bone adalah mitra BPS yang pernah mendata untuk PPLS'08 sehingga permasalahan di lapangan sudah dapat diantisipasi terlebih dahulu dalam pelatihan
- Pelaksanaan lapangan berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan
- Kepala Desa dan Ketua SLS cukup kooperatif
- Jumlah total rumah tangga yang didata adalah 1994, sementara jumlah rumah tangga hasil pengolahan adalah 1990. Selisih 4 rumah tangga terjadi karena keterlambatan perubahan alokasi quota dari pusat.

2.4 PERMASALAHAN, KESULITAN HAMBATAN, KENDALA, SOLUSI, DAN SARAN

Setiap kabupaten/kota mengalami permasalahan-permasalahan di lapangan yang pada akhirnya dapat diatasi sehingga kegiatan P2K08 dapat berjalan. Ada permasalahan yang tidak hanya ditemui di satu kabupaten/kota tapi juga ditemui di kabupaten/kota lainnya. Namun begitu, setiap kabupaten/kota juga menghadapi permasalahan unik yang ditemui hanya di kabupaten/kota tersebut. Untuk melihat gambaran permasalahan spesifik yang ada di kabupaten/kota wilayah studi, berikut disampaikan permasalahan yang dihadapi:

2.4.1 KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

Pelaksanaan Penentuan Peringkat Kesejahteraan 2008 (P2K08) di Kabupaten Humbang Hasundutan terlaksana dengan baik, meskipun terdapat beberapa kesulitan-kesulitan di lapangan namun dapat teratasi.

2.4.1.1 Kesulitan

Selama dalam melaksanakan tugas di lapangan banyak suka duka yang dialami oleh petugas lapangan, antara lain:

- Nama kepala rumah tangga maupun pasangan kepala rumah tangga yang tercantun daftar P2K08-UD tidak nama sebenarnya.
- Metode Hibrida terlambat pendataannya karena pihak Mitra Samya terlambat menyerahkan Form 7B ke BPS Kabupaten.
- Libur Natal dan Tahun Baru mempersulit pencacah untuk mendata karena rumah yang dikunjungi kosong/tidak ada orang.

2.4.1.2 Solusi Permasalahan

- Menanyakan nama kepala rumah tangga ke kepala desa dan masyarakat serta memperbaiki nama KRT dan pasangannya.
- Memperbaiki peta sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
- Menghubungi pihak Mitra Samya agar Form 7B yang telah selesai agar segera diserahkan ke BPS Kabupaten.
- Menyampaikan kepada pencacah agar menyesuaikan dengan konsep BPS bahwa kepala rumah tangga yang pulang 6 bulan sekali didata di rumah tangga tempat dia pulang.
- Mengunjungi kembali rumah tangga tersebut dan menanyakan kepada masyarakat setempat kapan rumah tangga tersebut kembali.

2.4.1.3 Saran

Adapun saran-saran yang disampaikan adalah sebagai berikut :

- Jadwal pelaksanaan lapangan tidak berdekatan dengan perayaan keagamaan karena sulit untuk menemui responden.
- Pemahaman konsep yang sama antara BPS dengan Mitra Samya terutama konsep rumah tangga.
- Petugas *baseline survey* disarankan penduduk yang tinggal di daerah tersebut untuk menghindari penulisan nama KRT maupun pasangannya yang salah.
- Sebelum BPS turun ke lapangan hendaknya pihak Mitra Samya harus lebih dulu turun ke lapangan sehingga BPS tidak terlalu lama menunggu hasil kerja dari Mitra Samya.
- Nama kepala rumahtangga maupun pasangannya disarankan pada kuesioner ditambah nama panggilan agar mudah menemukan rumahtangga tersebut dilapangan baik untuk metode hybrid maupun PMT.
- Program pengolahan sudah siap ketika dokumen selesai di lapangan dan tidak banyak perbaikan lagi.

- Honor pencacah (PCS) mohon dipertimbangkan untuk ditambah.

2.4.2 KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

2.4.2.1 Permasalahan

- Dalam pengisian dokumen P2K08, masih ada petugas yang mengisi dokumen tidak sesuai dengan pedoman dan petunjuk yang diberikan.
- Ada beberapa wilker yang jumlah rutanya tidak sesuai dengan kondisi lapangan. Hal ini menyebabkan perbedaan yang mencolok antara petugas *baseline survey* dengan petugas P2K08.
- Sulitnya menemui Kepala Desa/ Kadus pada saat sosialisasi bersama petugas Mitra Samya ke desa, sehingga menimbulkan salah persepsi antara kades/ kadus dengan petugas sosialisasi tersebut.
- Pada pelaksanaan Metode Hybrid, petugas BPS hanya menunggu selesainya petugas Mitra Samya sehingga waktu yang ada tidak dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya.
- Pada saat pembagian dana, beberapa KSK tidak dapat menemani petugas dari Mitra Samya karena tugas-tugas rutin BPS yang juga tidak dapat ditinggalkan.
- Program pengolahan yang sering direvisi.
- Biaya transport petugas yang disamaratakan antara wilker padahal ada beberapa wilker yang membutuhkan biaya yang lebih besar dari dana yang ada.
- Pengiriman dokumen hasil pendataan lapangan yang membutuhkan biaya yang tidak sedikit.

2.4.2.2 Solusi

- Dokumen dikembalikan serta dilakukan konfirmasi ke petugas tentang kesalahan pengisian dokumen tersebut.
- Setelah dilakukan *cross-check* lapangan beserta tim dari BPS Pusat diambil kesepakatan untuk mengikuti kondisi real lapangan.
- Klarifikasi ke kades/ kadus serta memberi penjelasan serta informasi yang lengkap.
- Koordinasi dengan petugas Mitra Samya agar tidak menunggu seluruh wilker selesai dikerjakan, sebaiknya dengan cara dicicil.
- Konfirmasi ke BPS Pusat dan diputuskan bahwa untuk mencari waktu yang tepat untuk melakukan pembayaran dana tersebut, jika tidak bisa juga maka KSK harus menunjuk penggantinya untuk meneruskan tugas bersama petugas Mitra Samya.

- Selalu koordinasi dan konfirmasi ke BPS Pusat sehingga tidak menimbulkan kesalahan dan keterlambatan pengolahan.
- Sesuai dengan anggaran yang tersedia serta konfirmasi ke BPS Pusat.
- Kebijaksanaan dari BPS Pusat untuk mengalokasikan biaya tersebut, sementara ini dialokasikan dari dana operasional.

2.4.3 KOTA PEMATANG SIANTAR

2.4.3.1 Permasalahan

- Di kelurahan Bane (Wilker 145) metode Hybrid, Ketua SLS (Ketua RT) dengan berbagai kesibukan pekerjaan, oleh pihak Mitra Samya tidak langsung segera diberitahukan/dilaporkan (masalah ini sudah berjalan kurang lebih satu minggu) baik kepada Koordinator Propinsi Mitra Samya maupun pihak BPS. Apakah untuk posisi Ketua SLS (Ketua RT) bisa digantikan oleh pihak aparat kelurahan untuk kelancaran kegiatan ini. Dan pada akhirnya di wilker ini untuk ketua SLS di gantikan/diwakilkan dari pihak kelurahan atas persetujuan/konfirmasi dari pihak Word Bank.
- Di kelurahan Proklamasi (Wilker 136) metode PMT, kesulitan dalam menemukan rumahtangga warga keturunan Tionghoa, dimana nama-nama yang ada di daftar P2K08-UD itu banyak yang tidak berurutan letak bangunan rumahnya juga terdapat sebagian nama-nama di luar SLS masuk di SLS ini dalam wilker tersebut.
- Kegiatan P2K08 dilaksanakan bersamaan dengan Hari Raya Natal dan Tahun Baru dimana sebagian besar masyarakat di Kota Pematangsiantar adalah beragama Nasrani yang pada saat awal kegiatan/pendataan berlangsung banyak warga/masyarakat yang merayakan hari raya tersebut, dan secara otomatis kegiatan updating/pendataan oleh BPS maupun kegiatan awal dari fasilitator Mitra Samya untuk penyampaian jadwal pertemuan warga menjadi *tertunda* waktunya karena harus menunggu warga/masyarakat selesai merayakan hari raya tersebut.
- Pada tahap pendistribusian dana ke RTS, pihak BPS (KSK) mendampingi pihak Mitra Samya dalam penyampaian dana 30.000 ke RTS. Mengingat adanya kegiatan-kegiatan BPS (di luar kegiatan P2K08) yang harus dikerjakan oleh KSK yang secara bersamaan waktunya sama dengan waktu kegiatan P2K08 (bulan Februari kegiatan BPS yaitu pencacahan Sakernas dengan tim), hal ini agak sedikit terganggu dimana di satu sisi KSK harus melaksanakan kegiatan BPS dan di sisi lain KSK harus mendampingi Fasilitator Mitra Samya dalam pendistribusian dana ke RTS. Masalahnya apakah di kegiatan P2K08 tidak bisa digantikan/diwakilkan oleh pengawas lapangan (PML).

2.4.3.2 Saran

- Pada Metode *Hibrida* maupun *komunitas*, dalam mengidentifikasi rumahtangga dengan berbagai pertimbangan karakteristik tingkat kesejahteraan (diskusi warga) yang dilakukan oleh Tokoh Masyarakat (terdiri dari 5 orang tokoh) sebenarnya kurang sesuai diterapkan/digunakan hanya dengan 5 orang tokoh apabila jumlah rumahtangga dalam 1 (satu) SLS muatannya lebih dari 50 rumahtangga karena kalau hanya dengan 5 orang dikhawatirkan tidak maksimal dalam pengidentifikasian rumahtangga miskin, seperti terjadi di Kelurahan Bah Kapul (wilker 160) masih ada rumahtangga dengan tingkat kesejahteraan lebih rendah justru tidak masuk dalam daftar Form 7B yang dilakukan oleh Fasilitator Mitra Samya. Setelah dikonfirmasi dengan Ketua SLS ternyata ada kelalaian (lupa) dalam pemeringkatan rumahtangga.

Saran: Diskusi yang dilakukan oleh Tokoh Masyarakat sebaiknya ditambah jumlah tokohnya atau ditiadakan. Justru *lebih sesuai*, diskusi yang dilakukan oleh *seluruh masyarakat*.

- Pada Metode *Hibrida*, dalam diskusi/rembug warga yang dilakukan fasilitator dengan tokoh masyarakat maupun seluruh masyarakat *harus benar-benar diverifikasi/diupdate* rumahtangga-rumahtangga di satu SLS, *misal:* ada KRT/ART yang sebenarnya gabung dengan ART lain, tetapi karena tidak maksimal dalam memverifikasi, pada saat pendataan dengan daftar P2K08-ID sebenarnya KRT/ART tersebut gabung dengan art lain, bukan rumah tangga sendiri. Begitu juga KRT yang sudah meninggal lama (ada art nya) juga masih terdaftar dalam pemeringkatan rumahtangga.

Saran: Karena di daftar P2K08-HB untuk kolom (5) Hasil Kunjungan tidak tersedia kode yang menyatakan gabung dengan art lain, *sebaiknya* sewaktu di Form 7B nya harus benar-benar diverifikasi/update. *Atau* bagaimana jika di Daftar P2K08-HB untuk kol (5) ditambahkan kode gabung dengan art lain.

- Dalam pendaftaran rumah tangga (Listing rumah tangga) yang dilakukan oleh *Suvey Matter* pada saat *Baseline Survey* seharusnya sama seperti halnya yang dilakukan oleh BPS pada kegiatan-kegiatan BPS, yaitu melisting/mendaftar rumahtangga-rumahtangga secara *door-to-door*. Ini dilakukan karena akan memudahkan nantinya oleh petugas-petugas lapangan dan biasanya listing itu berurutan untuk urutan bangunan rumahtangga, kalau di P2K08 tersebut nama-nama yang ada di daftar P2K08-UD banyak yang tidak berurut (untuk wilayah/daerah yang sebagian besar

warga keturunan/tionghoa ini akan menyulitkan petugas dalam menemukan rumah tangga tersebut) dan kondisinya ada yang tidak *up-to-date* lagi, seperti art yang meninggal beberapa tahun yang lalu masih terdaftar, juga yang sudah pindah lama masih terdaftar.

Saran: untuk kegiatan P2K08 yang akan datang sebaiknya dilakukan Listing Rumahtangga jadi tidak hanya mendapatkan nama-nama rumahtangga dari Ketua SLS atau informan yang lebih tinggi.

- Untuk pendataan P2K yang akan datang, pada metode *Hibrida*, kalau bisa ditegaskan dari awal untuk kegiatan sosialisasi dengan ketua SLS (dalam hal ini ketua RT) kalau dari awal ketua SLS merasa keberatan atau tidak ada waktu untuk kegiatan ini bisa digantikan/diwakilkan oleh aparat desa/kelurahan (perkecualian).
- Dalam tahapan kegiatan pendistribusian dana ke RTS (KSK sebagai pendamping Fasilitator), apabila Koordinator Statistik Kecamatan (KSK) tidak dapat mendampingi dengan alasan pekerjaan rutin BPS atau alasan lain yang sifatnya mendesak, sebaiknya tugas dari KSK sebagai pendamping bisa digantikan/diwakilkan oleh pengawas (PML) misalnya.
- Untuk kegiatan P2K mendatang sebaiknya dijadwalkan/disesuaikan dengan kondisi masyarakat (seperti di Pematangsiantar yang mayoritas beragama Nasrani yang sebagian besar pada merayakan hari raya natal/tahun baru atau masyarakat muslim yang sedang merayakan hari lebaran dll.) harus dihindari waktu-waktu pada saat masyarakat sulit untuk didata.

2.4.3.3 Saran Administratif

- Mengingat kegiatan P2K08 sudah berlangsung mulai bulan Desember 2008 sampai dengan Februari 2009 (tiga bulan kegiatan yaitu mulai dari kegiatan sosialisasi sampai dengan pendistribusian dana RTS) di anggaran terhitung 2 (dua) bulan, baik di anggaran pokja, KorKab/Kota, Korlap ***kalau bisa/seharusnya*** di anggaran terhitung 3 (tiga) bulan karena memang kegiatan berjalan selama 3 (tiga) bulan.
- Biaya Operasional BPS Kab/Kota terhitung masih terlalu kecil, belum lagi untuk biaya-biaya pengiriman dokumen hasil pencacahan maupun SPJ-SPJ sisanya yang belum terkirim. ***Kalau bisa*** mohon dipertimbangkan untuk hal ini.
- ***Kalau bisa*** perlu adanya transpot tambahan untuk desa/kelurahan yang agak jauh dibandingkan desa/kelurahan terdekat, karena untuk desa/kelurahan yang jauh ini tidak mungkin selesai dalam waktu cepat, perlu harus ada kunjungan berikutnya, jadi

ini mungkin bisa diperhitungkan. Juga untuk desa/kelurahan yang sulit (dalam artian sulit akses untuk ke lokasi maupun wilayah warga keturunan/tionghoa).

- Untuk editing sebaiknya tidak digabung/disatukan dengan entry dan validasi, *jadi kalau bisa* dipisah, karena editing ini di kerjakan di *Subject Matter* (Seksi Sosial) untuk Pematangsiantar.
- Mohon dipertimbangkan Pokja untuk Bendahara.

2.4.4 KABUPATEN PURBALINGGA

2.4.4.1 Kesulitan

- Responden saat ini masih sulit memberikan jawaban yang jujur, karena beranggapan pendataan P2K akan berakibat pada pemberian bantuan sehingga responden cenderung memiskinkan diri.
- Konsep yang dipakai dalam P2K adalah rumahtangga yang sering berbenturan dengan masyarakat, karena mereka sudah terbiasa dengan keluarga yang identik dengan Kartu Keluarga.

2.4.4.2 Kelemahan

Kelemahan Metode PMT adalah:

- Pertanyaan – pertanyaan belum sepenuhnya mengarah kepada rumahtangga miskin, artinya apapun jawaban responden belum tentu miskin.

Contoh:

1. Daftar P2K08-ID Blok IV Rincian 6: Fasilitas buang air besar dengan jawaban :

1. Bersama/umum/lainnya
2. Sendiri

Dari pertanyaan itu untuk responden yang menjawab 1 atau 2 tidak bisa disimpulkan mana yang lebih miskin. Karena di masyarakat kepemilikan fasilitas buang air besar ada yang memiliki sendiri dan kecenderungan sangat sederhana, sedang yang bersama rumahtangga lain fasilitasnya lebih baik.

2. Daftar P2K08-ID Blok V Rincian 2: Kepemilikan kursi dan lain-lain, untuk rumahtangga yang mempunyai kursi belum disebutkan kondisinya, bentuknya atau mengenai harganya, sehingga yang mempunyai kursi mewah dan yang mempunyai kursi reot (jelek) mempunyai kode yang sama.

Kelemahan Metode Hybrid adalah:

- Bahwa konsep yang digunakan antara BPS dan pendapat masyarakat berbeda, contoh :

- a. Kita memakai rumahtangga masyarakat tahunya adalah Kartu Keluarga (KK).
- b. Konsep penduduk BPS mengacu 6 bulan sedangkan anggapan masyarakat selama penduduk mempunyai KTP tetap dianggap penduduk.

Sehingga dalam pelaksanaan P2K ada rumahtangga yang tidak dapat ditemui karena memang dia sudah pindah keluar kota.

- Penilaian peringkat oleh masyarakat dan tokoh masih lebih tertuju pada Kepala rumahtangga (seperti janda) dan dalam P2K08-ID ditanyakan untuk semua anggota rumahtangga.
- Dalam penentuan peringkat kesejahteraan oleh masyarakat, konsep yang dipakai BPS belum sepenuhnya dipahami oleh mereka.

2.4.4.3 Saran dan Perbaikan

- Untuk P2K08-ID agar pertanyaan dan jawaban terfokus pada kemiskinan.

Contoh :

Daftar P2K08-ID Blok IV Rincian 6: Fasilitas buang air besar sebaiknya nilainya adalah :

- a. Sendiri dan kondisi bagus
- b. Bersama/umum kondisi bagus
- c. Sendiri kondisi jelek/tidak layak
- d. Tidak punya

Daftar P2K08-ID Blok V.A : Kursi dan lain-lain, sebaiknya pilihan jawaban :

- a. Punya, harga lebih dari 1 juta
- b. Punya, harga 100.000,- s/d 1 juta
- c. Punya, tidak ada nilainya
- d. Tidak punya

- Metode yang terbaik tetap PMT tetapi dengan pertanyaan yang sudah spesifik kemiskinan bukan yang bersifat umum.

2.4.5 KABUPATEN WONOGIRI

Dalam pelaksanaan kegiatan P2K08 di Kab. Wonogiri tidak banyak ditemui kendala karena sosialisasi yang dilakukan oleh KSK berjalan efektif baik untuk desa/kel. yang dilakukan dengan metode PMT, komunitas maupun hibrida. Perangkat desa dari Kepala desa/Lurah, kepala dusun sampai dengan Ketua RT mendukung kegiatan ini dan

berpartisipasi aktif. Untuk ikut mensosialisasikan kegiatan maupun meminta masyarakat untuk membantu kelancaran pengumpulan data oleh petugas BPS, maupun untuk ikut serta dalam pertemuan warga saat diadakan pertemuan dalam pelaksanaan metode komunitas. Atau bahkan mereka menyediakan fasilitas akomodasi bagi petugas lapangan.

Secara umum informasi mengenai luas lahan (dalam m^2) tidak dapat diperoleh dengan mudah karena responden sendiri tidak tahu berapa luas lahan yang dikuasainya, yang diketahui oleh responden hanyalah luas lahan dengan satuan lokal seperti *sak bahu*, *sak kopyokan* dst. Dimana konversi ke satuan standard berbeda-beda untuk masing-masing desa atau kecamatan, ada yang *sak bahu* sekitar 2.500-3.000 m^2 ada yang lebih luas antara 3.000-4.000 m^2 . pendekatan dengan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan juga dilakukan tetapi hal ini memadai untuk lahan yang masih dimiliki oleh seseorang, tetapi muncul kesulitan kembali begitu lahan sudah dibagi-bagi (diwariskan) namun belum terpisah PBB-nya.

2.4.5.1 Permasalahan Pendataan di Kec. Pracimantoro

Ditemukan rumah tangga yang sudah pindah tapi masih tercatat di P2K08-UD dan sebenarnya bukan sebagai rumah tangga di SLS tersebut karena mereka adalah pekerja kontruksi yang tinggal sementara di SLS tersebut.

Beberapa rumahtangga ART tidak bisa diwawancarai karena sakit dan di rawat di rumah sakit. Ada pula responden yang stress/depresi sehingga kesulitan dalam berkomunikasi, untuk itu kita butuh informan lain seperti saudara atau ketua SLS setempat. Pada saat pelaksanaan lapangan juga saat panen sehingga rumah yang ditemui kosong dan harus ditunggu sampai dengan saat mereka pulang.

2.4.5.2 Permasalahan Pendataan di Kec. Selogiri

Sebagian masyarakat di Kec. Selogiri mempunyai mata pencaharian di luar kota (perantau/jawa : *mboro*). Mereka yang merantau tidak hanya kepala rumah tangga saja, kadang bersama isteri atau anak. Di perantauan mereka umumnya berdagang, biasanya yang laki-laki berjualan bakso dan perempuan dagang jamu (*gendong*). Mereka yang *mboro* beberapa bulan sekali pulang untuk urusan keluarga atau gotong royong. Oleh karena itu petugas agak kesulitan menemui responden yang semestinya memberi jawaban, sering-sering yang ada di rumah adalah anak-anak dan untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari dititipkan ke saudara yang lain bisa kakek-nenek, atau famili lain. Dengan demikian informasi yang diperoleh tidak bisa optimal.

Dalam beberapa temuan di lapangan dalam pendataan adalah ditemukannya rumah tangga yang dobel dalam daftar P2K08-UD. Dimana kepala rumah tangga yang tercatat adalah suami dan tercatat lagi dengan nama kepala rumahtangga isteri. Atau benar-benar tercatat 2 kali.

Di Selogiri ditemukan bahwa warga penerima BLT tidak ada kartu BLT-nya tetapi pada waktu pencairan dana yang terakhir kartunya tidak dikembalikan oleh petugas PT.Pos. sehingga pengisian nomor kartu BLT terisi *tidak tahu*. Di lapangan sempat ditemukan salah satu rumahtangga yang tidak bisa dimintai keterangan karena sakit atau hal lainnya.

2.4.5.3 Permasalahan Pendataan di Kec. Jatipurno

Kesulitan lapangan adalah responden tidak bisa ditemui karena sedang bepergian atau memang *mboro*.

2.4.5.4 Permasalahan Metoda Hibrida

Di Selogiri ada satu rumah tangga yang sebenarnya sudah tidak bertempat tinggal di SLS tersebut tapi masuk dalam daftar P2K08-HB, padahal kepindahan rumah tangga tersebut sejak tahun 2006 yang lalu, meskipun KTP dan Kartu Keluarga-nya (secara administrasi) belum diurus kepindahannya sedangkan aparat desa sudah berkali-kali minta supaya diurus tapi tidak diurus. Rumah tangga tersebut menerima BLT tahun 2005 dan 2008 dengan alamat SLS lama tersebut, rumah tangga tersebut tidak dicacah dengan ID.

Dalam perjalanan pendataan rumahtangga hibrida ada perubahan jumlah rumahtangga sampel di masing-masing SLS (daftar P2K08-HB). Beberapa ada yang lebih besar dari jumlah sampel sebelumnya dan beberapa SLS lebih sedikit dan ada yang tetap. Sementara pendataan sudah selesai dilakukan, akibatnya pada SLS dengan jumlah sampel rumahtangga yang lebih besar harus didatangi kembali oleh tim untuk melakukan pendataan.

Dari hasil pengamatan lapangan dibandingkan dengan print-out P2K08-HB belum mencerminkan rangking tingkat kesejahteraan rumah tangga karena ditemukan di Jatipurno rumah tangga no urut 2/3 di daftar ternyata kondisinya mampu dan aparat desa setempat mengatakan “kalau bisa rumah tangga ini dicoret saja pak”.

2.4.6 KABUPATEN DEMAK

2.4. 6.1 Permasalahan

- Pelaksanaan P2K dapat terlaksana dengan baik dan diharapkan dapat memberikan hasil yang diinginkan bagi semua pihak.

- Masyarakat masih menganggap bahwa kegiatan P2K08 sama dengan program pemberian BLT tahun 2008, sehingga mereka tetap berupaya untuk mengajukan diri sebagai masyarakat miskin.

2.4. 6.2 Saran

Sebaiknya pencacahan tidak pada bulan Januari-Februari karena kondisi lapangan banjir dan pengambilan keputusan untuk menentukan metode terbaik diambil dengan mempertimbangkan budaya masyarakat setempat, sehingga semua pihak tidak merasa dirugikan.

2.4.7 KABUPATEN KENDAL

2.4.7.1 Metode PMT

Saat pelaksanaan pendataan berlangsung dilaksanakan secara tim minimal 2 orang ditambah pengawas. Kondisi masyarakat masih berasumsi bahwa setiap kegiatan pendataan dipastikan ada tindak lanjut berupa pembagian bantuan. Disisi lain dalam studi ini para petugas diwajibkan menjelaskan adanya bantuan yang akan diterima kepada rumahtangga yang memenuhi kriteria miskin. Meski terasa berat untuk disampaikan kepada masyarakat dan dampak yang akan dihadapi oleh petugas, BPS tetap menyampaikan hal ini kepada kepala desa maupun ketua RT setempat. Namun demikian untuk memudahkan pelaksanaan lapangan dan menyesuaikan kondisi lapangan petugas menjelaskan maksud dan tujuan P2K08. Petugas pencacah tidak mengalami kesulitan saat berkunjung satu persatu ke dalam rumahtangga untuk wawancara. Hal ini dikarenakan masyarakat paham akan pentingnya tujuan survei, masyarakat sudah terbiasa dengan metode wawancara yang dilakukan oleh petugas. Namun hasil dari olah data, masyarakat umum tidak paham atau tidak mengetahui bahwa penentuan kriteria miskin dilakukan secara ketat melalui pembobotan indikator.

Keuntungan Metode PMT:

- Pelaksanaan lapangan dapat dilakukan secara cepat dengan membawa daftar yang sudah ada dan mendatangi rumahtangga, dengan melihat fisik rumah maupun asset yang dimiliki, dan dapat segera diketahui hasilnya.
- Dapat digunakan dalam skala nasional atau skala cakupan yang lebih luas namun metode ini mengandung hanya menurut versi pemerintah.

Kelemahan Metode PMT:

- Penentuan kriteria miskin tidak dapat seluruhnya mampu diterapkan dilapangan. Karena tidak semua kriteria /indikator miskin dapat diterapkan dilapangan.

- Penentuan miskin hanya menurut pemerintah. Disini selain itu kejujuran masyarakat dalam menjawab dan mengisi kuesioner kriteria miskin harus tinggi, karena dari jawaban mereka akan menentukan miskin atau tidak. Namun operasional dilapangan lebih banyak kelemahan yang dapat diterobos oleh pelaku dilapangan, seperti kejujuran petugas, kejujuran responden maupun sistem yang digunakan dalam metode ini. Munculnya konflik antar warga masyarakat yang cemburu sosial akibat bantuan yang diterima.

2.4.7.2 Metode Hybrid

Yang merupakan pengembangan serta tindak lanjut dari PMT. Keunggulan metode ini, daftar nama rumahtangga yang merupakan nominator rumahtangga berkategori miskin dijangling langsung dari masyarakat melalui tokoh masyarakat maupun tokoh agama setempat. Atas dasar informasi tersebut, setiap rumahtangga yang masuk nominator miskin, ditindaklanjuti dengan wawancara kuesioner P2K08-ID. Pada tahap ini secara langsung adalah untuk melihat bahwa rumahtangga yang "Calon penerima bantuan" apakah benar-benar layak sebagai Rumahtangga Miskin.

Keuntungan Metode Hybrid:

Partisipasi dan peran masyarakat sangat berperan dalam penentuan peringkat termiskin sampai dengan terkaya di wilayahnya masing-masing. Mereka lebih mengetahui kondisi sosial ekonomi warga masyarakatnya. Setelah diketahui peringkat termiskin baru menggunakan indikator yang lebih berskala luas, kelebihan lainnya adalah dapat dibandingkan kriteria miskin antar wilayah maupun antar daerah bahkan antar waktu.

Kelemahan Metode Hybrid:

Saat masyarakat mulai menentukan peringkat miskin dilingkungan tempat tinggalnya, akan muncul kecemburuan sosial diantara warga, dengan mengklaim dirinya sebagai warga miskin.

2.4.7.3 Metode Community

Metode ini memudahkan dalam penentuan miskin di wilayah masing-masing, karena tokoh masyarakat maupun tokoh lainnya diajak berdiskusi untuk menentukan apa yang dimaksudkan dengan kategori miskin, masing-masing tokoh memiliki kriteria miskin sendiri-sendiri, peran tokoh disini adalah keberadaan warga sosial ekonominya dibawah standar umum di wilayah masing-masing, mereka mengetahui persis warga yang masuk kategori

miskin. Namun kriteria miskin menurut masing-masing tokoh masyarakat ini, akan sangat berlainan dengan wilayah lain yang menjadi sampel.

Keuntungan Metode Community :

Metode ini mengajak masyarakat secara langsung untuk berpikir dalam menentukan kriteria kemiskinan, masing-masing tokoh masyarakat memiliki versi sendiri-sendiri tentang konsep miskin, akibatnya mereka yang merasa miskin benar, akan meng "Amini" pendapat tokoh X, sementara kelompok lain yang mengaku miskin akan tidak setuju dengan konsep miskin dari Pak X, jadi konsep miskin yang digunakan akan semakin lebar dan tidak fokus pada yang miskin benar. Kecemburuan sosial jelas muncul dari penggunaan metode ini.

Kelemahan Metode Community :

- **Konsep kemiskinan tidak dapat diterapkan pada** skala yang lebih luas atau skala nasional, hal ini disebabkan karena konsep miskin menurut versi lokal atau daerah masing-masing.
- Tidak dapat dibandingkan antar wilayah maupun antar waktu, apalagi dalam skala nasional, bahkan dalam kecamatan yang samapun tidak dapat diperbandingkan.

2.4.8 KOTA SEMARANG

- Permasalahan yang ditemukan adalah ada desa Hybrid yang tertunda dikarenakan warga tidak dapat berkumpul untuk rapat komunitas. Warga di wilayah ini bekerja shift sehingga tidak dapat berkumpul pada waktu yang bersamaan.
- Secara umum, masyarakat dapat memahami tujuan dari studi P2K08.
- Masyarakat di sekitar wilayah kerja tidak mengetahui adanya kegiatan P2K08.
- Tidak ada reaksi penolakan terhadap pencacahan yang dilakukan BPS. Namun begitu, ketika masyarakat mengetahui bahwa kegiatan ini untuk melakukan pemeringkatan kesejahteraan kehidupannya, cenderung mereka memiskinkan diri, apalagi BPS terkait dengan BLT.
- Kriteria orang miskin menurut versi masyarakat, antara lain: tidak bisa makan, tidak bekerja, rumahnya kecil dan jelek.
- Arus dokumen lancar sesuai dengan prosedur untuk PMT. Namun untuk hybrid agak lambat dari LSM Mitra Samya.
- Solusi yang diambil oleh BPS Kota Semarang untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan sering menghubungi LSM untuk segera mengirim dokumen.

- Secara umum, sedikit terjadi kesalahan pengisian dokumen. Kalau pun ada kesalahan, misalnya penulisan kode jawaban, telah diperbaiki oleh pengawas.

2.4.9 KABUPATEN BONE

2.4.9.1 Kesulitan/Hambatan/Kendala

- Identifikasi batas SLS pada beberapa desa agak sulit karena batas SLS yang tidak jelas
- Pada beberapa SLS ada Rumah Tangga dalam daftar P2K08-UD tidak dapat ditemui karena sedang berpergian bahkan ada yang belum kembali sampai dengan pendataan berakhir.
- Ada beberapa nama kepala rumah tangga yang tercantum dalam P2K08-UD sulit untuk ditemui di lapangan terutama untuk wilayah perkotaan. Hal ini terjadi karena nama yang tercantum dalam P2K08-UD bukan nama yang familiar dikenal oleh masyarakat (bukan nama panggilan). Tetapi ada juga nama dalam P2K08-UD adalah nama panggilan.
- Pada saat pendataan P2K08 sedang berlangsung KSK Kecamatan Cina (salah satu kecamatan yang menjadi lokasi studi) jatuh sakit sehingga digantikan oleh pengawas yang kebetulan adalah KSK dari kecamatan lain.
- Untuk metode Hibrid, pelaksanaannya agak terlambat dimulai karena menunggu Form 7B dari Mitra Samya.
- Ada revisi Form 7B dari mitra samiya sehingga harus mencetak ulang Daftar P2K08-HB.
- Perubahan quota dari pusat yang terlambat (untuk metode hybrid) pencacahan sudah selesai di satu SLS mengakibatkan ada rumah tangga yang sudah di data terpaksa harus dibatalkan karena ada pengurangan atau sebaliknya. Jika quotanya bertambah petugas harus turun kembali ke lapangan mencacah rumah tangga tambahan.
- Nama dalam daftar P2K08-UD *double*/ganda dengan kondisi sebagai berikut
 - o Nama kepala rumah tangga yang sama ditulis dua kali dengan nama yang berbeda (satu nama yang di KTP dan yang lainnya nama panggilan)
 - o Ada nama anggota rumah tangga dan nama kepala rumah tangga yang dimasukkan dalam P2K08-UD secara bersama-sama
- Ketika petugas mencacah dengan form HB ditemukan kasus seperti nama art dan krt yang dimasukkan dalam P2K08-UD secara bersama-sama sehingga target rumah tangga dari Daftar P2K08-HB menjadi berkurang.
- Ada ketua SLS yang berdomisili di luar wilayah SLS yang menjadi daerah studi

- Ditemukan daftar P2K08-UD yang muatannya berasal dari dua SLS (UD diganti dari pusat).
- Ditemukan daftar P2K08-UD yang sebagian muatannya berasal dari luar SLS wilayah studi.
- Ada ketua SLS yang berdomisili di luar SLS.

2.4.9.2 Saran untuk Penentuan Rumah Tangga Sasaran

- PMT adalah metode yang baik untuk diaplikasikan, terutama untuk membangun *small area statistics*, dimana banyak indikator vital dari susenas seperti pengeluaran, pendidikan, pengangguran, gizi, dll yang bisa diproksi datanya dengan metode PMT.
- Permasalahan penentuan RTS yang muncul pada P2K08 dan PPLS08 hampir sama. Pada PPLS08 hampir semua RTS tidak layak miskin adalah yang anggota rumah tangganya sedikit. Tidak ada RTS yang anggota rumah tangganya banyak menjadi tidak layak miskin. Kejadian ini terulang pada P2K08.
- Khusus untuk P2K08, ada yang kurang sesuai dalam penentuan RTS, sebagai contoh data berikut diambil dari Kecamatan Kahu desa Mattoanging. Kalau diperhatikan antara Rumah Tangga Tasmir dan M Nasir (yang ditampilkan hanya yang datanya berbeda) maka terlihat sangat jelas bahwa Tasmir jauh lebih mampu dibandingkan M. Nasir (indikator yang paling berbeda jauh adalah kepemilikan lahan, mobil dan motor). Tetapi hasil PMT menunjukkan bahwa Tasmir (rangking 15) lebih miskin dari pada M. Nasir (rangking 16). Alasan yang paling mungkin adalah bahwa jumlah anggota rumah tangga Tasmir jauh lebih banyak dibanding M. Nasir (7 dan 2) sehingga income perkapita M. Nasir menjadi lebih tinggi (Rp.602111) dibanding Tasmir (Rp.592264) (*Lihat tabel isian kuesioner P2K08-ID pada Lampiran 2*).

Namun alasan tersebut kurang tepat karena:

- Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan asset, demografi dan prasarana wilayah bukan pendekatan pengeluaran seperti pada susenas.
- Dari dua pendekatan yang berbeda tersebut, maka perlakuannya (menjadikan anggota rumah tangga sebagai pembagi total pengeluaran) juga seharusnya menjadi berbeda. Sebagai contoh asset, rumah tangga dapat memiliki asset (mobil, motor, sofa, hp dll) jika ada selisih antara pendapatan dan pengeluarannya (pengeluaran sendiri sudah dipengaruhi oleh jumlah anggota rumah tangga). Sehingga selisih pengeluaran tersebut (asset) seharusnya tidak ditimbang lagi dengan jumlah anggota rumah tangga atau kalau pun mau ditimbang maka

perlakuannya tidak akan sama dengan membagi total pengeluaran dengan jumlah anggota rumah tangga untuk menghasilkan pengeluaran perkapita.

2.4.10 KABUPATEN ENREKANG

2.4.10.1 Permasalahan

Sebenarnya inti dari kegiatan ini adalah pengumuman RTS hasil Metode PMT maupun Hybrid dari pihak BPS, dan komunitas dari pihak Mitra Samya.

Setelah meneliti hasil pencetakan RTS baik Metode PMT maupun Hybrid, maka dapat disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

- Ada kecenderungan rumahtangga yang masuk dalam RTS adalah rumahtangga yang mempunyai anggota rumahtangga relative banyak, sebaliknya rumahtangga yang anggota rumahtangga sedikit cenderung tidak masuk dalam RTS.
- Keberadaan asset seperti ini kurang mempengaruhi dalam penentuan RTS.
- Ada beberapa wilayah yang kepala rumahtangga atau salah satu anggota rumahtangga adalah PNS masuk di RTS, kode lapangan usaha 9 (perdagangan dan jasa) dan status pekerjaan 4 (buruh/pegawai/karyawan) contoh kasus di Kelurahan Pusseren. Artinya kode sektor kurang mempengaruhi dalam penentuan RTS.
- Pemberian Rp 30.000 hanya untuk RTS rawan konflik. Ada salah satu wilayah yang masyarakat berebut untuk menjadi ranking 1 metode hybrid, dengan harapan akan mendapat uang Rp. 30.000. Namun setelah RTS diumumkan mereka tidak masuk didalamnya. Artinya kerja/andil dan keberadaan Ka SLS dan masyarakat kurang dihargai.

2.4.10.2 Saran

Dari permasalahan diatas saran yang dapat disampaikan adalah:

- Mungkin mengadopsi metode PMT nya PPLS08 tidak salah. Namun kita harus hati-hati, karena dalam PPLS08 populasinya adalah masyarakat miskin (homogen), sedangkan di P2K08 populasinya adalah semua masyarakat (heterogen). Metode PPLS08 yang bisa diadopsi adalah *negative question* yang ada di LS, sehingga PNS dan kepemilikan asset bisa terdeteksi dini (*early warning system*).
- Kegiatan ini pendekatan adalah rumahtangga, tapi alat yang dipakai adalah pendapatan perkapita. Kedepan disarankan jika pendekatan adalah rumahtangga maka alat yang dipakai juga rumahtangga. Demikian pula jika tujuannya adalah mencari penduduk miskin tentunya alat yang mungkin paling tepat adalah penduduk perkapita.

- Uang Rp 30.000 buat masyarakat sekarang sangat berarti. Jika alasannya untuk rasa terima kasih kenapa tidak dikasihkan kepada semua masyarakat yang terlibat. Atau pemberian bantuan uang tapi ditujukan untuk dana Kas SLS setempat. Sehingga ancaman konflik dapat diminimalkan.

2.4.11 KABUPATEN TANA TORAJA

- Adanya permintaan dari masyarakat yang berada pada desa yang kebetulan SLS-nya tidak terkena sampel meminta untuk didata dengan P2K, artinya respon yang baik dari masyarakat mengenai kegiatan P2K.
- Para pencacah saat melaksanakan tugas di lapangan, pihak kepala desa dan ketua SLS ikut berperan dalam mengantar pencacah.

2.4.11.1 Permasalahan

- Adanya keterlambatan pihak mitra Mitra Samya dalam menyerahkan Form 7B, yang menyebabkan terlambatnya hasil pencacahan dan pengolahan di pihak BPS.
- Nama-nama kepala rumah tangga pada HB (*Hybrid Method*) masih terdapat perbedaan di lapangan, hal tersebut menyebabkan terganggunya kelancaran petugas pencacah BPS.

2.4.11.2 Saran

Setelah meneliti hasil pencetakan RTS baik Metode PMT maupun Hybrid, maka dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Keterlambatan pencacahan dan pengolahan oleh pihak BPS disebabkan karena terlambatnya penerimaan Form 7B dari petugas Mitra Samya, sehingga diharapkan ke depanantisipasi atas hal tersebut perlu perhatian untuk tidak terulang lagi untuk hal-hal yang terjadi pada kegiatan P2K ini.
- Banyak PNS yang termasuk RTS, kode lapangan usaha 9 (perdagangan dan jasa) dan status pekerjaan 4 (buruh/pegawai/karyawan).

2.4.12 KOTA MAKASSAR

2.4.12.1 Permasalahan

- Pada saat petugas ke lapangan dan menginformasikan kepada ketua SLS, ternyata ketua SLS sebagian besar sudah mengetahui ada kegiatan P2K08. Khususnya di Kota

Makassar, untuk mencari rumah tangga tidak ada kesulitan. Hanya saja sebagian besar rumah tangga yang ada di daftar berada di luar SLS.

- Hasil listing yang telah dilakukan sebelumnya, ada nama-nama kepala rumah tangga yang sudah tidak berada di lokasi SLS tersebut masih terdata, padahal waktu pendataan listing dan pencacahan hanya berselang dua minggu.
- Sambutan masyarakat mengenai pendataan P2K08 baik, sebagian besar tidak ada penolakan, hanya responden yang berprofesi pejabat sulit untuk ditemui, demikian pula responden keturunan (Cina) biasanya sulit juga untuk diwawancarai.
- Konsistensi antar pertanyaan yang satu dengan yang lainnya sebagian besar sudah baik. Hanya saja pada blok III keterangan anggota rumah tangga yang seharusnya tidak ditanyakan masih ditanyakan.
- Petugas dari Mitra Samya sebaiknya menginformasikan terlebih dahulu ke kabupaten/kota bahwa ada pertemuan.
- Kerjasama dengan pihak Mitra Samya baik, hanya saja dalam penyelesaian dan penyerahan Form 7B agak terlambat. Sehingga penyelesaian metode hybrid mengalami keterlambatan.

Pada saat pencetakan Rumah Tangga Sasaran (RTS) baik Metode PMT maupun Hybrid, masih terdapat beberapa permasalahan diantaranya :

- Pada hasil pencetakan, yang masuk sebagai RTS cenderung rumah tangga yang anggota rumah tangganya banyak, sementara yang anggota rumah tangganya sedikit cenderung bukan RTS. Padahal kondisi lapangan tidak seperti itu.
- Pegawai Negeri Sipil banyak yang terdaftar sebagai RTS. Padahal pada konsep tidak seperti itu. Sehingga banyak masyarakat yang protes, utamanya yang tingkat kesejahteraan rumah tangganya lebih rendah tetapi tidak digolongkan sebagai RTS.
- Ada juga RTS yang terdaftar memiliki asset seperti motor, tabungan, emas dan lain-lain. Setelah ditelusuri ternyata dimasukkan sebagai RTS, karena rumah tangga tersebut memiliki ART yang jumlahnya relatif banyak.

2.4.12.2 Saran

- Agar program entry maupun cetak RTS agar diperbaiki lagi sehingga RTS yang dihasilkan betul-betul yang sudah sesuai dengan kriteria telah yang ditentukan.
- Konsep keluarga seharusnya mengacu seperti yang biasa di survei-survei BPS lainnya. Karena konsep famili lain yang lebih dari 2 adalah merupakan keluarga bisa multi

tafsir seperti contoh famili lain yang umurnya di bawah 15 tahun, kost-kostan yang isinya lebih dari 3 orang.

- BPS sudah melaksanakan kegiatan dengan sebaik-baiknya, namun ada kecenderungan pihak Mitra Samya menunda-nunda kegiatan ini. Implikasi di BPS adalah terganggunya manajemen kerja. Seperti diketahui kegiatan rutin dan khusus di BPS pada saat ini lumayan padat.

2.5 PEMASANGAN DAFTAR RUMAH TANGGA SASARAN DAN DISTRIBUSI DANA

Pemasangan daftar rumah tangga sasaran dan distribusi dana, dilakukan pada bulan Februari 2009. Untuk kegiatan ini, KSK menghubungi fasilitator komunitas dari Mitra Samya untuk bersama-sama melakukan pemasangan daftar rumah tangga sasaran sekaligus mendistribusikan dana sebesar Rp. 30.000,- untuk setiap rumah tangga sasaran.

Pemasangan daftar dilakukan di tempat-tempat umum yang mudah dilihat oleh warga setempat, seperti: papan pengumuman RT, warung, rumah ketua RT, dan sebagainya. Pendistribusian dana dilaksanakan secara bijaksana dan transparan untuk tidak menimbulkan konflik di SLS setempat. Cara pendistribusian dana dilakukan dengan cara mengunjungi setiap rumah tangga sasaran dan atau dilakukan dengan cara mengumpulkan para rumah tangga sasaran di suatu tempat.

3. PENGOLAHAN

3.1 PELAKSANAAN BAN BERJALAN

Untuk menjamin penyelesaian tepat waktu maka mekanisme pengolahan secara ban berjalan dilakukan, yaitu dokumen yang masuk segera diolah dengan tidak mengesampingkan kelengkapan dan keakuratan dokumen. Khusus untuk metode Hibrid pengolahan didahulukan untuk diambil sampel kemudian ditindaklanjuti dengan verifikasi di lapangan menggunakan Daftar P2K08-ID.

3.2 PENCAPAIAN

Dengan menggunakan fasilitas komputer dan tenaga entri yang ada di masing-masing kantor BPS Kabupaten/Kota, pengolahan dokumen dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Data dalam bentuk *softcopy* dikirim ke BPS Pusat untuk selanjutnya dikompilasi dengan data kabupaten/kota lainnya dan diserahkan ke Bank Dunia.

3.3 MASALAH TERKAIT DENGAN PENGOLAHAN DAN PENYELESAIANNYA

Masalah yang dihadapi terkait dengan program entry, antara lain:

- Program pengolahan tidak sempurna. Namun, BPS kabupaten/kota selalu berkonsultasi dengan BPS Pusat agar segera dilakukan penyempurnaan sehingga pengolahan dapat terus berjalan.
- Target/kuota untuk metode Hibrid berubah setiap program versi terbaru diterima, sehingga target sampel pusat tidak sama dengan yang dicacah karena tidak memungkinkan kembali ke lapangan dan proses pengolahan sudah selesai.

4. ADMINISTRASI

4.1 MEKANISME PENGELOLAAN ANGGARAN

Anggaran P2K08 berasal dari World Bank, dengan rincian setiap kabupaten/kota adalah sebagai berikut:

Propinsi	Kabupaten/Kota	Total Budget (Rp)
Pusat		523.201.250
Sumatera Utara		11.350.000
	Humbang Hasundutan	55.030.000
	Serdang Bedagai	135.702.500
	Pematang Siantar	70.940.000
Jawa Tengah		15.850.000
	Purbalingga	96.347.500
	Wonogiri	60.345.000
	Demak	69.522.500
	Kendal	132.907.500
	Semarang	78.160.000
Sulawesi Selatan		13.600.000
	Bone	121.905.000
	Enrekang	41.677.500
	Tana Toraja	65.092.500
	Makasar	72.665.000
Total		1.564.296.250

4.2 MASALAH DAN PENYELESAIAN

Adanya perubahan kuota RTS pada Metode hibrida mengakibatkan terjadinya perbedaan realisasi jumlah rumah tangga yang seharusnya dicacah dengan P2K08-ID. Hal ini berdampak pada pelaksanaan lapangan, seperti, bila kuota lebih kecil dari kuota yang ditetapkan sedangkan pelaksanaan pencacahan telah selesai dilakukan, maka terjadi kelebihan rumah tangga, dan sebaliknya. Hal ini juga berdampak pada realisasi anggaran untuk pencacahan. Semua daerah mengeluhkan hal ini. Sebagai solusinya, kelebihan rumah tangga yang telah dicacah akan tetap dibayar seperti seharusnya.

HASIL STUDI

1. METODE PMT

Pelaksanaan P2K08 diawali dengan prosedur updating rumahtangga hasil *Baseline Survey* (BS). Tabel 8 menunjukkan bahwa dari sebanyak 10.873 rumahtangga, yang masih sesuai seperti keadaan semula adalah sebanyak 6.909 rumahtangga. Selain itu pada saat kunjungan petugas P2K-08 terdapat sebanyak 2.994 rumahtangga berhasil ditemukan tetapi nama kepala rumahtangganya berbeda dengan BS dan 9 rumahtangga merupakan rumahtangga baru yang pada saat BS hanya terdaftar sebagai ART pada suatu rumahtangga. Dengan demikian terdapat sebanyak 9.912 rumahtangga yang berasal dari BS yang berhasil ditemui dan didapatkan keterangan rumahtangga. Sedangkan rumahtangga sisanya tidak didapatkan keterangan rumahtangganya dengan rincian 19 rumahtangga tunggal dan KRT-nya meninggal dunia, 326 rumahtangga telah pindah, 125 rumahtangga dinyatakan salah alamat, dan 168 rumahtangga sedang bepergian sampai dengan akhir batas pencacahan, serta 323 rumahtangga BS dinyatakan sebagai bagian dari rumahtangga lain.

Tabel 8. Jumlah Rumahtangga Hasil Updating (P2K08-UD) Menurut Hasil Kunjungan dan Sumber Informasi

Hasil Kunjungan	Sumber Informasi			Total
	Baseline Survey	Ketua SLS	Petugas	
Ditemukan	6,909	472	386	7,767
Ditemukan, tapi nama KRT berbeda	2,994	0	0	2,994
KRT meninggal tanpa ART lain	19	0	0	19
Pindah	326	0	0	326
Salah alamat	125	0	0	125
Sedang bepergian	168	0	0	168
Gabung dengan rumah tangga lain	323	0	0	323
Pisah dari rumah tangga asal	9	0	0	9
Total	10,873	472	386	11,731

Selain itu, ternyata pada SLS terpilih masih didapatkan beberapa rumahtangga yang belum terdaftar pada saat *Baseline Survey*, yaitu sebanyak 472 rumahtangga tambahan yang diberikan oleh Ketua SLS terpilih, dan 386 rumahtangga baru berhasil ditemukan oleh petugas P2K08 pada saat melakukan updating rumahtangga dengan Daftar P2K08-UD di lapangan. Rumahtangga-rumahtangga tambahan ini dan 9.912 rumahtangga BS inilah yang selanjutnya layak untuk didata lebih lanjut untuk mendapatkan keterangan-keterangan rumahtangga. Dengan kata lain terdapat sebanyak 10.770 rumahtangga yang didata dengan P2K08-ID yang akan digunakan untuk dasar penentuan RTS dengan menggunakan PMT. Rincian ke-10.770 rumahtangga ini menurut Kabupaten/Kota berikut hasil lengkap updating P2K08-UD-nya disajikan dalam Tabel 9 berikut:

Tabel 9. Jumlah Rumahtangga Hasil Updating (P2K08-UD) dan Yang Layak didata dengan P2K08-ID Menurut Kabupaten/Kota

Kabupaten/ Kota	P2K08-UD				Yang Layak di Data dengan P2K08-ID			
	Sumatera Utara	Jawa Tengah	Sulawesi Selatan	Total	Sumatera Utara	Jawa Tengah	Sulawesi Selatan	Total
Humbang Hasundutan	654	-	-	654	631	-	-	631
Serdang Bedagai	1,868	-	-	1,868	1,747	-	-	1,747
Pematang Siantar	1,037	-	-	1,037	987	-	-	987
Purbalingga	-	916	-	916	-	867	-	867
Wonogiri	-	551	-	551	-	477	-	477
Demak	-	724	-	724	-	692	-	692
Kendal	-	1,172	-	1,172	-	1,061	-	1,061
Semarang	-	959	-	959	-	823	-	823
Bone	-	-	1,437	1,437	-	-	1,337	1,337
Enrekang	-	-	725	725	-	-	661	661
Tana Toraja	-	-	801	801	-	-	723	723
Makassar	-	-	887	887	-	-	764	764
Total	3,559	4,322	3,850	11,731	3,365	3,920	3,485	10,770

Setelah dilakukan pendataan dengan P2K08-ID untuk mengetahui kondisi sosial ekonomi setiap rumahtangga, ternyata masih ada beberapa rumahtangga yang tidak dapat diperoleh keterangan rumahtangganya. Selengkapnya rekapitulasi jumlah rumahtangga yang dicacah dengan Daftar P2K08-ID per kabupaten/kota wilayah studi adalah sebagai berikut:

Tabel 10. Jumlah Rumahtangga yang didata dengan P2K08-ID Menurut Kabupaten/Kota dan Hasil Kunjungan dan Wawancara

Kabupaten/Kota	Hasil Kunjungan dan Wawancara					Total
	Selesai	Selesai Sebagian	Menolak	Tidak bisa ditemui	Tidak ditemukan	
Humbang						
Hasundutan	631	0	0	0	0	631
Serdang						
Bedagai	1,730	0	7	10	0	1,747
Pematang						
Siantar	971	1	15	0	0	987
Purbalingga	867	0	0	3	0	870
Wonogiri	477	0	0	0	0	477
Demak	691	1	0	1	0	693
Kendal	1,059	0	2	17	0	1,078
Semarang	822	1	0	0	0	823
Bone	1,333	2	2	0	0	1,337
Enrekang	661	0	0	0	0	661
Tana Toraja	723	0	0	0	0	723
Makassar	753	0	6	5	0	764
Total	10,718	5	32	36	0	10,791*

Catatan *) ada sebanyak 21 rumahtangga yang seharusnya tidak dicacah dengan daftar P2K08-ID.

Berdasarkan Tabel 10 diatas, dari sebanyak 10.791 rumahtangga yang didata dengan Daftar P2K08-ID, hanya sebagian kecil yang tidak didapatkan keterangan rumahtangganya dengan rincian 5 berhasil diwawancarai namun hanya sebagian yang terisi, 32 rumahtangga menolak untuk diwawancarai lebih lanjut, dan 36 rumahtangga tidak berhasil ditemui. Karena masih adanya kesalahpahaman petugas dalam menerapkan alur tugasnya maka jumlah rumahtangga yang layak didata berdasarkan P2K08-UD dengan realisasi dokumen P2K08-ID menjadi tidak sama. Ada sebanyak 21 rumahtangga yang seharusnya tidak dicacah lebih lanjut dengan Daftar P2K08-ID karena pada Daftar P2K08-UD-nya sudah dinyatakan pindah atau salah alamat. Identitas kedupuluh satu rumahtangga tersebut adalah sebagai berikut:

No	prop	kab	kec	desa	wilcah	hhid
1	33	03	060	008	175	95
2						617
3						648
4		21	050	006	301	511
5		24	140	007	357	326
6						771
7			160	014	379	184
8						979
9						986
10				015	380	610

11						732
12						934
13	33	24	170	016	399	163
14						209
15						294
16						372
17						414
18						846
19						856
20						859
21						898

Selain permasalahan kedua puluh satu rumahtangga diatas, setelah dilakukan telaah lebih lanjut ternyata terdapat dua dokumen P2K08-ID yang seharusnya merupakan rumahtangga yang sama. Kasus seperti ini terjadi di Kabupaten Purbalingga dan Kabupaten Bone. Adapun identitas kedua rumahtangga tersebut di masing-masing kabupaten adalah:

<u>prop</u>	<u>kab</u>	<u>kec</u>	<u>desa</u>	<u>wilcah</u>	<u>hhid</u>
33	03	090	012	216	383 double dengan 529
73	11	730	001	522	101 double dengan 894

Seperti telah dijelaskan dimuka bahwa pendataan dengan Daftar P2K08-ID ini digunakan untuk melakukan estimasi pengeluaran rumahtangga perkapita dengan menggunakan *Proxy Means Test* (PMT). Syarat utama untuk dilakukan PMT ini adalah bahwa isian Daftar P2K08-ID harus diisi dengan lengkap. Oleh karena itu, terkait dengan hasil yang ditunjukkan pada Tabel 10 diatas, hanya terdapat sebanyak 10.718 rumahtangga yang layak untuk di-PMT-kan. Setela proses penghitungan PMT selesai dilakukan, selanjutnya rumahtangga bisa diperingkat berdasarkan estimasi pengeluaran rumahtangga perkapita perbulannya dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi. Pemeringkatan rumahtangga ini akan menentukan rumahtangga-rumahtangga yang layak menjadi rumahtangga sasaran (RTS) yang dilakukan dengan jalan mengambil rumahtangga dengan estimasi pengeluaran terendah sebanyak quota di masing-masing SLS terpilih. Jumlah RTS hasil metode RTS untuk masing-masing kabupaten/kota disajikan dalam Tabel 11 berikut ini.

Tabel 11. Jumlah RTS hasil PMT Menurut Kabupaten/Kota Berdasarkan Quota SLS.

Kabupaten/ Kota	Jumlah	Persentase	Persentase Kumulatif
Humbang Hasundutan	258	7.97	7.97
Serdang Bedagai	412	12.72	20.69
Pematang Siantar	228	7.04	27.73
Purbalingga	359	11.09	38.82
Wonogiri	182	5.62	44.44
Demak	280	8.65	53.09
Kendal	384	11.86	64.95
Semarang	125	3.86	68.81
Bone	388	11.98	80.79
Enrekang	364	11.24	92.03
Tana Toraja	165	5.1	97.13
Makassar	93	2.87	100
Total	3,238	100	

Daftar P2K08-RTS hasil pemeringkatan dengan PMT, sebagai tahap akhir kegiatan penentuan peringkat kesejahteraan 2008, kemudian di tempel di tempat yang mudah dilihat warga di SLS terpilih untuk mendapatkan komplain dari para warga. Bagi warga yang tidak setuju dengan hasil pemeringkatan ini disarankan untuk memberikan tanggapannya dan dimasukkan ke dalam kotak yang disediakan di tempat yang sama untuk penempelan Daftar P2K08-RTS. Seluruh rumahtangga yang termasuk dalam Daftar P2K08-RTS selanjutnya akan menerima uang sebesar @Rp. 30.000,- yang didistribusikan secara langsung oleh LSM Mitra Samya dan didampingi oleh KSK/Mitra BPS. Pada tahap akhir, LSM Mitra Samya ini juga yang mengumpulkan komplain warga terkait hasil pemeringkatan kesejahteraan warga ini.

Untuk melihat keefektifan model PMT, perlu kita melihat kondisi sosial ekonomi dari RTS-RTS tersebut. Kondisi sosial ekonomi bisa dilihat dengan kepemilikan asset yang dianggap penting atau asset-asset yang diperkirakan hanya bisa dimiliki atau merupakan gaya hidup rumahtangga golongan menengah keatas. Yang dikategorikan asset-asset penting ini antara lain adalah mesin cuci, kompor listrik, kulkas, AC, TV, DVD, Parabola, Laptop, Telpon, Motor, Mobil, Rumah Kontrakan, dan Kos-Kos-an. Dengan demikian kita mengharapkan bahwa RTS-RTS yang tercantum dalam Daftar P2K08-RTS adalah mereka yang benar-benar tidak memiliki asset-asset penting ini. Untuk melihat lebih jelasnya, rekapitulasi jumlah RTS yang memiliki asset penting menurut kabupaten/kota disajikan dalam Tabel 12 berikut:

Tabel 12. Jumlah RTS yang Memiliki Asset Penting Menurut Kabupaten/Kota

Kabupaten/ Kota	Mesin Cuci	Kom por Lis- trik	Kul- kas	AC	TV	DVD	Para- bola	Lap- top	Tel- pon	Mo- tor	Mobil	Ru- mah Kon- trakan	Kos- kos an	Tidak Punya Satu- pun
Humbang Hasundutan	-	-	-	1	55	20	48	-	-	33	1	-	-	180
Serdang Bedagai	6	-	29	-	286	139	13	-	-	225	-	-	-	85
Pematang Siantar	2	1	18	1	134	70	114	4	4	39	1	1	-	86
Purbalingga	1	-	11	-	220	85	1	-	1	81	-	1	1	120
Wonogiri	-	-	8	-	114	54	17	1	-	66	1	-	-	51
Demak	-	7	5	-	152	51	1	-	-	101	-	1	-	99
Kendal	3	1	31	-	266	159	-	3	1	129	-	-	-	101
Semarang	1	-	4	-	63	15	-	9	1	48	-	-	-	39
Bone	1	3	64	-	144	56	54	-	2	108	3	1	-	181
Enrekang	13	1	75	-	204	76	28	1	3	86	1	2	7	134
Tana Toraja	3	-	6	1	74	24	3	1	3	24	1	2	1	83
Makassar	1	-	8	-	66	29	-	-	3	8	-	1	-	24
Total	31	13	259	3	1,778	778	279	19	18	948	8	9	9	1,183

Kesimpulan pertama yang bisa diambil terkait hasil yang disajikan dalam Tabel 12 adalah bahwa diantara asset penting yang juga sudah menjadi kebutuhan para RTS adalah TV. Lebih dari 50% RTS memiliki TV yaitu dari 3.238 RTS, 1.778 (54,91%) diantaranya memiliki TV. Selain itu masih cukup banyak juga RTS yang memiliki motor (948 RTS atau 29%). RTS-RTS yang memiliki DVD juga masih cukup banyak yaitu sekitar 778 dari 3.238 RTS (24%). Tabel 12 diatas juga menunjukkan bahwa Daftar RTS masih memuat rumahtangga-rumahtangga elit. Di Humbang Hasundutan misalnya, RTS masih memasukkan rumahtangga yang memiliki AC dan Parabola, bahkan juga ada RTS di kabupaten ini yang memiliki Mobil. RTS yang memiliki AC juga ditunjukkan di Kota Pematang Siantar (Sumatera Utara) dan Kabupaten Tana Toraja (Sulawesi Selatan). Di Kota Pematang Siantar sendiri bahkan menunjukkan hasil yang lebih mengejutkan karena ada minimal 1 RTS dengan asset-asset penting yang telah ditentukan dimuka, kecuali kos-kosan. Fakta RTS bermobil selain ditemukan di Pematang Siantar (Sumatera Utara), juga ditemukan di Wonogiri, Bone, Enrekang, dan Tana Toraja. Dari hasil ini, maka mekanisme penentuan RTS masih perlu untuk diperbaiki jika akan diterapkan di masa mendatang.

2. METODE HIBRIDA (HYBRID METHOD)

Dalam *hybrid method* tugas BPS adalah melakukan verifikasi di lapangan hasil pemeringkatan rumahtangga oleh komunitas (masyarakat atau tokoh), yaitu fasilitator komunitas menyerahkan hasil pemeringkatan tersebut (Form 7B) kepada BPS. Berbeda dengan Metode PMT, dalam metode ini BPS tidak melakukan pendataan dengan Daftar P2K08-ID namun hanya sebatas 1,5 dari kuota RTS untuk SLS tersebut dan yang akan diverifikasi lebih lanjut oleh BPS adalah mereka yang berada pada peringkat 1 s/d 1,5 kuota pada FORM 7B yang selanjutnya dicetak dalam Daftar P2K08-HB. Berbekal daftar ini,

petugas BPS kemudian melakukan pendataan rumahtangga-rumahtangga tersebut dengan Daftar P2K08-ID. Jumlah rumahtangga yang ada pada Form 7B untuk masing-masing kabupaten/kota wilayah studi dicantumkan pada Tabel 13 sedangkan realisasi pencacahan Daftar P2K08-ID-nya disajikan pada Tabel 14.

Tabel 13. Jumlah Rumahtangga hasil Form 7B Menurut Kabupaten/Kota

Kabupaten/ Kota	Jumlah	Persentase	Persentase Kumulatif
Humbang Hasundutan	1,051	9.58	9.58
Serdang Bedagai	1,790	16.31	25.88
Pematang Siantar	950	8.66	34.54
Purbalingga	887	8.08	66.27
Wonogiri	453	4.13	38.67
Demak	769	7.01	45.67
Kendal	1,374	12.52	58.19
Semarang	619	5.64	71.91
Bone	1,355	12.35	84.26
Enrekang	396	3.61	87.86
Tana Toraja	687	6.26	94.12
Makassar	645	5.88	100
Total	10,976	100	

Tabel 14. Jumlah Rumahtangga yang didata dengan P2K08-ID Menurut Kabupaten/Kota dan Hasil Kunjungan dan Wawancara

Kabupaten/Kota	Hasil Kunjungan dan Wawancara						Total
	Selesai	Menolak	Tidak bisa ditemui	Tidak ditemukan	Sedang bepergian	Gabung dengan Ruta lain	
Humbang Hasundutan	634	0	12	10	0	0	656
Serdang Bedagai	642	0	0	7	0	0	649
Pematang Siantar	291	1	2	1	0	0	295
Purbalingga	592	0	1	0	3	0	596
Wonogiri	587	0	12	0	4	0	603
Demak	483	1	9	17	0	0	510
Kendal	787	3	16	10	0	11	827
Semarang	115	0	0	0	0	0	115
Bone	645	1	4	3	0	0	653
Enrekang	322	0	1	1	0	5	329
Tana Toraja	284	0	1	0	3	0	288
Makassar	141	0	0	0	0	0	141
Total	5,523	6	58	49	10	16	5,662

Tabel 14 diatas menunjukkan bahwa masih terjadi perbedaan konsep rumahtangga antara fasilitator/masyarakat dan petugas BPS. Setelah diverifikasi di lapangan ternyata ada sebanyak 16 rumahtangga yang sebetulnya merupakan ART dari rumahtangga lain. Selain itu

juga masih didapatkan sebanyak 49 rumahtangga yang tidak ditemukan oleh petugas BPS ketika akan melakukan verifikasi rumahtangga dari Form 7B. Hal ini dimungkinkan terjadi karena pada saat melakukan musyawarah fasilitator kemungkinan tidak menanyakan keberadaan rumahtangga ini. Di benak warga, tetangganya walaupun sudah tinggal misalnya di Jakarta masih mereka anggap sebagai tetangganya juga. Karena adanya updating rumahtangga pada saat pelaksanaan SUSETI oleh *survey matter* dengan pada saat pelaksanaan P2K08, maka dimungkinkan terjadi perubahanan kuota. Sehingga rumahtangga yang di-PMT-kan adalah mereka yang menjawab dengan lengkap isian Daftar P2K08-ID dan berada dalam kuota yang baru. Secara keseluruhan, jumlah rumahtangga (Hybrid) yang di-PMT-kan ada sebanyak 5.170 rumahtangga yang disajikan per kabupaten/kotanya pada Tabel 15 berikut ini.

Tabel 15. Jumlah Rumahtangga (Hybrid) untuk PMT Menurut Kab/Kota

Kabupaten/ Kota	Jumlah	Persentase	Persentase Kumulatif
Humbang Hasundutan	634	12.26	12.26
Serdang Bedagai	629	12.17	24.43
Pematang Siantar	288	5.57	30
Purbalingga	592	11.45	41.45
Wonogiri	339	6.56	48.01
Demak	403	7.79	55.8
Kendal	787	15.22	71.03
Semarang	114	2.21	73.23
Bone	644	12.46	85.69
Enrekang	316	6.11	91.8
Tana Toraja	284	5.49	97.29
Makassar	140	2.71	100
Total	5,170	100	

Setelah proses PMT dilakukan, kemudian rumahtangga diperingkat berdasarkan estimasi pengeluaran rumahtangga perkapita perbulan mulai dari yang terkecil sampai dengan yang terbesar. Selanjutnya rumahtangga yang tercantum dalam Daftar P2K08-RTS adalah mereka yang memiliki ranking 1 sampai dengan sebanyak kuota dalam SLS tersebut. Hasilnya adalah sebanyak 3.507 RTS. Sebagaimana dalam metode PMT, RTS-RTS ini juga diberikan uang sebanyak @Rp. 30.000,- yang juga dilakukan oleh Mitra Samya disertai oleh KSK/Mitra BPS. Hasil RTS perkabupaten/kota disajikan dalam Tabel 16.

Tabel 16. Jumlah RTS (Hybrid) hasil PMT Menurut Kabupaten/Kota Berdasarkan Quota SLS.

Kabupaten/ Kota	Jumlah	Persentase	Persentase Kumulatif
Humbang Hasundutan	439	12.52	12.52
Serdang Bedagai	382	10.89	23.41
Pematang Siantar	196	5.59	29
Purbalingga	398	11.35	40.35
Wonogiri	208	5.93	46.28
Demak	303	8.64	54.92
Kendal	555	15.83	70.74
Semarang	81	2.31	73.05
Bone	436	12.43	85.49
Enrekang	225	6.42	91.9
Tana Toraja	190	5.42	97.32
Makassar	94	2.68	100
Total	3,507	100	

Hasil pemeringkatan oleh komunitas-pun juga masih didapatkan hasil yang kurang menggembirakan. Hal ini terlihat dengan melihat kepemilikan asset penting dari rumah tangga-rumah tangga yang kurang sejahtera menurut versi komunitas. Berdasarkan hasil verifikasi petugas BPS, ternyata masih ditemukan RTS yang memiliki AC dan Laptop, bahkan Mobil. Secara keseluruhan ada sebanyak 6 RTS yang memiliki AC, 12 RTS menguasai Laptop, dan ada sebanyak 8 RTS yang memiliki mobil. Secara rinci jumlah RTS menurut jenis asset penting menurut kabupaten/kota bisa dilihat pada Tabel 17.

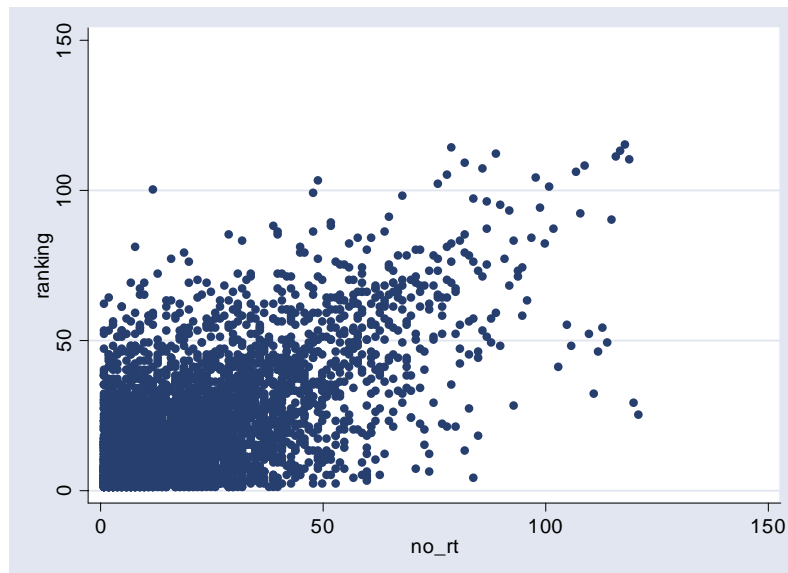
Tabel 17. Jumlah RTS (Hybrid) yang Memiliki Asset Penting Menurut Kabupaten/Kota

Kabupaten/ Kota	Mesin Cuci	Kompor Listrik	Kulkas	AC	TV	DVD	Parabola	Laptop	Telpon	Motor	Mobil	Rumah Kontrakan	Kos-kosan	Tidak Punya Satupun
Humbang Hasundutan	-	-	1	1	105	62	90	1	-	61	2	1	-	305
Serdang Bedagai	1	-	6	2	253	116	1	2	3	139	-	5	-	99
Pematang Siantar	3	-	23	1	129	74	108	3	3	22	-	2	1	59
Purbalingga	5	1	6	-	233	100	1	-	1	87	-	1	1	144
Wonogiri	-	1	3	-	142	76	17	-	-	74	4	-	-	51
Demak	-	10	11	-	166	72	-	-	-	94	-	-	2	117
Kendal	4	1	28	-	346	151	-	3	5	141	-	2	-	183
Semarang	2	-	12	-	56	17	-	2	7	23	1	-	-	23
Bone	1	3	63	1	147	39	71	-	5	97	-	1	1	222
Enrekang	4	-	42	-	121	51	61	-	2	57	-	-	1	93
Tana Toraja	2	-	3	1	83	41	32	1	2	15	-	2	1	99
Makassar	2	1	13	-	68	30	-	-	4	14	1	2	1	22
Total	24	17	211	6	1,849	829	381	12	32	824	8	16	8	1,417

Berbeda dengan metode PMT, dalam metode hibrida ini kita bisa membandingkan pemeringkatan versi komunitas dengan pemeringkatan versi PMT. Gambar 4 menunjukkan

scatter diagram antara peringkat rumahtangga dengan PMT dengan peringkat rumahtangga versi komunitas. Koefisien korelasi masih menunjukkan hubungan yang cukup kuat antara peringkat versi PMT dengan peringkat versi komunitas yaitu sebesar 0.6258.

Gambar 4. Scatter Diagram antara Ranking PMT dengan Peringkat Komunitas



PENUTUP

1. KESIMPULAN

Secara keseluruhan proses pelaksanaan lapangan P2K08 berjalan dengan lancar baik untuk metode PMT, Hybrid, maupun Komunitas. Keterlibatan BPS dalam metode Komunitas hanya sebatas sosialisasi dan pendistribusian dana oleh KSK. Jika ada hambatan yang, maka sudah dapat diatasi oleh para koordinator kabupaten/kota. Adapun keunggulan dan kelemahan untuk masing-masing metode pendataan dilihat dari berbagai sudut diringkaskan dalam Tabel 18.

Dari pembahasan hasil studi dapat disimpulkan bahwa masih didapatkan adanya kesalahan memasukkan RTS baik dengan metode PMT maupun metode Hybrid. Hal ini disebabkan penentuan rumahtangga yang masuk menjadi RTS berdasarkan PMT tidak didasarkan pada Garis Kemiskinan namun berdasarkan kuota untuk masing-masing SLS selain itu pendataan rumahtangga dilakukan diseluruh rumahtangga tanpa adanya *screening* terlebih dahulu. Sehingga walaupun bisa dipastikan rumahtangga elit seperti rumahmewah dan memiliki mobil masih tetap didata dengan Daftar P2K08-ID. Tidak ada jaminan bahwa

jika dibandingkan antara yang termiskin di suatu SLS dengan terkaya di SLS lain, yang terkaya di SLS masih lebih rendah estimasi pengeluarannya dibandingkan dengan yang termiskin di SLS yang satunya lagi. Hal ini terjadi karena di SLS yang satunya adalah daerah kantong kemiskinan sedang SLS yang satunya lagi adalah daerah elit.

Terjadi perbedaan peringkat rumahtangga antara versi komunitas dengan versi PMT, namun korelasinya masih dianggap cukup kuat yaitu sebesar 62 persen. Hal ini menunjukkan bahwa masih adanya hubungan yang signifikan antara pemeringkatan versi komunitas dengan versi PMT.

2. SARAN

Untuk menghindari kesalahan pemasukan kategori rumahtangga, sebaiknya tidak seluruh rumahtangga dilakukan pencacahan dengan daftar indikator untuk keperluan PMT yaitu sebaiknya rumahtangga yang sudah bisa dianggap rumahtangga elit tidak perlu diwawancarai lebih lanjut. Hal ini bisa dilakukan dengan menggunakan model *negative list* untuk seleksi rumahtangga yang layak diwawancarai lebih lanjut. Dasar penyeleksiannya bisa dilakukan dengan melihat asset-asset penting rumahtangga seperti kondisi bangunan rumah, kepemilikan AC, kepemilikan mobil, dan kepemilikan Laptop komputer. Jenis pekerjaan ART dalam hal ini pegawai negeri sipil (PNS) juga sebaiknya digunakan untuk alat seleksi karena PMT sendiri tidak mampu membedakan apakah pekerjaan KRT itu PNS atau bukan, karena PNS itu dikategorikan kedalam sektor jasa.

Tabel 18. Kelemahan Serta Keunggulan Dari Metode yang Digunakan

INDIKATOR	METODE		
	PMT	COMUNITY	HYBRID
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Waktu Pelaksanaan	Relatif Cepat , karena dilaksanakan oleh petugas yang dipilih serta tidak tergantung waktu pendataannya.	Relatif Lebih Lama , karena Harus memenuhi kuota responden yang harus hadir dalam pertemuan	Relatif Lebih Cepat , karena responden yang terpilih lebih sedikit dari ke 2 metode lain.
2. Biaya Pelaksanaan	Relatif Besar , karena membutuhkan petugas yang lebih banyak serta sarana pendukungnya.	Relatif Kecil , karena membutuhkan petugas yang lebih sedikit serta tidak banyak sarana pendukungnya	Relatif lebih kecil dari metode PMT tapi lebih besar dari metode community.
3. Objektivitas Konsep	Objektive	Kurang Objektive	Objektive
4. Complains Massa	Relatif Banyak	Relatif tidak ada	Relatif Kecil
5. Akurasi Data	Lebih Akurat	Kurang Akurat	Sangat Akurat
6. Kriteria Kemiskinan	Sama antar kecamatan, desa, atau SLS	Tidak sama antar kec, desa, atau SLS	Sama antar kec, desa, atau SLS
7. Pemeringkatan	Bisa dibandingkan antar kecamatan, desa, atau SLS	Tidak bisa dibandingkan antar kec, desa, atau SLS	Bisa dibandingkan antar kecamatan, desa, atau SLS

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1. DAFTAR SAMPEL KECAMATAN DAN DESA TERPILIH PENENTUAN PERINGKAT KESEJAHTERAAN (P2K08) DAN METODE YANG DIGUNAKAN

PR	KB	KC	DS	Nama Desa/Kelurahan	Drh	Nama SLS	Wilker	Metode	Kuota
12	15			HUMBANG HASUNDUTAN					
12	15	040		DOLOK SANGGUL					
12	15	040	001	SOSOR TAMBOK	2	DUSUN 1	1	Hybrid	30
12	15	040	002	SIHITE II	2	DUSUN 2	2	Komunitas	28
12	15	040	003	PURBA DOLOK	2	DUSUN 3	3	Hybrid	45
12	15	040	004	LUMBAN PURBA	2	DUSUN 1	4	Hybrid	16
12	15	040	005	SIMARIGUNG	2	DUSUN 2	5	PMT	19
12	15	040	006	SAITNIHUTA	2	DUSUN 2	6	Hybrid	72
12	15	040	007	AEK LUNG	2	DUSUN 3	7	Hybrid	30
12	15	040	008	PURBA MANALU	2	DUSUN 2 LINGKUNGAN 8	8	Komunitas	52
12	15	040	009	PAKKAT	2	DUSUN 3	9	Komunitas	52
12	15	040	013	JANJI	2	DUSUN 2 LINGKUNGAN 13	10	PMT	12
12	15	040	014	SIHITE I	2	DUSUN 2	11	Hybrid	34
12	15	040	015	HUTA BAGASAN	2	DUSUN 3 LINGKUNGAN 15	12	Komunitas	32
12	15	040	016	MATITI II	2	DUSUN 3	13	Hybrid	34
12	15	040	017	MATITI I	2	DUSUN 1 LINGKUNGAN 7	14	PMT	44
12	15	040	018	HUTA GURGUR	2	DUSUN 4	15	PMT	20
12	15	040	019	SAMPEAN	2	DUSUN 2	16	PMT	35
12	15	040	020	SILAGA LAGA	2	DUSUN 1	17	Komunitas	105
12	15	040	021	SIRISIRISI	2	DUSUN 3 LINGKUNGAN 21	18	Hybrid	47
12	15	040	023	SILEANG	2	DUSUN 1	19	Komunitas	59
12	15	040	024	SOSOR GONTING	2	DUSUN 2	20	Komunitas	40
12	15	040	025	HUTARAJA	2	DUSUN 3	21	PMT	41
12	15	040	026	PAK SINOMBA	2	DUSUN 2	22	PMT	38
12	15	040	027	SIMANGARONSANG	2	DUSUN 2	23	Komunitas	25
12	15	050		LINTONG NIHUTA					
12	15	050	001	HUTASOIT I	2	DUSUN 7	24	Komunitas	17
12	15	050	002	LOBUTUA	2	DUSUN 1 LINGKUNGAN 2	25	Komunitas	26
12	15	050	003	PARGAULAN	2	DUSUN 1 LINGKUNGAN 3	26	PMT	24
12	15	050	004	NAGA SARIBU I	2	DUSUN 4 LINGKUNGAN 4	27	Hybrid	19
12	15	050	016	SITOLU BAHAL	2	DUSUN 3 LINGKUNGAN 16	28	Komunitas	22
12	15	050	017	TAPIAN NAULI	2	DUSUN 2 LINGKUNGAN 17	29	Hybrid	30
12	15	050	020	SITIO II	2	DUSUN 2 LINGKUNGAN 20	30	Hybrid	19
12	15	050	021	HUTASOIT II	2	DUSUN 2 LINGKUNGAN 21	31	Komunitas	15
12	15	050	022	BONAN DOLOK	2	DUSUN 1	32	PMT	8
12	15	050	023	SIGOMPUL	2	DUSUN 3	33	PMT	4

12	15	050	024	NAGASARIBU IV	2	DUSUN 5	34	PMT	7
12	15	050	025	NAGASARIBU V	2	DUSUN 1 LINGKUNGAN 25	35	Hybrid	20
12	15	050	028	PARULOHAN	2	DUSUN 3 LINGKUNGAN 28	36	Hybrid	11
12	15	050	029	HABEAHAN	2	DUSUN 1 LINGKUNGAN 29	37	Komunitas	15
12	18			SERDANG BEDAGAI					
12	18	011		SILINDA					
12	18	011	002	TAREAN	2	DUSUN 4	38	PMT	26
12	18	011	003	TAPAK MERIAH	2	DUSUN 2	39	PMT	4
12	18	011	005	PERKEBUNAN SILINDAK	1	DUSUN 1	40	Komunitas	2
12	18	011	006	DEMAK GELUGUR	2	DUSUN 1	41	Hybrid	6
12	18	011	007	KULASAR	2	DUSUN 4	42	Hybrid	17
12	18	011	008	SUNGAI BUAYA	2	DUSUN 3	43	PMT	4
12	18	012		BINTANG BAYU					
12	18	012	004	SARANG GINTING HULU	2	DUSUN 2	45	Hybrid	5
12	18	012	009	BANDAR NAGODANG	2	DUSUN 1	46	PMT	13
12	18	012	012	UJUNG NEGERI HULU	2	DUSUN 2	47	PMT	7
12	18	012	013	UJUNG NEGERI KAHAN	2	DUSUN 1	48	Hybrid	10
12	18	012	014	BANDAR NEGERI	2	DUSUN 3	49	Komunitas	10
12	18	012	015	MARIHAT DOLOK	2	DUSUN 1	50	Komunitas	12
12	18	012	016	HUTA DURIAN	2	DUSUN 1	51	Komunitas	16
12	18	012	019	PANOMBEAN	2	DUSUN 2	52	Hybrid	13
12	18	020		DOLOK MASIHUL					
12	18	020	002	BAH KERAPUH	1	DUSUN 1	53	Hybrid	6
12	18	020	011	PEKAN DOLOK MASIHUL	1	LINGKUNGAN 4	54	Hybrid	5
12	18	020	012	ARAS PANJANG	1	DUSUN 1	55	PMT	32
12	18	021		SERBA JADI					
12	18	021	006	SERBAJADI	1	DUSUN 3	56	PMT	4
12	18	030		SIPISPIS					
12	18	030	001	RIMBUN	2	DUSUN 1 (SIARIBUT)	57	PMT	37
12	18	030	002	MARIAH NAGUR	2	DUSUN 3	58	Komunitas	15
12	18	030	003	PARLAMBEAN	2	DUSUN 1	59	PMT	8
12	18	030	005	TINOKKAH	2	DUSUN 6	60	Komunitas	26
12	18	030	006	BARTONG	2	DUSUN 1	61	Hybrid	31
12	18	030	007	NAGUR PANE	1	DUSUN 1 (PONDOK UJUNG)	62	Komunitas	12
12	18	030	008	BAJA DOLOK	2	DUSUN 3 (PARLAJARAN)	63	PMT	14
12	18	030	009	PISPIS	2	DUSUN 4 (PISPIS KAMPUNG)	64	PMT	16
12	18	030	012	SIPISPIS	2	DUSUN 2	65	Komunitas	20
12	18	030	013	SILAU PADANG	2	DUSUN 4 (SIBORAS)	66	Komunitas	7
12	18	030	014	MARJANJI	2	DUSUN 7 (LUBUK BARU)	67	Hybrid	3
12	18	030	015	BULUH DURI	1	DUSUN 6	68	Komunitas	33
12	18	030	017	DAMAK KURAT	2	DUSUN 7 (PARBAHINGAN)	69	Hybrid	9
12	18	030	018	SIMALAS	2	DUSUN 6. (TG PADANG)	70	Hybrid	45

12	18	030	019	SIBARAU (SIBANGU)	2	DUSUN 1	71	Komunitas	18
12	18	030	020	GUNUNG PANE	2	DUSUN 2 (PONDOK LIMA)	72	Hybrid	13
12	18	040		DOLOK MERAWAN					
12	18	040	001	NAGARAJA	2	DUSUN 1	73	Hybrid	8
12	18	040	003	PANGLONG	2	DUSUN 4	74	PMT	9
12	18	040	004	GUNUNG PARA	1	DUSUN 4	75	PMT	34
12	18	040	006	PARITOKAN	2	SLS DIBAWAH DESA TIDAK ADA	76	Komunitas	20
12	18	040	007	KALEMBAK	2	DUSUN 2	77	Hybrid	7
12	18	040	008	BANDARAWAN	2	DUSUN 3	78	Komunitas	9
12	18	040	010	PABATU I	2	DUSUN 2	79	Komunitas	16
12	18	040	011	PABATU II	2	DUSUN 2	80	PMT	9
12	18	040	012	MAINU TONGAH	2	DUSUN 3	81	PMT	22
12	18	040	013	AFDELING VI DOLOK ILIR	2	SLS DIBAWAH DESA TIDAK ADA	82	Hybrid	11
12	18	040	014	AFDELING VII DOLOK ILIR	2	SLS DIBAWAH DESA TIDAK ADA	83	PMT	16
12	18	040	015	BAH DAMAR	2	DUSUN 1	84	Komunitas	16
12	18	040	016	PABATU III	2	DUSUN 1	85	Komunitas	7
12	18	040	017	KORAJIM	2	DUSUN 1	86	Hybrid	8
12	18	050		TEBING TINGGI					
12	18	050	001	NAGA KESIANGAN	2	DUSUN 4	44	Komunitas	12
12	18	050	002	GUNUNG KATARAN	2	DUSUN 2	87	PMT	14
12	18	050	011	BAH SUMBU	2	DUSUN 8 (KARYA TANI)	88	Hybrid	3
12	18	050	012	JAMBU	2	DUSUN 3(PONDOK DUA)	89	Komunitas	5
12	18	050	013	MARIAH PADANG	2	DUSUN 5 (BANDAR PADANG)	90	PMT	17
12	18	050	014	PERTAPAAAN	2	DUSUN 6 (PERTAPAAAN)	91	Komunitas	20
12	18	050	016	PAYA BAGAS	2	DUSUN 5	92	Hybrid	10
12	18	050	023	PAYA MABAR	2	DUSUN 3 (KAMPUNG SEJATI)	93	Hybrid	12
12	18	051		TEBING SYAHBANDAR					
12	18	051	001	SIBULAN	2	DUSUN 1 RW 1 RT 1	94	Komunitas	2
12	18	051	002	BAHILANG	2	DUSUN 2	95	Hybrid	5
12	18	051	003	PENGGALIAN	2	DUSUN 4	96	Komunitas	18
12	18	051	007	TANAH BESI	2	DUSUN 6	97	Hybrid	14
12	18	051	008	PAYA PASIR	1	DUSUN 7	98	PMT	14
12	18	070		TANJUNG BERINGIN					
12	18	070	004	BAGAN KUALA	2	DUSUN 2	99	Komunitas	53
12	18	070	008	SUKAJADI	2	DUSUN 2	100	Hybrid	58
12	18	090		TELUK MENGKUDU					
12	18	090	004	MATAPAO	1	DUSUN 3	101	PMT	8
12	18	090	005	MAKMUR	2	DUSUN 4	102	PMT	12
12	18	100		PERBAUNGAN					
12	18	100	010	ADOLINA	2	DUSUN 3	103	PMT	34
12	18	100	011	MELATI DUA	2	DUSUN 2 RW 2 RT 3	104	Hybrid	5
12	18	100	013	TANJUNG BULUH	2	DUSUN 1	105	PMT	9
12	18	100	016	DELI MUDA ULU	1	DUSUN 1	106	PMT	10

12	18	100	027	DELI MUDA ILIR	1	DUSUN 2	107	Hybrid	20
12	18	100	029	LUBUK BAYAS	2	DUSUN 2	108	Hybrid	35
12	18	100	030	SUNGAI NAGA LAWAN	2	DUSUN 1	109	PMT	16
12	18	100	031	LUBUK ROTAN	2	DUSUN 2	110	Komunitas	47
12	18	100	037	CINTA AIR	2	DUSUN 4	111	Komunitas	10
12	18	100	038	PEMATANG SIJONAM	2	DUSUN 3	112	Komunitas	26
12	18	100	039	LUBUK CEMARA	2	DUSUN 1	113	Komunitas	30
12	18	100	041	SUKA JADI	2	DUSUN 2	114	Hybrid	14
12	18	101		PEGAJAHAN					
12	18	101	007	MELATI KEBON	1	LINGKUNGAN 5	115	PMT	2
12	18	101	012	JATI MULYO	1	DUSUN 4 RT 1	116	Hybrid	11
12	18	110		PANTAI CERMIN					
12	18	110	001	UJUNG RAMBUNG	1	DUSUN 9 (BAKARAN BATU)	117	Hybrid	18
12	18	110	005	ARA PAYUNG	1	DUSUN 5	118	Komunitas	18
12	18	110	009	KUALA LAMA	1	DUSUN 9	119	Hybrid	8
12	73			PEMATANG SIANTAR					
12	73	010		SIANTAR MARIHAT					
12	73	010	001	SIMARIMBUN	1	DUSUN SIDOMULYO	120	Komunitas	21
12	73	010	002	NAGA HUTA	1	LINGKUNGAN 2 RW 5 RT 13	121	PMT	16
12	73	010	003	PEMATANG MARIHAT	1	LINGKUNGAN 1 RW 6 RT 8	122	Komunitas	37
12	73	010	004	SUKAMAJU	1	LINGKUNGAN 2 RW 7 RT 18	123	Hybrid	21
12	73	010	005	PARDAMEAN	1	LINGKUNGAN 1 RW 2 RT 8	124	Hybrid	28
12	73	010	006	SUKARAJA	1	LINGKUNGAN 1 RW 2 RT 1	125	Hybrid	22
12	73	010	007	BP NAULI	1	DUSUN KAKI GUNUNG LINGKUNGAN 1 RW 1 RT 1	126	PMT	41
12	73	020		SIANTAR SELATAN					
12	73	020	001	AEK NAULI	1	LINGKUNGAN 2 RW 5 RT 14	127	Komunitas	20
12	73	020	002	MARTIMBANG	1	LINGKUNGAN 2 RW 4 RT 10	128	Hybrid	16
12	73	020	003	KRISTEN	1	LINGKUNGAN 1 RW 2 RT 6	129	PMT	12
12	73	020	004	TOBA	1	LINGKUNGAN 1 RW 3 RT 5	130	Hybrid	9
12	73	020	005	KARO	1	LINGKUNGAN 2 RW 4 RT 10	131	PMT	8
12	73	020	006	SIMALUNGUN	1	LINGKUNGAN 1 RW 2 RT 5	132	Komunitas	8
12	73	030		SIANTAR BARAT					
12	73	030	001	SIPINGGOL PINGGOL	1	LINGKUNGAN 1 RW 3 RT 3	133	Hybrid	15
12	73	030	002	TELADAN	1	LINGKUNGAN 2 RW 3 RT 1	134	PMT	6
12	73	030	003	DWIKORA	1	LINGKUNGAN 2 RW 10 RT 1	135	Hybrid	5
12	73	030	004	PROKLAMASI	1	LINGKUNGAN 2 RW 2 RT 3	136	PMT	29
12	73	030	005	TIMBANG GALUNG	1	LINGKUNGAN 1 RW 2 RT 2	137	Komunitas	5

12	73	030	006	SIMARITO	1	LINGKUNGAN 3 RW 3 RT 1	138	Komunitas	10
12	73	030	007	BANJAR	1	LINGKUNGAN 2 RW 6 RT 1	139	PMT	26
12	73	030	008	BANTAN	1	LINGKUNGAN 2 RW 4 RT 3	140	Komunitas	11
12	73	040		SIANTAR UTARA					
12	73	040	001	MARTOBA	1	LINGKUNGAN 3 RW 3 RT 3	141	PMT	20
12	73	040	002	MELAYU	1	LINGKUNGAN 1 RW 3 RT 1	142	Komunitas	7
12	73	040	003	BARU	1	LINGKUNGAN 1 RW 4 RT 3	143	Hybrid	35
12	73	040	004	SUKA DAME	1	LINGKUNGAN 1 RW 7 RT 1	144	Komunitas	13
12	73	040	005	BANE	1	LINGKUNGAN 1 RW 1 RT 3	145	Hybrid	4
12	73	040	006	SIGULANG GULANG	1	LINGKUNGAN 1 RW 3 RT 3	146	Hybrid	8
12	73	040	007	KAHEAN	1	LINGKUNGAN 2 RW 4 RT 3	147	Komunitas	12
12	73	050		SIANTAR TIMUR					
12	73	050	001	KEBUN SAYUR	1	LINGKUNGAN 1 RW 1 RT 2	148	PMT	9
12	73	050	002	TOMUAN	1	LINGKUNGAN 3 RW 8 RT 25	149	Hybrid	9
12	73	050	003	PAHLAWAN	1	LINGKUNGAN 1 RW 2 RT 2	150	Komunitas	21
12	73	050	004	SIOPAT SUHU	1	LINGKUNGAN 2 RW 4 RT 12	151	Hybrid	9
12	73	050	005	MERDEKA	1	LINGKUNGAN 1 RW 2 RT 3	152	PMT	23
12	73	050	006	PARDOMUAN	1	LINGKUNGAN 1 RW 3 RT 4	153	Komunitas	16
12	73	050	007	ASUHAN	1	LINGKUNGAN 2 RW 3 RT 9	154	Komunitas	17
12	73	060		SIANTAR MARTOBA					
12	73	060	005	SUMBER JAYA	1	LINGKUNGAN 1 RW 1 RT 2	155	PMT	10
12	73	060	006	NAGA PITA.	1	LINGKUNGAN 1 RW 2 RT 2	156	PMT	9
12	73	060	007	PONDOK SAYUR	1	LINGKUNGAN 3 RW 2 RT 3	157	Komunitas	10
12	73	060	008	TAMBUN NABOLON	1	LINGKUNGAN 4 RW 2 RT 1	158	PMT	11
12	73	061		SIANTAR SITALASARI					
12	73	061	001	BAH KAPUL	1	LINGKUNGAN 1 RW 2 RT 3	159	Komunitas	14
12	73	061	002	GURILLA	1	LINGKUNGAN 1 RW 2 RT 10	160	PMT	5
12	73	061	003	BUKIT SHOFA	1	LINGKUNGAN 1 RW 1 RT 2	161	Hybrid	10
12	73	061	004	SETIA NEGARA	1	LINGKUNGAN 2 RW 3 RT 8	162	Hybrid	7
33	03			PURBALINGGA					
33	03	020		BUKATEJA					
33	03	020	001	TIDU	1	DUSUN 3 RW 3 RT 2	163	Hybrid	21
33	03	020	012	BUKATEJA	1	DUSUN 2 RW 4 RT 1	164	Hybrid	4
33	03	020	013	MAJASARI	1	DUSUN 2 (PALEMAHAN LOR) RW 1 RT 2	165	PMT	11

33	03	050		KALIGONDANG					
33	03	050	011	PENARUBAN	1	DUSUN 4 RW 9 RT 3	166	Komunitas	11
33	03	050	012	KALIKAJAR	1	DUSUN 4 RW 6 RT 2	167	Komunitas	10
33	03	060		PURBALINGGA					
33	03	060	001	BOJONG	1	RW 3 RT 7	168	Hybrid	10
33	03	060	002	TOYAREJA	2	DUSUN KARANGSARI KIDUL RW 3 RT 4	169	Hybrid	22
33	03	060	003	KEDUNG MENJANGAN	1	RW 3 RT 2	170	Komunitas	16
33	03	060	004	JATISABA	1	DUSUN 3 RW 3 RT 7	171	Komunitas	32
33	03	060	005	BANCAR	1	RW 4 RT 1	172	Komunitas	24
33	03	060	006	PURBALINGGA WETAN	1	RW 3 RT 3	173	Komunitas	16
33	03	060	007	PENAMBONGAN	1	RW 6 RT 2	174	PMT	16
33	03	060	008	PURBALINGGA KIDUL	1	DUSUN SUDAGARAN RW 4 RT 2	175	PMT	14
33	03	060	009	KANDANG GAMPANG	1	RW 2 RT 1	176	Komunitas	33
33	03	060	010	PURBALINGGA KULON	1	RW 2 RT 1	177	PMT	30
33	03	060	011	PURBALINGGA LOR	1	RW 1 RT 2	178	Hybrid	14
33	03	060	012	KEMBARAN KULON	1	RW 1 RT 1	179	PMT	14
33	03	060	013	WIRASANA	1	RW 1 RT 4	180	Hybrid	38
33	03	070		KALIMANAH					
33	03	070	001	JOMPO	2	DUSUN 2 RW 5 RT 3	181	Hybrid	20
33	03	070	002	RABAK	2	DUSUN 1 RW 3 RT 4	182	PMT	8
33	03	070	003	BLATER	1	DUSUN 1 RW 2 RT 1	183	Komunitas	23
33	03	070	004	SIDAKANGEN	2	DUSUN 1 RW 1 RT 1	184	Hybrid	11
33	03	070	005	KARANGPETIR	1	DUSUN 2 RW 5 RT 2	185	Hybrid	18
33	03	070	006	GRECOL	2	RW 1 RT 5	186	Komunitas	12
33	03	070	007	MEWEK	1	RW 3 RT 2	187	Komunitas	24
33	03	070	008	KARANGMANYAR	1	RW 1 RT 4	188	PMT	16
33	03	070	009	KALIKABONG	1	RW 3 RT 6	189	Komunitas	9
33	03	070	010	SELABAYA	1	DUSUN 2 (SELABAYA) RW 5 RT 5	190	Hybrid	5
33	03	070	011	KALIMANAH WETAN	1	DUSUN 2 RW 7 RT 4	191	PMT	4
33	03	070	012	KALIMANAH KULON	1	DUSUN 2 RW 3 RT 2	192	PMT	20
33	03	070	013	MANDURAGA	2	DUSUN 2 RW 1 RT 5	193	Komunitas	13
33	03	070	014	KARANGSARI	2	DUSUN 1 RW 3 RT 6	194	Komunitas	20
33	03	070	015	KEDUNGWULUH	2	DUSUN 2 RW 2 RT 7	195	PMT	12
33	03	070	016	KLAPASAWIT	1	DUSUN 3 WILANGAN RW 7 RT 1	196	Hybrid	22
33	03	070	017	BABAKAN	1	DUSUN 3 RW 6 RT 21	197	Hybrid	13
33	03	080		PADAMARA					
33	03	080	004	PADAMARA	1	DUSUN 2 RW 2 RT 3	198	Komunitas	6
33	03	080	005	KARANGJAMBE	1	DUSUN 4 RW 4 RT 3	199	PMT	11
33	03	080	006	BOJANEGARA	1	DUSUN 4 RW 4 RT 12	200	Komunitas	8
33	03	080	007	KARANGSENTUL	1	RW 1 RT 1	201	Hybrid	11
33	03	080	008	GEMURUH	1	DUSUN 3 RW 7 RT 1	202	Komunitas	28
33	03	080	009	DAWUHAN	1	DUSUN 1 RW 1 RT 6	203	PMT	15
33	03	080	010	PRIGI	1	DUSUN 2 RW 2 RT 1	204	Hybrid	21
33	03	090		KUTASARI					

33	03	090	001	KARANGLEWAS	2	DUSUN 1 RW 1 RT 2	205	Hybrid	35
33	03	090	002	MUNJUL	2	DUSUN 4 KARANG TENGIL RW 8 RT 16	206	Komunitas	11
33	03	090	003	KARANGKLESEM	2	DUSUN 2 RW 3 RT 8	207	Komunitas	16
33	03	090	004	KUTASARI	1	DUSUN 3 KUTASARI BELAHAN UTARA RW 6 RT 11	208	Komunitas	14
33	03	090	005	SUMINGKIR	2	DUSUN 4 RW 7 RT 17	209	Hybrid	34
33	03	090	006	MERI	1	DUSUN 2 RW 6 RT 14	210	PMT	32
33	03	090	007	KARANGREJA	1	DUSUN 1 RW 3 RT 5	211	PMT	32
33	03	090	008	KARANGAREN	2	DUSUN 1 RW 2 RT 3	212	PMT	36
33	03	090	009	LIMBANGAN	2	DUSUN 3 RW 7 RT 13	213	Hybrid	29
33	03	090	010	CENDANA	2	DUSUN 3 RW 4 RT 6	214	Hybrid	18
33	03	090	011	CANDIWULAN	1	DUSUN 4 RW 6 RT 15	215	Komunitas	33
33	03	090	012	KARANGCEGAK	1	DUSUN 2 RW 5 RT 12	216	PMT	19
33	03	090	013	CANDINATA	2	DUSUN 3 RW 3 RT 6	217	Hybrid	33
33	03	090	014	KARANGJENGKOL	2	DUSUN 1 RW 1 RT 1	218	PMT	35
33	03	100		BOJONGSARI					
33	03	100	001	BROBOT	1	DUSUN 1 RW 1 RT 2	219	Komunitas	29
33	03	100	006	BOJONGSARI	1	DUSUN 2 RW 5 RT 1	220	PMT	11
33	03	100	007	KAJONGAN	1	DUSUN 4 RW 8 RT 3	221	PMT	23
33	03	100	008	KARANGBANJAR	1	DUSUN 4 RW 6 RT 15	222	PMT	13
33	03	141		KERTANEGARA					
33	03	141	001	MARGASANA	1	DUSUN 1 RW 1 RT 2	223	Hybrid	13
33	03	141	002	KERTANEGARA	1	RW 2 RT 2	224	Hybrid	14
33	03	141	005	CONDONG	1	DUSUN CONDONG RW 1 RT 4	225	Komunitas	14
33	12			WONOGIRI					
33	12	010		PRACIMANTORO					
33	12	010	001	SUMBERAGUNG	2	DUSUN 4 NGALURAN RW 1 RT 2	226	Hybrid	10
33	12	010	002	PETIRSARI	2	DUSUN SALAK RW 6 RT 9	227	Hybrid	27
33	12	010	003	JOHO	2	DUSUN DONDONG RW 1 RT 1	228	Komunitas	13
33	12	010	004	GAMBIRMANIS	2	DUSUN SURUHAN RW 1 RT 3	229	Komunitas	23
33	12	010	005	WATANGREJO	2	DUSUN PEPET RW 12 RT 1	230	Hybrid	24
33	12	010	006	SUCI	2	DUSUN POJOK RW 5 RT 1	231	Hybrid	11
33	12	010	007	JIMBAR	2	DUSUN TRUKAN RW 4 RT 2	232	Hybrid	48
33	12	010	008	SAMBIROTO	2	DUSUN SAMBIROTO KIDUL RW 3 RT 1	233	PMT	29
33	12	010	009	PRACIMANTORO	1	DUSUN NGULU TENGAH RW 5 RT 1	234	Komunitas	12
33	12	010	010	GEDONG	2	DUSUN MUNTIL RW 4 RT 3	235	PMT	10
33	12	010	011	GEBANGHARJO	2	DUSUN JATI RW 6 RT 1	236	Hybrid	25
33	12	010	012	SEDAYU	2	DUSUN GUNUNG SARI RW 10 RT 2	237	PMT	22
33	12	010	013	BANARAN	2	DUSUN KEDUNG TEMU RW 5 RT 1	238	Komunitas	15

33	12	010	014	TRUKAN	2	DUSUN GADOG RW 8 RT 2	239	PMT	20
33	12	010	015	TUBOKARTO	2	DUSUN TUBOKARTO RW 8 RT 2	240	Komunitas	14
33	12	010	016	LEBAK	2	DUSUN LEBAK RW 2 RT 2	241	PMT	20
33	12	010	017	GLINGGANG	2	DUSUN KERJO RW 3 RT 7	242	Komunitas	20
33	12	010	018	WONODADI	2	DUSUN KEROK RW 6 RT 1	243	PMT	17
33	12	130		SELOGIRI					
33	12	130	001	KEPATIHAN	2	DUSUN TEGALSARI RW 4 RT 1	244	Hybrid	7
33	12	130	002	KELORAN	2	DUSUN KERNEN RW 4 RT 3	245	Komunitas	7
33	12	130	003	PARE	2	DUSUN GONDANG RW 7 RT 2	246	PMT	8
33	12	130	004	SINGODUTAN	1	DUSUN SINGODUTAN RW 1 RT 2	247	PMT	3
33	12	130	005	KALIANCAR	1	DUSUN GUNUNG WIJIL RW 1 RT 3	248	Komunitas	5
33	12	130	006	JENDI	1	DUSUN NGLEGGONG RW 4 RT 2	249	Komunitas	20
33	12	130	007	PULE	1	DUSUN NGLEDOK RW 7 RT 3	250	PMT	8
33	12	130	008	JATEN	2	DUSUN PRONOGATEN RW 14 RT 1	251	PMT	10
33	12	130	009	GEMANTAR	1	DUSUN NANGGAN RW 1 RT 4	252	Hybrid	8
33	12	130	010	NAMBANGAN	1	DUSUN GADUNGAN RW 3 RT 2	253	Komunitas	12
33	12	130	011	SENDANGIJO	2	DUSUN NGAWEN RW 2 RT 2	254	Hybrid	4
33	12	230		JATIPURNO					
33	12	230	001	GIRIYOSO	2	DUSUN DUKUNAN RW 4 RT 3	255	Hybrid	12
33	12	230	002	KOPEN	2	DUSUN PAGUTAN RW 13 RT 1	256	Hybrid	9
33	12	230	003	JATIPURNO	1	DUSUN PULE/LINGKUNGAN 3 RW 3 RT 2	257	PMT	9
33	12	230	004	TAWANGREJO	2	DUSUN TAWANGSARI RW 6 RT 13	258	PMT	16
33	12	230	005	JATIPURWO	2	DUSUN GUGUR RW 3 RT 2	259	Komunitas	17
33	12	230	006	SLOGORETNO	2	DUSUN SIDOWAYAH RW 5 RT 1	260	PMT	9
33	12	230	007	KEMBANG	2	DUSUN GOLO RW 4 RT 4	261	Komunitas	27
33	12	230	008	GIRIMULYO	2	DUSUN PLALAR RW 3 RT 7	262	Hybrid	26
33	12	230	009	BALEPANJANG	2	DUSUN LINGKUNGAN 2 RW 2 RT 1	263	PMT	24
33	12	230	010	JEPORO	2	DUSUN BANAR KIDUL RW 3 RT 1	264	Komunitas	25
33	12	230	011	MANGUNHARJO	2	DUSUN SANANAN RW 4 RT 1	265	Komunitas	24
33	21			DEMAK					
33	21	010		MRANGGEN					
33	21	010	004	KANGKUNG	1	DUSUN KRAJAN RW 2 RT 6	266	PMT	26

33	21	010	006	KEMBANGARUM	1	DUSUN JAWONG RW 3 RT 2	267	Hybrid	14
33	21	010	007	MRANGGEN	1	RW 6 RT 10	268	Hybrid	8
33	21	010	008	BATURSARI	1	DUSUN TLOGO RW 8 RT 4	269	PMT	14
33	21	010	009	BANDUNGREJO	1	DUSUN BANDUNG RW 4 RT 2	270	Komunitas	16
33	21	010	010	BRUMBUNG	1	DUSUN BRUMBUNG RW 2 RT 8	271	PMT	18
33	21	010	011	NGEMPLAK	1	DUSUN NGEMPAK RW 2 RT 11	272	Hybrid	18
33	21	010	013	KARANGSONO	1	DUSUN KARANGGAWANG RW 2 RT 3	273	Komunitas	25
33	21	010	015	TEGALARUM	2	DUSUN NGUMPUL RW 2 RT 1	274	Hybrid	47
33	21	010	016	WARU	2	DUSUN WARU KALIMAS RW 7 RT 2	275	Komunitas	8
33	21	040		SAYUNG					
33	21	040	001	JETAKSARI	1	DUSUN KRAJAN RW 4 RT 1	276	PMT	50
33	21	040	002	DOMBO	1	DUSUN PRABALAN TIMUR 2 RW 4 RT 2	277	Komunitas	42
33	21	040	003	BULUSARI	2	DUSUN PENJOR RW 2 RT 3	278	Komunitas	51
33	21	040	004	PERAMPELAN	2	RW 2 RT 2	279	Komunitas	15
33	21	040	005	KARANGASEM	1	DUSUN BUGEL RW 3 RT 5	280	PMT	29
33	21	040	006	KALISARI	2	DUSUN KRAJAN SELATAN RW 4 RT 1	281	Komunitas	27
33	21	040	007	SAYUNG	1	DUSUN SAYUNG KULON RW 4 RT 1	282	PMT	19
33	21	040	008	TAMBAKROTO	2	DUSUN PENTALAN RW 3 RT 2	283	PMT	17
33	21	040	009	PILANGSARI	2	DUSUN PILANG RW 5 RT 2	284	PMT	19
33	21	040	010	LOIRENG	2	DUSUN LOIRENG RW 1 RT 3	285	PMT	7
33	21	040	011	GEMULAK	2	DUSUN REJOSARI BARU RW 5 RT 2	286	PMT	14
33	21	040	012	SIDOGEMAH	1	DUSUN DOPANG RW 3 RT 3	287	Hybrid	21
33	21	040	013	PURWOSARI	1	DUSUN DELES RW 5 RT 2	288	Hybrid	12
33	21	040	014	SRIWULAN	1	DUSUN SRIWULAN RW 1 RT 8	289	Komunitas	14
33	21	040	015	BEDONO	2	DUSUN BEDONO RW 1 RT 6	290	Komunitas	32
33	21	040	016	TIMBULSLOKO	2	DUSUN TIMBUL SLOKO RW 7 RT 3	291	Hybrid	17
33	21	040	017	TUGU	2	DUSUN DEMPET RW 3 RT 4	292	Hybrid	25
33	21	040	018	SIDOREJO	2	DUSUN KARANG WANU RW 4 RT 3	293	Hybrid	19
33	21	040	019	BANJARSARI	2	DUSUN BRANGSONG RW 3 RT 1	294	Komunitas	51
33	21	040	020	SURODADI	2	DUSUN BARU RW 4 RT 1	295	Hybrid	27
33	21	050		KARANG TENGAH					
33	21	050	001	SAMPANG	2	DUSUN NGRAPAH RW 4 RT 1	296	PMT	21

33	21	050	002	KLITIH	2	RW 3 RT 2	297	Hybrid	14
33	21	050	003	PIDODO	2	DUSUN TINGALASARI RW 3 RT 4	298	Komunitas	17
33	21	050	004	DONOREJO	2	DUSUN LENGKONG WETAN RW 5 RT 4	299	Komunitas	17
33	21	050	005	GROGOL	2	DUSUN TEMPEL RW 3 RT 6	300	Hybrid	14
33	21	050	006	PLOSO	1	RW 2 RT 2	301	PMT	14
33	21	050	007	PULOSARI	1	DUSUN AGUNG BOYO RW 2 RT 6	302	PMT	7
33	21	050	009	KARANGTOWO	1	DUSUN KARANGGAWE RW 3 RT 4	303	PMT	12
33	21	050	010	DUKUN	2	DUSUN DUKUNKRAJA RW 2 RT 2	304	Komunitas	28
33	21	050	011	KEDUNGUTER	2	DUSUN KEDUNGUTER RW 1 RT 3	305	Hybrid	20
33	21	050	012	BATU	2	DUSUN WONODADI RW 7 RT 1	306	Hybrid	11
33	21	050	013	WONOKERTO	2	DUSUN KRAJAN WONOKERTO RW 1 RT 1	307	PMT	18
33	21	050	014	WONOWOSO	2	DUSUN PERUM GRIYA WONOWOSO PERMAI RW 7 RT 1	308	Komunitas	14
33	21	050	015	REJOSARI	2	DUSUN DUKUH DALASEM RW 4 RT 3	309	Komunitas	15
33	21	050	016	WONOAGUNG	2	DUSUN WANDI AGUNG RW 8 RT 2	310	Hybrid	10
33	21	050	017	TAMBAKBULUSAN	2	DUSUN TAMBAK BULUSAN RW 2 RT 1	311	Hybrid	9
33	24			KENDAL					
33	24	080		KALIWUNGU					
33	24	080	007	KUMPUL REJO	1	RW 3 RT 3	312	PMT	22
33	24	080	008	KARANGTENGAH	1	DUSUN KARANG TENGAH RW 2 RT 3	313	Hybrid	47
33	24	080	009	SARIREJO	1	DUSUN SEKOPEK WETAN	314	Hybrid	6
33	24	080	010	KRAJAN KULON	1	DUSUN DUSUN I RW 10 RT 1	315	PMT	10
33	24	080	011	KUTOHARJO	1	DUSUN NGAGLIK RW 9 RT 5	316	PMT	9
33	24	080	012	NOLOKERTO	1	DUSUN KWAYUHAN BARAT RW 5 RT 9	317	Hybrid	21
33	24	080	013	SUMBEREJO	2	DUSUN SUKING RW 3 RT 8	318	Komunitas	13
33	24	080	014	MOROREJO	2	DUSUN GAYAMAN RW 2 RT 3	319	Komunitas	30
33	24	080	015	WONOREJO	2	DUSUN PANGGANG AYOM	320	Komunitas	34
33	24	090		BRANGSONG					
33	24	090	001	TUNGGULSARI	2	DUSUN KEDUNG PUCUNG RW 6 RT 3	321	Hybrid	22
33	24	090	002	SUMUR	2	DUSUN SUMUR RW 5 RT 2	322	Komunitas	18
33	24	090	003	PENJALIN	2	DUSUN KARANG SARI RW 2 RT 1	323	PMT	27
33	24	090	004	KERTOMULYO	1	DUSUN PAGUWONO RW 1 RT 2	324	Komunitas	22
33	24	090	005	BLOKOK	1	DUSUN PUJIREJO RW 2 RT 2	325	Hybrid	33
33	24	090	006	SIDOREJO	1	DUSUN KALIRAJAN RW	326	PMT	15

						1 RT 1			
33	24	090	007	TOSARI	1	DUSUN TOPBOYO RW 4 RT 1	327	Komunitas	29
33	24	090	008	REJOSARI	1	DUSUN CANGKRING RW 5 RT 5	328	Hybrid	20
33	24	090	009	TURUNREJO	1	DUSUN TURUNSIH RW 9 RT 9	329	Komunitas	25
33	24	090	010	PURWOKERTO	2	DUSUN BOBERAN RW 3 RT 4	330	PMT	25
33	24	090	011	BRANGSONG	1	DUSUN GEMPUL BAPANG RW 1 RT 2	331	Hybrid	16
33	24	090	012	KEBON ADEM	1	DUSUN JAPANG RW 1 RT 3	332	PMT	19
33	24	120		WELERI					
33	24	120	001	SIDOMUKTI	1	DUSUN KAMPUNG BARU RW 6 RT 3	333	Hybrid	12
33	24	120	016	MONTONG SARI	1	DUSUN MONTONG KULON RW 5 RT 4	334	Komunitas	10
33	24	130		ROWOSARI					
33	24	130	001	TAMBAKSARI	1	DUSUN TAMBAK ROTO RW 5 RT 5	335	Hybrid	11
33	24	130	002	TANJUNGSARI	1	DUSUN PAGUJURAN RW 3 RT 3	336	Komunitas	27
33	24	130	003	PARAKAN	2	DUSUN CANGKRING RW 3 RT 2	337	Hybrid	12
33	24	130	004	WONOTENGGANG	2	DUSUN WONOTENGGANG RW 3 RT 5	338	PMT	9
33	24	130	005	RANDUSARI	2	DUSUN BANJAR TENGAH RW 3 RT 2	339	Komunitas	20
33	24	130	006	KARANGSARI	2	DUSUN BOTOTUMPANG RW 3 RT 2	340	PMT	36
33	24	130	007	TANJUNGANOM	1	DUSUN BANTARAN RW 1 RT 2	341	Hybrid	22
33	24	130	008	SENDANGDAWUHAN	1	DUSUN GILISARI RW 1 RT 4	342	PMT	7
33	24	130	009	POJOKSARI	2	DUSUN POJOKSARI RW 2 RT 1	343	PMT	15
33	24	130	010	KEBONSARI	2	DUSUN PILANG RW 3 RT 1	344	Komunitas	26
33	24	130	011	BULAK	2	DUSUN GUNUNG SARI RW 6 RT 2	345	Hybrid	12
33	24	130	012	GEBANGANOM	2	DUSUN BRUNGKAHJATI RW 4 RT 2	346	PMT	26
33	24	130	013	ROWOSARI	1	DUSUN SARIBARU RW 4 RT 2	347	Hybrid	17
33	24	130	014	JATIPURWO	2	DUSUN KEBUNWARU RW 2 RT 4	348	Hybrid	28
33	24	130	015	GEMPOLSEWU	1	DUSUN TAWANGBARAT RW 3 RT 4	349	Komunitas	8
33	24	130	016	SENDANG SIKUCING	2	DUSUN KRAJAN BARAT RW 1 RT 2	350	Komunitas	17
33	24	140		KANGKUNG					
33	24	140	001	SENDANGKULON	2	DUSUN SENDANGKIDUL RW 2 RT 3	351	Komunitas	23
33	24	140	002	SENDANGDAWUNG	2	DUSUN SENDANGWETAN RW 2 RT 5	352	PMT	13
33	24	140	003	SUKODADI	2	DUSUN WONOSARI RW	353	Hybrid	17

						2 RT 6			
33	24	140	004	KALIYOSO	2	DUSUN KALIOMBO RW 3 RT 5	354	PMT	14
33	24	140	005	GEBANGANOM WETAN	2	RW 1 RT 3	355	Komunitas	9
33	24	140	006	KADILANGU	2	DUSUN KATEK RW 3 RT 3	356	Hybrid	10
33	24	140	007	TRUKO	1	DUSUN POLAMAN RW 5 RT 3	357	PMT	9
33	24	140	008	LEBOSARI	2	DUSUN KRAJAN LOR RW 3 RT 1	358	Komunitas	13
33	24	140	009	KANGKUNG	2	DUSUN BALONG RW 1 RT 1	359	PMT	2
33	24	140	010	LABAN	2	DUSUN SUWARU RW 2 RT 3	360	PMT	8
33	24	140	011	KARANGMALANG WETAN	2	RW 3 RT 4	361	Hybrid	15
33	24	140	012	JUNGSEMI	2	DUSUN CLUMPRIT RW 2 RT 4	362	Hybrid	13
33	24	140	013	TANJUNGMOJO	2	DUSUN WEDARI RW 5 RT 2	363	Hybrid	5
33	24	140	014	REJOSARI	2	RW 3 RT 3	364	Komunitas	9
33	24	140	015	KALIREJO	2	DUSUN KALIBALEK RW 5 RT 6	365	Komunitas	9
33	24	160		PATEBON					
33	24	160	001	LANJI	2	DUSUN PILANG RW 3 RT 2	366	PMT	7
33	24	160	002	DONOSARI	2	DUSUN LONGOK RW 1 RT 3	367	Komunitas	10
33	24	160	003	MARGOSARI	2	DUSUN JEMBANGAN RW 3 RT 3	368	PMT	15
33	24	160	004	BULUGEDE	2	DUSUN BULUWETAN RW 3 RT 7	369	Komunitas	4
33	24	160	005	TAMBAKREJO	2	DUSUN KLEGO RW 1 RT 5	370	PMT	15
33	24	160	006	KEBONHARJO	1	DUSUN BABATAN KIDUL RW 6 RT 2	371	Komunitas	3
33	24	160	007	PURWOSARI	1	DUSUN MARONGWETAN RW 5 RT 23	372	Hybrid	10
33	24	160	008	JAMBEARUM	1	DUSUN BULAK RW 6 RT 4	373	Komunitas	6
33	24	160	009	PURWOKERTO	1	DUSUN SUKUP KULON RW 6 RT 4	374	Komunitas	13
33	24	160	010	SUKOLILAN	2	RW 1 RT 2	375	Hybrid	9
33	24	160	011	BANGUNREJO	2	DUSUN KENCANASARI RW 1 RT 3	376	Komunitas	18
33	24	160	012	KUMPULREJO	2	DUSUN DUSUN II RW 3 RT 4	377	Hybrid	10
33	24	160	013	MAGERSARI	2	RW 1 RT 1	378	Hybrid	9
33	24	160	014	WONOSARI	2	DUSUN NGEMPLAK RW 2 RT 2	379	PMT	8
33	24	160	015	KARTIKAJAYA	2	DUSUN TANJUNG MULYO	380	PMT	3
33	24	160	016	BANGUNSARI	2	DUSUN BANGUNSARI RW 1 RT 6	381	PMT	7
33	24	160	017	PIDODO WETAN	2	DUSUN PIDODO RW 2 RT 2	382	Hybrid	8
33	24	160	018	PIDODO KULON	2	DUSUN KAUMAN RW 3 RT 3	383	Hybrid	3
33	24	170		KOTA KENDAL					
33	24	170	001	SUKODONO	1	RW 2 RT 7	384	PMT	9

33	24	170	002	CANDIROTO	1	RW 2 RT 4	385	Komunitas	17
33	24	170	003	TROMPO	1	RW 3 RT 11	386	PMT	22
33	24	170	004	JOTANG	1	RW 1 RT 2	387	Hybrid	49
33	24	170	005	TUNGGULREJO	1	RW 1 RT 4	388	PMT	14
33	24	170	006	SIJERUK	1	RW 2 RT 1	389	Hybrid	26
33	24	170	007	JETIS	1	RW 1 RT 3	390	Komunitas	23
33	24	170	008	BUGANGIN	1	RW 1 RT 4	391	Komunitas	14
33	24	170	009	LANGENHARJO	1	RW 7 RT 4	392	Hybrid	8
33	24	170	010	KALIBUNTU WETAN	1	RW 1 RT 3	393	Komunitas	18
33	24	170	011	KEBONDALEM	1	RW 1 RT 3	394	Hybrid	9
33	24	170	012	KETAPANG	1	RW 3 RT 8	395	PMT	25
33	24	170	013	BANYUTOWO	1	RW 5 RT 9	396	Hybrid	53
33	24	170	014	KARANG SARI	1	RW 5 RT 5	397	Komunitas	14
33	24	170	015	PATUKANGAN	1	RW 3 RT 9	398	Hybrid	13
33	24	170	016	PEGULON	1	RW 4 RT 10	399	PMT	8
33	24	170	017	PAKAUMAN	1	RW 2 RT 2	400	PMT	9
33	24	170	018	NGILIR	1	RW 1 RT 6	401	Hybrid	9
33	24	170	019	BALOK	1	RW 1 RT 3	402	Komunitas	29
33	24	170	020	BANDENGAN	1	RW 3 RT 3	403	Komunitas	17
33	74			SEMARANG					
33	74	010		MIJEN					
33	74	010	001	CANGKIRAN	1	RW 3 RT 3	404	PMT	8
33	74	010	007	JATISARI	1	RW 11 RT 3	405	Komunitas	4
33	74	010	008	MIJEN	1	RW 4 RT 2	406	PMT	2
33	74	030		BANYUMANIK					
33	74	030	001	PUDAKPAYUNG	1	RW 11 RT 3	407	Hybrid	3
33	74	030	002	GEDAWANG	1	RW 3 RT 5	408	Komunitas	4
33	74	030	004	PADANGSARI	1	RW 7 RT 5	409	Komunitas	3
33	74	030	005	BANYUMANIK	1	RW 4 RT 3	410	Hybrid	5
33	74	030	006	SRONDOL WETAN	1	RW 1 RT 9	411	PMT	7
33	74	030	007	PEDALANGAN	1	RW 5 RT 3	412	PMT	8
33	74	030	008	SUMURBOTO	1	RW 3 RT 3	413	PMT	22
33	74	030	009	SRONDOL KULON	1	RW 9 RT 6	414	Komunitas	3
33	74	030	010	TINJOMOYO	1	RW 5 RT 7	415	Hybrid	4
33	74	030	011	NGESREP	1	RW 9 RT 7	416	Hybrid	4
33	74	040		GAJAHMUNGKUR					
33	74	040	001	SAMPANGAN	1	RW 3 RT 5	417	Komunitas	1
33	74	040	002	BENDAN DUWUR	1	RW 2 RT 3	418	Hybrid	1
33	74	040	003	KARANG REJO	1	RW 3 RT 2	419	Hybrid	4
33	74	040	004	GAJAHMUNGKUR	1	RW 9 RT 3	420	Komunitas	4
33	74	040	005	BENDAN NGISOR	1	RW 4 RT 4	421	PMT	4
33	74	040	006	PETOMPON	1	RW 1 RT 6	422	Komunitas	9
33	74	040	007	BENDUNGAN	1	RW 1 RT 5	423	PMT	6
33	74	040	008	LEMPONGSARI	1	RW 5 RT 4	424	PMT	3
33	74	090		GENUK					
33	74	090	001	MUKTIHARJO LOR	1	RW 3 RT 2	596	Komunitas	19

33	74	090	011	TRIMULYO	1	RW 2 RT 1	619	Komunitas	26
33	74	090	013	TERBOYO KULON	1	RW 1 RT 2	425	Hybrid	4
33	74	100		GAYAMSARI					
33	74	100	001	PANDEAN LAMPER	1	RW 3 RT 4	426	PMT	2
33	74	100	002	GAYAMSARI	1	RW 3 RT 4	427	Komunitas	6
33	74	100	003	SIWALAN	1	RW 4 RT 2	428	PMT	21
33	74	100	004	SAMBIREJO	1	RW 5 RT 5	429	Komunitas	4
33	74	100	005	SAWAHBESAR	1	RW 3 RT 4	430	Hybrid	5
33	74	100	006	KALIGawe	1	RW 7 RT 3	431	Hybrid	7
33	74	100	007	TAMBAKREJO	1	RW 2 RT 3	432	PMT	11
33	74	140		SEMARANG BARAT					
33	74	140	001	KEMBANGARUM	1	RW 1 RT 4	433	PMT	3
33	74	140	002	MANYARAN	1	RW 9 RT 6	434	PMT	8
33	74	140	003	NGEMPLAKSIMONGAN	1	RW 3 RT 4	435	Hybrid	7
33	74	140	004	BONGSARI	1	RW 4 RT 8	436	PMT	14
33	74	140	005	BOJONGSALAMAN	1	RW 2 RT 1	437	PMT	6
33	74	140	006	CABEAN	1	RW 1 RT 11	438	Komunitas	13
33	74	140	007	SALAMANMLOYO	1	RW 5 RT 1	439	Hybrid	8
33	74	140	008	GISIKDRONO	1	RW 10 RT 5	440	Komunitas	6
33	74	140	009	KALIBANTENG KIDUL	1	RW 4 RT 2	441	Komunitas	9
33	74	140	010	KALIBANTENG KULON	1	RW 6 RT 4	442	Hybrid	5
33	74	140	011	KRAPYAK	1	RW 8 RT 2	443	Hybrid	7
33	74	140	012	TAMBAK HARJO	1	RW 4 RT 2	444	Hybrid	2
33	74	140	013	TAWANGSARI	1	RW 3 RT 3	445	Hybrid	1
33	74	140	014	KARANG AYU	1	RW 4 RT 8	446	Komunitas	7
33	74	140	015	KROBOKAN	1	RW 5 RT 5	447	Komunitas	5
33	74	140	016	TAWANGMAS	1	RW 5 RT 5	448	Hybrid	12
73	11			BONE					
73	11	020		KAHU					
73	11	020	001	CAMMILO	2	DUSUN CAMMILO RW 2 RT 2	449	Hybrid	15
73	11	020	004	MATTOANGING	2	DUSUN MATTOANGING RW 1 RT 1	450	PMT	22
73	11	020	005	NUSA	2	DUSUN NUSA RT 2	451	PMT	32
73	11	020	006	ARALLAE	2	DUSUN WAITUO RT 3	452	PMT	11
73	11	020	009	PALATTAE	1	LINGKUNGAN PALATTAE TIMUR RW 2 RT 2	453	Komunitas	9
73	11	020	013	CARIMA	2	DUSUN MATTOANGING RT 3	454	Hybrid	17
73	11	020	016	HULO	2	DUSUN BARUTTUNG 3 RW 3 RT 2	455	Komunitas	23
73	11	020	019	SANREGO	2	DUSUN SANREGO RT 4	456	Hybrid	43
73	11	030		KAJUARA					
73	11	030	001	RAJA	2	DUSUN PATTIRO RW 1 RT 2	457	Komunitas	14
73	11	030	002	LEMO	2	DUSUN LEMO RT 2	458	Hybrid	12
73	11	030	003	ABBUMPUNGENG	2	DUSUN DATA RT 2	459	PMT	10
73	11	030	004	BUARENG	2	DUSUN BONGO BULAENG RW 1 RT 1	460	PMT	6

73	11	030	005	MASSANGKAE	2	DUSUN LAGOPPO 1 RW 2 RT 1	461	PMT	14
73	11	030	006	MALLAHAE	2	DUSUN ANNASE RW 3 RT 3	462	Hybrid	14
73	11	030	007	POLEWALI	2	DUSUN LEMPOMAJANG RT 2	463	Komunitas	7
73	11	030	008	AWANG TANGKA	1	LINGKUNGAN BOKU RW 3 RT 2	464	PMT	5
73	11	030	009	PADAELO	2	LINGKUNGAN TALABANGI RT 1	465	Komunitas	6
73	11	030	010	GONA	2	DUSUN KADING (BACO) RT 1	466	Komunitas	4
73	11	030	011	WAETUWO	2	DUSUN BUHU RW 1 RT 1	467	Hybrid	7
73	11	030	012	BULU TANAH	2	DUSUN KACCOPE RW 1 RT 1	468	Hybrid	20
73	11	030	013	KALERO	2	DUSUN POPPORENG RT 3	469	PMT	15
73	11	030	014	LAPPA BOSSE	2	DUSUN KAMPUNG BARU RT 3	470	Hybrid	9
73	11	030	015	PUDE	2	DUSUN TUIE RT 1	471	Komunitas	14
73	11	030	016	ANCU	2	DUSUN CENRANAE RT 2	472	PMT	10
73	11	030	017	ANGKUE	2	DUSUN LAMPUTOA RT 2	473	Hybrid	14
73	11	030	018	TARASU	2	DUSUN TUJU-TUJU RT 2	474	Komunitas	16
73	11	080		MARE					
73	11	080	001	LAPPA UPANG	2	DUSUN BANCE'E RT 2	475	PMT	17
73	11	080	002	BATU GADING	2	DUSUN BATU GADING RW 1 RT 1	476	Hybrid	20
73	11	080	003	LAPASA	2	DUSUN LAPASA RW 1 RT 1	477	Komunitas	11
73	11	080	004	KARELLA	2	DUSUN KADDA RT 1	478	PMT	10
73	11	080	005	MARIO	2	DUSUN LEBBAE RW 3 RT 7	479	PMT	3
73	11	080	006	UJUNG SALANGKETO	2	DUSUN APALARINGE RW 2 RT 1	480	PMT	9
73	11	080	007	CEGE	2	DUSUN NIPA RW 1 RT 2	481	PMT	21
73	11	080	008	TELLU BOCCOE	2	DUSUN PAO RW 2 RT 2	482	Hybrid	3
73	11	080	009	PADAELO	1	LINGKUNGAN 1 RW 1 RT 1	483	Komunitas	23
73	11	080	010	KADAI	2	DUSUN BERUE RW 2 RT 2	484	Komunitas	10
73	11	080	011	TELLONGENG	2	DUSUN CADEA RT 2	485	Hybrid	13
73	11	080	012	MATTAMPA WALIE	2	DUSUN MASUMPU RW 2 RT 1	486	Hybrid	18
73	11	080	013	DATA	2	DUSUN DATA RT 1	487	Komunitas	8
73	11	080	014	SUMALING	2	DUSUN CEMPA RW 2 RT 1	488	Komunitas	4
73	11	080	015	PATTIRO	2	DUSUN KAMPUNG BARU RT 1	489	Komunitas	23
73	11	080	016	LAKUKANG	2	DUSUN LAKUKANG RT 1	490	PMT	9
73	11	080	017	UJUNG TANAH	2	DUSUN LIANGNGE RT 1	491	Hybrid	6
73	11	080	018	MATTIRO WALIE	2	DUSUN LAPPA LAMPOKO RW 3 RT 1	492	Hybrid	14
73	11	100		CINA					
73	11	100	001	ABBUMPUNGENG	2	DUSUN LERANG 1 RT 2	493	PMT	54
73	11	100	002	ARASOE	1	DUSUN KOMPLEKS	494	Komunitas	36

						PASAR RT 2			
73	11	100	003	CINENNUNG	2	DUSUN LAPPA CINENNUNG RT 2	495	Hybrid	16
73	11	100	004	TANETE HARAPAN	2	DUSUN TEKOT RT 2	496	PMT	12
73	11	100	005	TANETE	2	LINGKUNGAN PAKKAWARUE RT 2	497	Komunitas	15
73	11	100	006	LOMPU	2	DUSUN LOMPU RT 4	498	Komunitas	24
73	11	100	007	KAWERANG	2	DUSUN KAWERANG RT 2	499	Hybrid	29
73	11	100	008	WELENRENG	2	DUSUN LAPECCANG RT 1	500	Komunitas	25
73	11	100	009	AJANGPULU	2	DUSUN CABBERU RT 1	501	Hybrid	23
73	11	100	010	KANCO	2	DUSUN SAUGADIA RT 2	502	PMT	18
73	11	100	011	PADANG LOANG	2	DUSUN CINA RT 2	503	PMT	12
73	11	100	012	AWO	2	LINGKUNGAN AWO RT 2	504	Hybrid	11
73	11	220		DUABOCCOE					
73	11	220	018	ULO	1	DUSUN 2 RT 4	505	Hybrid	3
73	11	710		TANETE RIATTANG BARAT					
73	11	710	001	MAJANG	2	LINGKUNGAN MAJANG RW 2 RT 3	506	Hybrid	15
73	11	710	002	MACEGE	1	LINGKUNGAN PAKKANREBATA RT 1	507	Komunitas	75
73	11	710	003	JEPPEE	1	LINGKUNGAN JEPPE'E RT 2	508	PMT	8
73	11	710	004	MACANANG	1	LINGKUNGAN COPPOLEANG RT 7	509	PMT	14
73	11	710	005	MATTIRO WALIE	2	LINGKUNGAN SEPPAE RW 2 RT 3	510	Hybrid	8
73	11	710	006	BULU TEMPE	2	LINGKUNGAN WELALANG RT 2	511	Komunitas	35
73	11	710	007	WATANG PALAKKA	2	LINGKUNGAN ATANG PASARENG RT 2	512	Komunitas	36
73	11	710	008	POLEWALI	2	LINGKUNGAN KAMPUNG BARU RT 1	513	PMT	12
73	11	720		TANETE RIATTANG					
73	11	720	001	BIRU	1	LINGKUNGAN SODDANGNGE RW 1 RT 3	514	PMT	8
73	11	720	002	MASUMPU	1	LINGKUNGAN BIRU I RW 2 RT 1	515	Hybrid	6
73	11	720	003	TA_	1	LINGKUNGAN KAMPUNG BARU RW 7 RT 1	516	Komunitas	10
73	11	720	004	MANURUNGNGE	1	LINGKUNGAN MATAJANE RW 10 RT 1	517	PMT	9
73	11	720	005	WATAMPONE	1	LINGKUNGAN SALIWENG BENTENG 1 RW 6 RT 1	518	Hybrid	12
73	11	720	006	BUKAKA	1	LINGKUNGAN LALEBATA RW 1	519	Komunitas	7
73	11	720	007	WALENNAE	1	LINGKUNGAN WALANNAE RW 3 RT 1	520	Komunitas	7
73	11	720	008	PAPPOLO	2	LINGKUNGAN PAPPOLO RT 1	521	Hybrid	7
73	11	730		TANETE RIATTANG TIMUR					
73	11	730	001	TIBOJONG	1	LINGKUNGAN LAPPO BATUE RW 3 RT 1	522	PMT	18
73	11	730	002	CELLU	2	LINGKUNGAN	523	Komunitas	36

						CELLURILAU RT 2			
73	11	730	003	BAJOE	1	LINGKUNGAN APPASARENG RW 3 RT 3	524	PMT	15
73	11	730	004	LONRAE	1	LINGKUNGAN LONRAE RT 1	525	Hybrid	13
73	11	730	005	TORO	2	LINGKUNGAN TIPULUE RT 4	526	Hybrid	36
73	11	730	006	PANYULA	2	LINGKUNGAN 4 (PAO-PAO) RT 3	527	Komunitas	37
73	11	730	007	WAETUWO	2	LINGKUNGAN LAPANNI RT 1	528	Komunitas	47
73	11	730	008	PALLETTE	2	LINGKUNGAN KAMPUNG TENGAH RT 1	529	Hybrid	15
73	16			ENREKANG					
73	16	020		ENREKANG					
73	16	020	008	LEORAN	2	LINGKUNGAN PINANG RW 1 RT A	530	Komunitas	21
73	16	020	009	GALONTA	1	LINGKUNGAN KEPPE RW 1	531	PMT	17
73	16	020	010	JUPPANDANG	1	LINGKUNGAN MELATI RW 2 RT 1	532	Hybrid	20
73	16	020	011	LEWAJA	2	LINGKUNGAN KUKKU RW 1	533	Komunitas	21
73	16	020	012	RANGA	2	DUSUN RANGA RW RANGA BARU RT 1	534	Hybrid	22
73	16	020	013	KALUPPINI	2	DUSUN PALLI RW 2	535	PMT	52
73	16	020	014	TOBALU	2	DUSUN DANTE LAPIN RW 5	536	PMT	29
73	16	020	015	TOKKONAN	2	DUSUN DATA RW RK 1	537	Komunitas	35
73	16	020	016	PUSERREN	1	LINGKUNGAN BAMBA UTARA RW 1 RT 1	538	PMT	9
73	16	020	017	KARUENG	2	DUSUN PENJA RW RK 1	539	PMT	31
73	16	020	018	CEMBA	2	DUSUN KATIMBANG RW RK1	540	Hybrid	20
73	16	020	019	TUNGKA	2	DUSUN TAPUAN	541	Hybrid	40
73	16	020	020	TEMBAN	2	DUSUN TEMBAN	542	Komunitas	42
73	16	020	021	BUTTU BATU	2	DUSUN SINAR BUTTU TEANG	543	PMT	62
73	16	020	022	TALLU BAMBA	2	DUSUN KALIDONG	544	Hybrid	25
73	16	020	023	TUARA	2	DUSUN KULINJANG RW 1	545	Komunitas	22
73	16	020	024	LEMBANG	2	DUSUN DATTE RW 1	546	Komunitas	30
73	16	020	025	ROSOAN	2	DUSUN DADEKO	547	Hybrid	43
73	16	050		ALLA					
73	16	050	003	MATA ALLO	2	DUSUN TO'COLOK RW TO'COLOK	548	Komunitas	24
73	16	050	004	KALOSI	2	LINGKUNGAN KALOSI TIMUR RW RK 1 RT 2	549	Hybrid	10
73	16	050	015	KAMBIOLANGI	1	LINGKUNGAN BELAJEN BARAT	550	PMT	159
73	16	050	016	BUNTU SUGI	2	LINGKUNGAN BUBUN SALE RT PENANIAN	551	Komunitas	6
73	16	050	017	SUMILLAN	2	DUSUN LINTIK RT 1	552	Hybrid	34
73	16	050	024	PANA	2	DUSUN WAY BU'TU RW TALEPE	553	Komunitas	30
73	16	050	027	BOLANG	2	DUSUN BIBANG RW 1	554	PMT	12

						RT 2			
73	16	050	028	TAULO	2	DUSUN GALONGGONG RW RK 1	555	Hybrid	15
73	18			TANA TORAJA					
73	18	040		MAKALE					
73	18	040	012	KELURAHAN MANGGAU	2	LINGKUNGAN TA'BA RW TA'BA RT TA'BA	556	Komunitas	5
73	18	040	015	KELURAHAN BOMBONGAN	1	LINGKUNGAN TO'KALUKU RW 1 RT 2	557	PMT	6
73	18	040	019	KELURAHAN BATU PAPAN	1	LINGKUNGAN TOMBANG RW TOMBANG RT BATAS TANA MULIA	558	Hybrid	10
73	18	040	020	KELURAHAN TARONGKO	2	LINGKUNGAN SIALLO RW PALLO RT PA'BULAN	559	Komunitas	7
73	18	040	022	KELURAHAN PANTAN	1	LINGKUNGAN BEBO RW 1 RT 2	560	Hybrid	8
73	18	040	030	KELURAHAN ARIANG	2	LINGKUNGAN TORA'DA RW 2 (MENGGULILING) RT MENGGULILING	561	PMT	28
73	18	040	031	KELURAHAN LAMUNAN	1	LINGKUNGAN BUNTU KASSALE RW 1 (MANGASA) RT 2 (MANGASA)	562	Komunitas	9
73	18	040	032	KELURAHAN TONDON MAMULU	1	LINGKUNGAN DOKONG RW 2 RT 1	563	Hybrid	6
73	18	040	033	KELURAHAN RANTE	2	LINGKUNGAN KARUAYA SEPPANG RW SEPPANG RT LEDAN	564	PMT	4
73	18	040	034	KELURAHAN BUNTU BURAKE	1	LINGKUNGAN BUISUN RW BUNPU KADA RT RANTE	565	PMT	5
73	18	040	035	KELURAHAN KAMALI PENTALLUAN	1	LINGKUNGAN PAKU PENTALLUAN RW PENTALLUAN RT PENTALLUAN	566	PMT	16
73	18	040	036	KELURAHAN BOTANG	2	LINGKUNGAN BOTANG SELATAN RW TO'KALUKU RT PANA	567	Komunitas	17
73	18	040	037	KELURAHAN TAMPO MAKALE	2	LINGKUNGAN PORA RW PORA1 RT RANDANAN	568	Hybrid	10
73	18	040	038	LEMBANG LEA	1	DUSUN RANTE RW RANTE RT RANTE	569	Komunitas	6
73	18	040	039	KELURAHAN LAPANDAN	2	LINGKUNGAN LAPANDAN RW TIRO PADANG RT KALEMBANG	570	Hybrid	5
73	18	070		RANTEPAO					
73	18	070	002	LAANG TANDUK	1	LINGKUNGAN PANGRANTE RT 2	571	Hybrid	7
73	18	070	003	KARASSIK	1	LINGKUNGAN GURIRIK RT 2	572	PMT	31
73	18	070	004	RANTEPAO	1	LINGKUNGAN MENDURUK RT 2	573	PMT	13
73	18	070	005	SINGKI	1	LINGKUNGAN KARI RT 3	574	PMT	16
73	18	070	006	RANTE PASELE	1	LINGKUNGAN BUNTU LEPONG RT 5	575	Komunitas	2
73	18	070	007	PASELE	1	LINGKUNGAN TO'SARURAN RT 2	576	PMT	5

73	18	070	008	PENANIAN	1	LINGKUNGAN MAGA RT 1	577	Hybrid	3
73	18	070	009	MALANGO	1	LINGKUNGAN PASAR PAGI RT 1	578	Komunitas	19
73	18	070	014	MENTIRO TIKU	1	LINGKUNGAN BA'LELE RT 1	579	Hybrid	33
73	18	070	015	LIMBONG	2	DUSUN BUNTU AMBAANG RT 2	580	Komunitas	15
73	18	070	016	SALOSO	2	LINGKUNGAN KALAMINDAN	581	Komunitas	26
73	18	072		TALLUNGLIPU					
73	18	072	001	TAMPO TALLUNGLIPU	1	LINGKUNGAN TAMPO RW 2 RT 3	582	PMT	5
73	18	072	002	TAGARI TALLUNGLIPU	1	LINGKUNGAN SANGKOMBONG RT 1 (BUNGIN)	583	Komunitas	24
73	18	072	003	RANTEPAKU TALLUNGLIPU	1	LINGKUNGAN PAULASAN RT 2	584	Komunitas	31
73	18	072	004	TALLUNGLIPU MATALLO	1	LINGKUNGAN RANTE BOLU RT 2	585	PMT	5
73	18	072	005	TALLUNGLIPU	1	LINGKUNGAN BO'NE MATAMPU UTARA	586	Hybrid	17
73	18	072	006	TAMTAMAN TALLUNGLIPU	2	LINGKUNGAN TANTANAN II RT 2	587	PMT	19
73	18	072	007	BUNTU TALLUNGLIPU	2	LINGKUNGAN LAMPAN RT 1	588	Hybrid	28
73	18	083		KESU					
73	18	083	001	LEMBANG SANGBUA	2	LINGKUNGAN TANGDENGAN RT TURUNAN	589	Komunitas	4
73	18	083	002	LEMBANG TODONGKON	2	LINGKUNGAN BALIU' PA' BESENAN RT LONDA	590	Hybrid	26
73	18	083	003	LEMBANG ANGIN-ANGIN	2	LINGKUNGAN BAMBA BONE	591	Hybrid	22
73	18	083	004	LEMBANG TALLU LOLO	1	LINGKUNGAN SE' PON RT KARUNGAN	592	PMT	3
73	18	083	005	LEMBANG RINDINGBATU	2	LINGKUNGAN KARAMBE RT TONDOK	593	PMT	12
73	18	083	006	KELURAHAN BA'TAN	2	LINGKUNGAN BA'TAN PANGA RT BATU PIA	594	Komunitas	20
73	18	083	007	KELURAHAN PANTA'NAKAN LOLO	2	LINGKUNGAN BONORAN RT BELU	595	Hybrid	14
73	71			MAKASSAR					
73	71	040		MAKASSAR					
73	71	040	002	MARICAYA BARU	1	RW 4 RT 1	597	Hybrid	6
73	71	040	003	MARADEKAYA SELATA	1	RW 1 RT 3	598	PMT	3
73	71	040	004	BARA-BARAYA SELATAN	1	RW 2 RT 2	599	PMT	1
73	71	040	005	BARA-BARAYA	1	RW 1 RT 4	600	Hybrid	3
73	71	040	006	MARADEKAYA	1	RW 4 RT 4	601	PMT	2
73	71	040	007	MARADEKAYA UTARA	1	RW 4 RT 11	602	PMT	7
73	71	040	008	BARA-BARAYA UTARA	1	RW 5 RT 3	603	Komunitas	3
73	71	040	009	BARA-BARAYA TIMUR	1	RW 2 RT 6	604	Hybrid	8
73	71	040	010	MACCINI PARANG	1	RW 6 RT 1	605	PMT	5
73	71	040	011	MACCINI	1	RW 3 RT 3	606	Komunitas	1
73	71	040	012	MACCINI GUSUNG	1	RW 2 RT 9	607	PMT	10
73	71	040	013	BARANA	1	RW 1 RT 2	608	Komunitas	3

73	71	040	014	LARIANG BANGI	1	RW 4 RT 5	609	Hybrid	3
73	71	050		UJUNG PANDANG					
73	71	050	001	LAE - LAE	1	RW 3 RT 3	610	Hybrid	3
73	71	050	002	LOSARI	1	RW 1 RT E	611	Komunitas	2
73	71	050	003	MANGKURA	1	RW 1 RT A	612	Hybrid	1
73	71	050	004	PISANG SELATAN	1	RW 4 RT 1	613	Komunitas	2
73	71	050	005	LAJANGIRU	1	RW 4 RT C	614	PMT	3
73	71	050	006	SAWERIGADING	1	RW 1 RT 1	615	PMT	4
33	74	090	005	BANGETAYU WETAN	1	RW 2 RT 1	616	PMT	9
73	71	050	008	BULOGADING	1	RW 2 RT C	617	Hybrid	3
73	71	050	009	BARU	1	RW 1 RT 3	618	PMT	1
73	71	090		TALLO					
73	71	090	001	BUNGA EJA BERU	1	RW 5 RT 4	620	Komunitas	32
73	71	090	002	LEMBO	1	RW 2 RT B	621	Hybrid	20
73	71	090	003	KALUKUANG	1	RW 1 RT 2	622	Komunitas	4
73	71	090	004	LA LATANG	1	RW 4 RT 1	623	Hybrid	12
73	71	090	005	RAPPOJAWA	1	RW 1 RT 6	624	PMT	12
73	71	090	006	TAMMUA	1	RW 2 RT 2	625	PMT	8
73	71	090	007	RAPPOKALLING	1	RW 4 RT C	626	PMT	24
73	71	090	008	WALA-WALAYA	1	RW 3 RT 4	627	PMT	7
73	71	090	009	UJUNG PANDANG BARU	1	RW 2 RT E	628	PMT	10
73	71	090	010	SUWANGGA	1	RW 5 RT B	629	Komunitas	7
73	71	090	011	PANNAMPU	1	RW 3 RT 5	630	Hybrid	20
73	71	090	012	KALUKU BODOA	1	RW 1 RT 5	631	Komunitas	7
73	71	090	013	BULOA	1	RW 4 RT B	632	Hybrid	3
73	71	090	014	TALLO	1	RW 2 RT E	633	Komunitas	24
73	71	100		PANAKUKKANG					
73	71	100	008	KARAMPUANG	1	RW 9 RT 2	634	Hybrid	4
73	71	100	012	KARUWISI	1	RW 6 RT C	635	Komunitas	10
73	71	110		BIRING KANAYA					
73	71	110	004	PACCERAKANG	1	RW 12 RT 2	636	PMT	3
73	71	110	005	DAYA	1	RW 2 RT 5	637	Hybrid	3
73	71	110	009	P A I	1	RW 1 RT 3	638	Komunitas	1
73	71	110	010	SUDIANG RAYA	1	RW 4 RT 1	639	PMT	1
73	71	110	011	SUDIANG	1	RW 4 RT 3	640	Hybrid	2

LAMPIRAN 2. DATA ISIAN KUESIONER P2K08 UNTUK KASUS CONTOH DI KABUPATEN BONE

responden	Anggota rumah tangga	Luas lantai	lantai	makan	Pakaian	Puskesmas	lahan	Luas lahan	sofa	radio	tv	parabola	sapi	motor	mobil	pompa	emas	tberbunga	Lahan milik	Luas lahan m	Krt umur	Krt jk	Krt kwn	Krt formal	Krt ijazah	Janak 04	Anak sd	Anak smp	Art ijazah	dependency	lnpcexpe	epcexpe	ranking
TASMIR	7	72	4	2	2	1	1	10000	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10000	37	1	2	2	4	1	2	1	4	2.5	13.2917	592264.0856	15
M. NASIR	2	80	4	1	3	2	2	0	3	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	35	1	1	7	3	0	0	0	3	0	13.3082	602111.739	16